BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Sulawesi Barat terletak pada sisi barat pulau Sulawesi dengan luas wilayah daratan 16.937,16 Km^2, sekitar 9,76 persen dari luas Pulau Sulawesi.

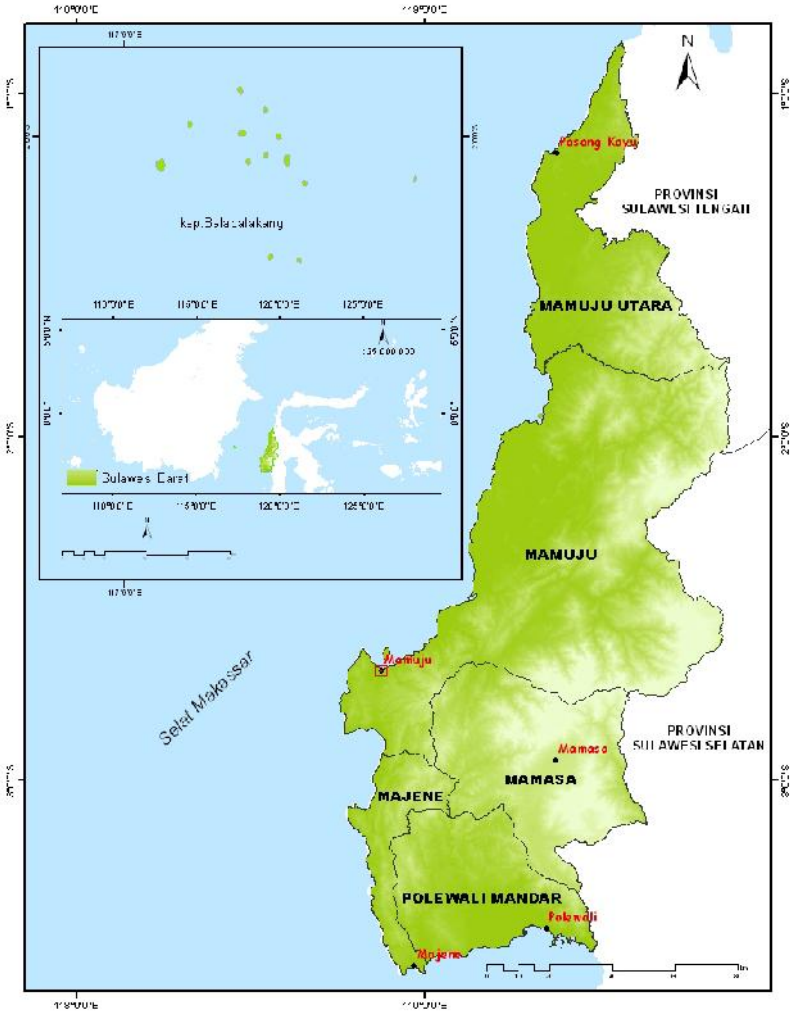

Gambar 2. Peta Provinsi Sulawesi Barat

Luas perairan laut Sulawesi Barat mencapai 7.668,84 km^2 dengan panjang garis Pantai Barat memanjang dari utara ke selatan sepanjang 639,07

km^2 dengan jumlah pulau sebanyak 40 buah. Batas-batas wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

Secara administratif, hingga tahun 2011 Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari 5 kabupaten yakni Kabupaten Mamuju, Majene, Polewali Mandar, Mamasa dan Mamuju Utara, yang terdiri dari 69 kecamatan dan 645 kelurahan/desa.

Luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat tercatat 16.937,16 km². Kabupaten Mamuju merupakan kabupaten terluas dengan luas 8.014,06 kilometer persegi atau luas kabupaten tersebut 47,32 % dari seluruh wilayah Sulawesi Barat.

Tabel 2.1.
Luas Wilayah Menurut Kabupaten
di Provinsi Sulawesi Barat

No	Kabupaten	Luas (Km^2)	Persentase Terhadap Luas Sulawesi Barat
1.	Majene	947,84	5,60
2.	Polewali Mandar	2.729,23	16,11
3.	Mamasa	2.202,30	13,00
4.	Mamuju	8.014,06	47,32
5.	Mamuju Utara	3.043,75	17,97
TOTAL		**16.937,18**	**100,00**

Sumber: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Barat Dalam Angka 2010.

2. Letak dan Kondisi Geografis

Provinsi Sulawesi Barat merupakan wilayah dengan potensi kawasan strategis sebagai pengembangan dari provinsi yang ada di Sulawesi, yang terletak antara 0°12’-3°38’ Lintang Selatan dan 118°43’15”-119°54’3” Bujur Timur.

Secara geografis, wilayah Provinsi Sulawesi Barat berada pada posisi yang sangat strategis, terletak di jantung Negara Kesatuan Republik Indonesia, berada pada posisi antara Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi

Tengah dan Kalimantan Timur, serta berhadapan langsung dengan Alur Lintas Kepulauan Indonesia (Selat Makassar). Posisi ini akan sangat menguntungkan bagi pengembangan daerah dalam bidang ekonomi dan sosial ke depan.

Selain aliran sungai, di Sulawesi Barat terdapat 193 gugusan pegunungan. Gunung tertinggi adalah Gunung Ganda Dewata dengan ketinggian 3.037 meter diatas permukaan laut yang menjulang tegak di Kabupaten Mamuju.

Tabel 2.2.
Jumlah Gunung dan Nama Gunung Tertinggi Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat

No	Kabupaten	Jumlah Gunung	Nama Gunung Tertinggi	Ketinggian Gunung (meter)
1.	Majene	11	Seteng	1 001
2.	Polewali Mandar	28	Tetuho	1 448
3.	Mamasa	31	Mambulilling	2 873
4.	Mamuju	109	Ganda Dewata	3 037
5.	Mamuju Utara	14	Pandabatu	284

Sumber: Sulawesi Barat Dalam Angka 2006-2010

3. Topografi

Provinsi Sulawesi Barat merupakan daerah yang berada di garis pantai bagian barat Pulau Sulawesi. Empat dari lima kabupaten di Sulawesi Barat berada pada pinggir pantai.Selain itu,Provinsi Sulawesi Barat juga me-miliki potensi pegunungan sehingga memiliki banyak aliran sungai yang cukup besar dan berpotensi untuk dikembangkan.

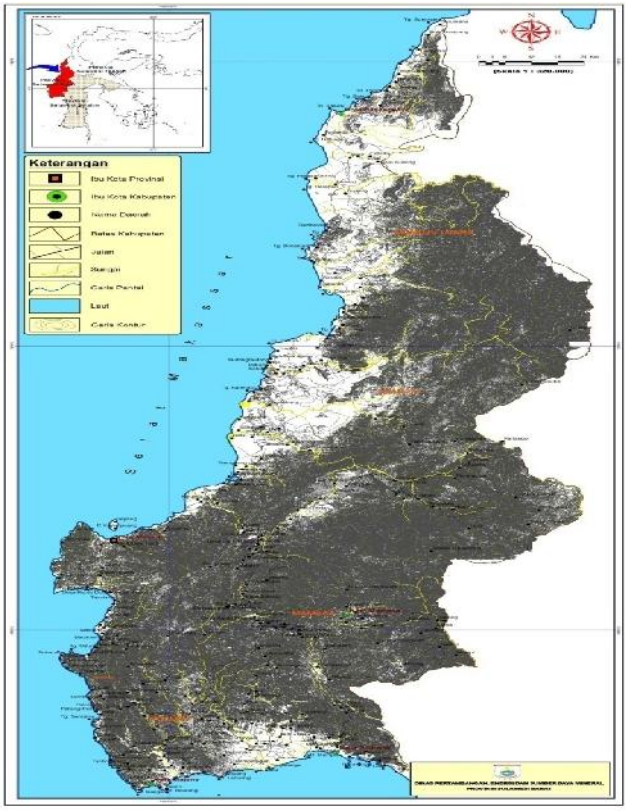

Gambar 3 : Peta Topografi Sulawesi Barat

Kondisi Topografi Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari laut dalam, laut dangkal, satuan geomorfologi pegunungan, satuan geomorfologi perbukitan dan satuan geomorfologi pedataran.

Satuan pegunungan menempati wilayah paling luas yaitu sekitar 70% dari total luas wilayah dan umumnya menempati bagian tengah ke timur dengan bentuk memanjang utara – selatan, lembah-lembah yang terbentuk merupakan wilayah yang curam, dengan puncak tertinggi mencapai 3.000 m dpl yaitu Bulu Gandadewata (3.074 m dpl).

Dibagian utara wilayah Mamuju utara terdapat puncak yang mencapai ketinggian 2005 m dpl Bulu Bake, Bulu Tarakedo (1465 m), Bulubatumpihono (1115 m), Bulu Banga (1345 m), Tanete Dengeng (1308), dan Tanete Rijaba (1207 m). Diwilayah Mamuju dengan ketinggian 2331 m dpl yaitu Tanete Karisak. Di bagian tengah terdapat Tanete Pelatang dengan ketinggian 2986 m, dan banyak lagi puncak-puncak gunung dengan ketinggian ribuan meter dpl. Puncak-puncak yang tinggi tersebut umumnya berada di Kabupaten Mamasa ke arah timur.

Pada bagian barat wilayah ini hingga pantai umumnya bergelombang lemah sampai pedataran dengan endapan resen dari sedimentasi sungai-sungai besar. Satuan perbukitan memanjang tipis utara – selatan menyusur pantai sepanjang Majene hingga kota Mamuju dan sebagian di Mamuju Utara dan polewali mandar. Sedangkan morfologi pedataran menempati kota Majene, Polewali Mandar, Budong-Budong dan Pasangkayu. Kedua terakhir masing-masing menempati wilayah sekitar 15% dari total luas Provinsi Sulawesi Barat.

4. Geologi

Dalam pembagian perpetaan geologi di Indonesia, Provinsi Sulawesi Barat dibagi menjadi tiga lembar peta yaitu lembar Pasangkayu di bagian utara meliputi wilayah kabupaten Mamuju Utara, lembar Mamuju di tengah meliputi wilayah Kabupaten Mamuju, lembar Majene dan bagian barat lembar Palopo (Sulawesi Selatan) meliputi Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar serta Kabupaten Mamasa di bagian Selatan. Ketiga wilayah ini didominasi oleh jajaran pegunungan dan hanya sebagian kecil saja yang merupakan pedataran pantai yang terletak di bagian Barat.

Pada peta topografi Lembar Pasangkayu (Skala 1 : 250.000) yang dikeluarkan Bakosurtanal 1993, memperlihatkan bahwa wilayah utara merupakan daerah perbukitan dengan puncak bukit yang tertinggi kurang dari 500 m dpl yaitu puncak Bulu Harapan 470 m). Namun kearah Selatan lembar ini didominasi oleh pegunungan terutama ke arah timur dengan ketinggian diatas 1000 m dpl. Puncak tertinggi adalah Bulu Bake dengan ketinggian 2005 m dpl. Puncak-puncak lainnya adalah Bulu Tarakedo (1465 m), Bulubatumpihono(1115 m), Bulu Banga (1345 m), Tanete Dengeng (1308), dan Tanete Rijaba (1207 m).

Konsekuensi dari daerah pegunungan adalah adanya lembah-lembah terjal yang pada akhirnya membentuk alur-alur sebagai konsentrasi aliran permukaan yang lambat laun membentuk sungai. Terdapat sungai pada lembar ini, namun ada tiga sungai yang paling menonjol yaitu Salu Pasangkayu, Salu Lariang, dan Salu Karossa.

Bentuk bentang alam pada lembar Mamuju didominasi oleh pegunungan yaitu 2/3 dari luas wilayahnya. Daerah-daerah tersebut adalah wilayah utara, tengah, timur laut dan selatan.

Sama halnya dengan wilayah-wilayah pada lembar Pasangkayu lembah-lembah yang terbentuk merupakan wilayah yang curam, dengan puncak tertinggi mencapai 3000 m dpl yaitu Bulu Gandadewata (3.074 m dpl). Dibagian utara peta terdapat puncak yang mencapai ketinggian 2331 m dpl yaitu Tanete Karisak. Dibagian tengah terdapat Tanete Pelatang dengan ketinggian 2986 m, dan banyak lagi puncak-puncak gunung dengan ketinggiam ribuan meter dpl. Puncak-puncak yang tinggi tersebut umumnya berada di Kabupaten Mamasa kea rah Timur.

Pada bagian barat lembar ini hingga pantai umumnya bergelombang lemah sampai pedataran dengan endapan resen dari sedimentasi Sungai Budong-budong, Sungai Karama, dan Sungai Kalukku.

Kondisi yang sama terlihat pada peta Lembar Majene. Pada lembar ini wilayah pegunungan terdapat di bagian utara timur laut dengan puncaknya mencapai 2000-an m dpl. Salah satu puncak tertinggi adalan Buttu Parinding yang terdapat di kab.Mamasa dengan ketinggian 2679 m. Sedangkan bagian

selatan merupakan wilayah pedataran dan wilayah pesisir barat merupakan daerah bergelombang kuat.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Wilayah Provinsi Sulawesi Barat dapat dibagi menjadi 3 yaitu satuan geomorfologi pegunungan, satuan geomorfologi perbukitan dan satuan geomorfologi pedataran.

Satuan pegunungan menempati wilayah paling luas yaitu sekitar 70% dari luas total wilayah dan umumnya menempati bagian tengah ke timur dengan bentuk memanjang utara-selatan. Satuan perbukitan memanjang tipis utara-selatan menyusur pantai sepanjang Majene, Budong-budong dan Pasangkayu. Kedua terakhir masing-masing menempati wilayah sekitar 15% dari total luas Provinsi Sulawesi Barat.

Geologi Sulawesi Barat disusun beberapa jenis batuan, yaitu batuan sedimen, malihan, gunung api dan terobosan. Umurnya berkisar antara Mesozoikum sampai Kuarter. Urutan stratigrafi batuan tersebut dimulai dari yang tertua ke yang muda adalah batuan Malihan Kompleks Wana (TRw) yang terdiri sekis, genes, filit dan batusabak. Satuan ini dijumpai pada lembar Mamuju dan Lembar Pasang kayu yang diduga berumur lebih tua dari Kapur dan tertindih tak selaras oleh Formasi Latimojong (Kls) dibagian timur memanjang utara-selatan wialayah Sulawesi barat. Formasi ini terdiri dari filit, kuarsit, batu lempung malih, dan pualam. Satuan batuan ini berumur Kapur.

Formasi Latimojong ditindih tak selaras Formasi Toraja pada bagian timur wilayah mamuju dan mamasa yang terdiri dari batupasir kuarsa, konglomerat kuarsa, kuarsit, serpih dan batu lempung yang umumnya berwarna merah atau ungu, setempat dijumpai batubara. Formasi ini mempunyai mempunyai Anggota Rantepao (Tetr) yang terdiri dari batu gamping numulit berumur Eosen Tengah – Eosen Akhir. Sedangkan pada wilayah pasang kayu formasi Latimojong di tindih tidah selaras batuan gunung api Formasi Lamasi (Toml) dan Formasi Talaya. Formasi Lamasi bersusunan andesit-dasit berumur Oligosen-Miosen Awal. Formasi Talaya bersusunan andesit-basal berumur Miosen Awal-Miosen Akhir. Formasi

Lamasi menindih tidah selaras Formasi Toraja yang berumur Oligosen Akhir – Miosen Awal.

Batuan gunung api ini beranggotakan Batu gamping (Tomc), tertindih selaras oleh Formasi Riu (Tmr) yang terdiri dari batu gamping napal. Formasi Riu berumur Miosen Awal – Miosen Tengah dan tertindih tak selaras oleh Formasi Sekala (Tmps) dan Batuan Gunung api Talaya (Tmtv). Formasi Sekala terdiri dari grewake, batu pasir hijau, napal dan batu gamping, bersisipan tufa dan lava yang tersusun oleh andesit – basal. Formasi ini berumur Miosen Tengah – Pliosen dan berhubungan menjemari dengan Batuan Gunungapi Talaya. Batuan Gunungapi Talaya terdiri dari breksi, lava dan tufa yang tersusun oleh andesit – basal. Batuan ini mempunyai Anggota Tuf Beropa (Tmb) dan menjemari dengan Batuan Gunung api Adang (Tma), terutama yang disusun oleh leusit – basal.

Sedangkan Pada bagian barat wilayah Kab. Mamuju Utara didominasi oleh batuan sedimen Formasi Lariang (Tmpl) dan Formasi Pasang kayu (TQp). Formasi ini merupakan endapan molase terdiri dari konglomerat, batupasir dan batulempung. Batuan berumur Miosen Tengah – Miosen Akhir dan mempunyai hubungan ketidak selarasan dengan batuan yang lebih tua di bawahnya dan juga batuan yang lebih muda di atasnya termasuk Formasi Pasangkayu. Formasi Pasangkayu terdiri dari batu pasir dan batu lempung, setempat ditemukan batu gamping dan konglomerat. Umur formasi ini adalah Pliosene dan ditindih secara tidak selaras oleh satuan aluvial (Qa) yang berumur holosen dan mendominasi bagian barat.

Batuan Gunungapi Adang berhubungan menjemari dengan Formasi Mamuju (Tmm) yang berumur Miosen Akhir. Formasi Mamuju terdiri atas napal, batupasir gampingan, napal tufaan dan batugamping pasiran bersisipan tufa. Formasi ini mempunyai Anggota Tapalang (Tmmt) yang terdiri dari batugamping koral, batugamping bioklastik dan napal yang banyak mengandung moluska. Formasi Lariang terdiri dari batupasir gampingan dan mikaan, batulempung, bersisipan kalkarenit, konglomerat dan tufa. Formasi ini berumur Miosen Akhir – Pliosen Awal.

Pada bagian timur wilayah Sulawesi barat disusun oleh batuan terobosan batolit granit (Tmpi) dengan penyebaran yang cukup luas menerobos semua satuan yang lebih tua (mendominasi bagian utara timur laut atau daerah Mamasa). Batuan ini terdiri dari granitik, diorit, riolit dan setempat gabro. Batuan terobosan berbentuk batolit ini diduga berumur Pliosen. Kearah tenggara wilayah Mamasa, batuannya didominasi oleh batuan epiklastik gunungapi Formasi Loka (Tml). Formasi ini terdiri atas batupasir andesitan, konglomerat, breksi dan batu lanau. Batuan ini mempunyai umur Miosen Tengah – Miosen Akhir. Pada bagian tengah ditempati oleh batuan gunung api Walimbong (Tmpv) yang terdiri atas lava dan breksi. Penyebaran batuan ini cukup luas dan menyebar hingga ke arah tenggara. Batuan ini diduga berumur Mio-Pliosen. Diwilayah Mamuju jumpai batuan Tufa Barupu (Qbt) yang terdiri dari tufa dan lava, yang diduga berumur Pliosen.

Sedangkan di bagian barat wilayah Sulawesi barat pada umumnya di susun oleh endapan sedimenter dimana di wilayah mamuju tersingkap Formasi Budongbudong (Qb) yang terdiri dari konglomerat, batupasir, batulempung dan batugamping koral (Ql). Endapan termuda di Lembar ini adalah endapan kipas aluvium (Qt) dan aluvium (Qa) terdiri dari endapan-endapan sungai, pantai dan antar gunung.

Sedangkan wilayah Majene dan Polewali Mandar tersusun dari batuan sedimen dari Formasi Mandar. Batuan tersebut terdiri atas batupasir, batu lanau dan serpih serta lensis batubara. Hasil penanggalan menunjukkan bahwa umur formasi ini Miosen Akhir. Selain Formasi Mandar (Mamuju), pada bagian barat juga ditemukan batuan sedimen klastik lainnya (Formasi Mapi/Tmpm) yang tersusun oleh batu pasir, batu lempung, batu gamping pasiran dan konglomerat. Umur dari satuan ini adalah Miosen Tengah – Pliosen.

Proses tertonik yang pernah terjadi wilayah Sulawesi Barat menyebabkan pemalihan pada kelompok batuan Kompleks Wana (TRw) dan Formasi Latimojong. Perlipatan dan pensesaran pada batuan berumur Eosen Formasi Toraja dan batuan Berumur Miosen Formasi Lariang (Tmpl), pembentukan batuan sedimen molase Formasi Pasangkayu (TQp). Dalam fase tetonik yang

berbeda juga menyebabkan perlipatan dan pensesaran pada kelompok batuan volkanik seperti Formasi Lamasi (Toml), Formasi Talaya (Tmtv), Formasi Sekala (Tmps).

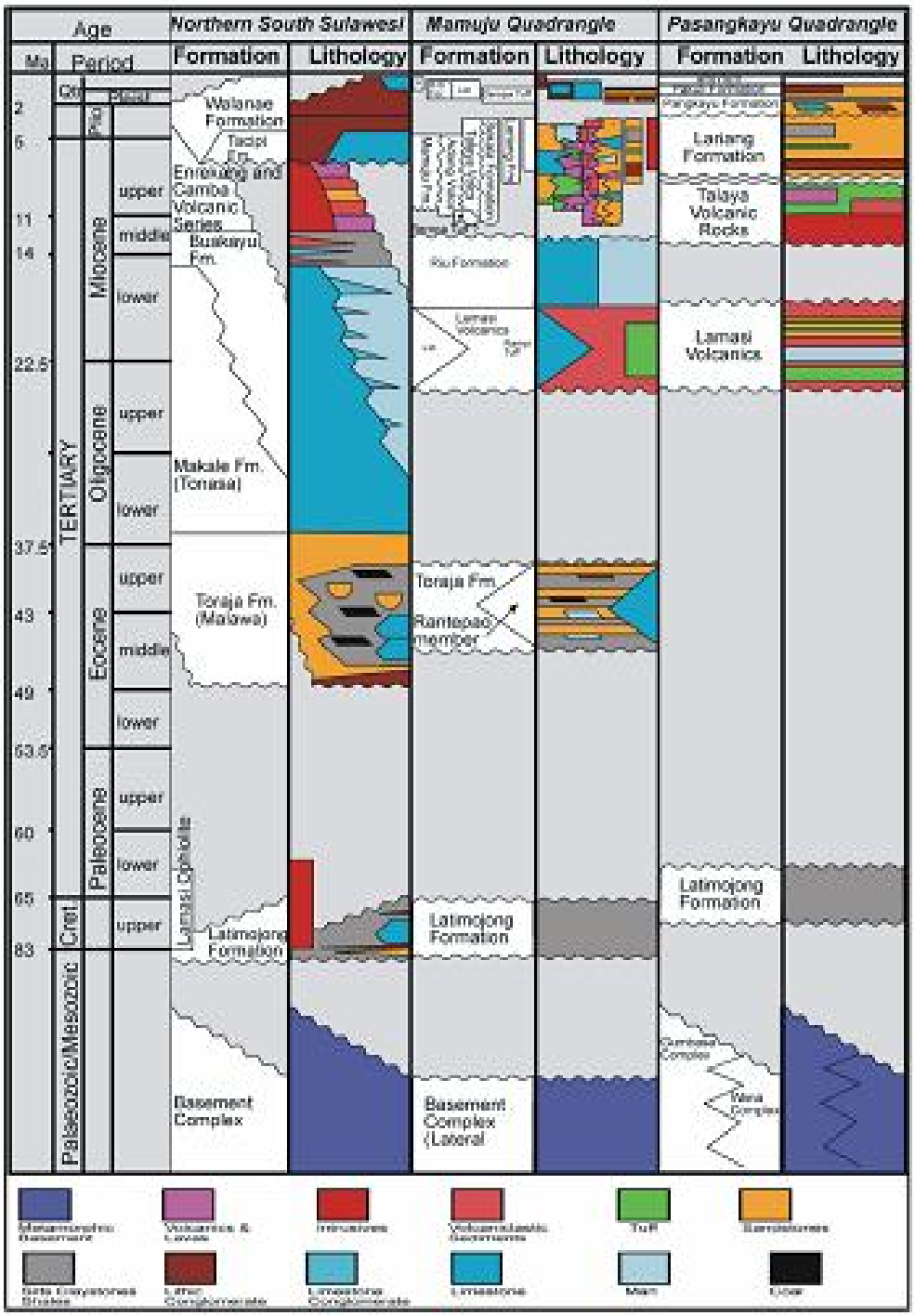

Gambar 4. Kolom Stratigrafi wilayah Provinsi Sulawesi Barat

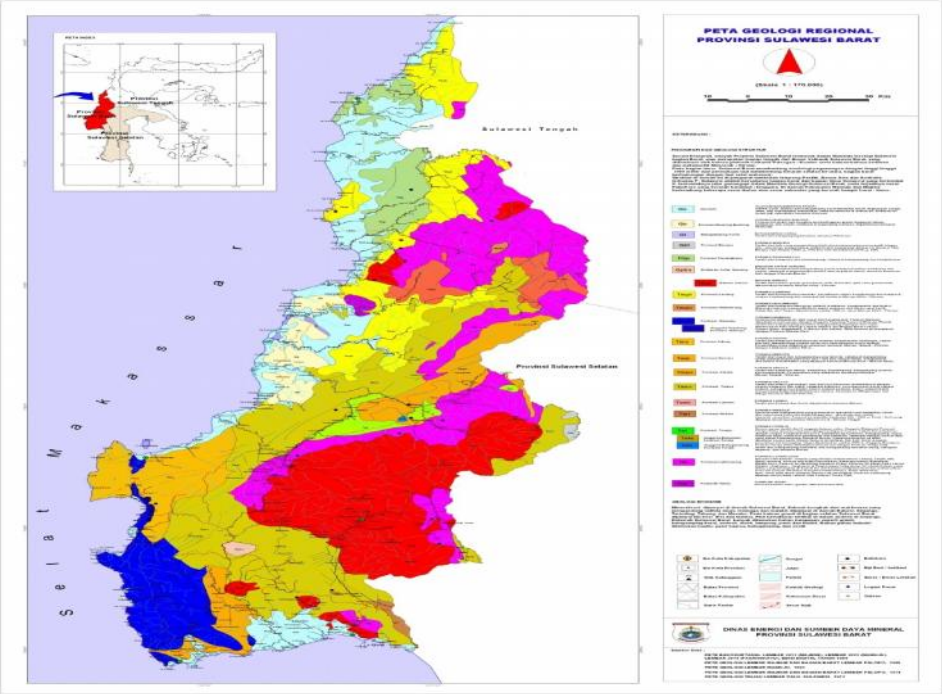

Gambar 5. Peta Geologi Sulawesi Barat

5. Hidrologi

Sebagian besar wilayah Provinsi Sulawesi Barat mempunyai kelerengan >40% dan dialiri oleh beberapa sungai besar dan kecil dengan arah aliran timur ke barat yang seluruhnya bermuara di pantai Barat dan Selatan. Daerah dengan ketinggian lebih dari 100 meter dari permukaan laut (dpl) dan kelerengan >40% berada tengah dan timur yang sebagian besar merupakan hulu sungai.

Tabel 2.3.
Nama-nama Sungai Utama Menurut Panjang dan Aliran Sungai di Provinsi Sulawesi Barat

No	Nama Sungai	Panjang (Km)	Lokasi
1.	Saddang	150	Tator, Enrekang, Pinrang, Polewali Mandar
2.	Matakali	28	Polewali Mandar
3.	Mambi	95	Polewali Mandar
4.	Mandar	90	Polewali Mandar
5.	Manyamba	28	Majene
6.	Malunda	38	Majene
7.	Kalukku	32	Majene, Polewali Mandar
8.	Karama	150	Mamuju
9.	Lariang		Mamuju Utara
S 10.	Nosu		Mamasa

Sumber: Sulawesi Barat Dalam Angka 2006-2010 / Hasil Musrenbang RPJMD

Jumlah sungai yang tergolong besar mengaliri wilayah Sulawesi Barat sebanyak delapan aliran sungai. Kabupaten Polewali Mandar memiliki lima aliran sungai seperti Sungai Saddang, Sungai Matakali, Sungai Mambi, Sungai Mandar dan Sungai Kaluku. Disamping itu, Kabupaten Majene memiliki dua aliran utama yaituSungai Manyamba dan Sungai Malunda. Selain itu, potensi aliran sungai yang cukup besar adalah aliran Sungai Karama yang membentang di Kabupaten Mamuju yang sudah dilirik oleh beberapa investor untuk selanjutnya di kembangkan menjadi pusat pembangkit tenaga listrik yang cukup besar.

Ekologi DAS

DAS harus dilihat sebagai ekosistem yang perlu dijaga kualitas dan keberlanjutan fungsinya (misalnya untuk menjaga daya dukung sumber daya DAS dan kehidupan manusia), sekaligus sebagai kawasan pengembangan ekonomi. Data berikut ini mendemonstrasikan betapa penting DAS-DAS di Sulawesi Barat dan perlunya dukungan kebijakan untuk pemeliharaan.

Tabel 2.4.
Kebijakan Pengelolaan DAS-DAS utama di Provinsi Sulawesi Barat

Nama DAS atau kelompok DAS	Luas DAS	Areal Kritis	Eksternal Kekritisan	Frekuensi Banjir di Hilir	Fungsi dan Peran DAS							Arahan Kebijakan		
					PLTA (MW)	Irigasi	Air Baku	Pert. & perkeb.	Wallacea Ecoregion	Ecotourism	Keragaman Stabilisasi Ekosistem	Konservasi	Preservasi	Urutan Prioritas
Budong-budong/ Topoyo	326,579	65,756	20.1	Tinggi, pengaruhi jalan negara	124	√	Besar	Besar	Sgt Penting	Sgt Potensial	Sgt Penting	√	√	I
Karama	344,899	84,659	24.5	Tinggi	115 ++	√	Besar	Besar	Sgt Penting	Sgt Potensial	Sgt Penting	√	√	I
Karossa/ benggaulu	151,395	10,024	6.6	Sedang	√	√	Besar	Besar	Sgt Penting	Sgt Potensial	Sgt Penting	√	√	II
Lariang/ Pasangkayu	167,587	11,688	7.0	Sedang	√	x	Besar	Besar	Sgt Penting	Potensial	Sgt Penting	√	√	II
Malunda	67,767	1,549	2.3	Sedang	x	x	Kecil	Sedang	Penting	Potensial	Penting		√	III
Mamasa	89,106	13,872	15.6	Wil, hulu DAS	√	x	Besar	Sedang	Penting	Sgt Potensial	Sgt Penting	√		II
Mamuju	149,487	67,067	44.9	Sedang	x	x	Besar	Sedang	Sgt Penting	Sgt Potensial	Sgt Penting	√	√	I
Mandar	93,462	36,656	39.2	Sedang		x	Kecil	Kecil	Penting	Potensial	Penting	√		III
Mapilli	229,644	77,983	34.0	Tinggi	174	√	Besar	Besar	Sgt Penting	Sgt Potensial	Sgt Penting	√	√	I
Saddang (hulu)	71,856	19,448	27.1	Wil, hulu DAS	x	√	Kecil	Kecil	Penting	Potensial	Sgt Penting	√		III
Total	1,691,782	388,702	22.1											

Sumber : Draft RTRWP Sulawesi Barat thun 2010-2030

Pengembangan Ekologi DAS harus dikaitkan (terintegrasi) dengan pengembangan fungsi ekonominya, seperti PLTA, air Irigasi dan fungsi-fungsi lain, tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Informasi yang ditampilkan pada tabel di atas hanya bersifat umum. Provinsi Sulawesi Barat perlu membuat rencana detail dan terpadu pengembangan dan pengelolaan masing-masing DAS. Arahan-arahan pengembangan masing-masing perlu disimulasikan untuk mendapatkan arahan yang bisa memberikan hasil optimal.

Pengembanan daerah aliran sungai (DAS) dilakukan berdasarkan kondisi lingkungan awal dari setiap DAS yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Kondisi DAS-DAS ini dapat dikelompokkan ke dalam kategori kritis dan tidak kritis. Kondisi kekritisan DAS tersebut berhubungan langsung dengan keadaan biota yakni fauna dan flora yang ada di dalam DAS tersebut.

Arahan prioritas pengembangan ekologi DAS hendaknya diprioritaskan berdasarkan tingkat kekritisannya. DAS Mamuju adalah DAS yang memiliki persentase wilayah kritis yang terbanyak yakni 45% dari total wilayah DAS, menyusul DAS Mandar (39%), DAS Mapilli (34%) dan DAS Saddang (27%). DAS Karama yang merupakan wilayah DAS terbesar dengan luas 344.899 ha mencakup 20 persen dari luas Provinsi Sulawesi Barat juga merupakan DAS dengan persentase lahan kritis yang besar yakni sebesar 20 persen dari total wilayah DAS Karama.

Gambar 6. Peta DAS Provinsi Sulawesi Barat

Adapun data kekritisan Daerah-daerah Aliran Sungai di wilayah provinsi Sulawesi Barat, dapat diamati pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5.
Kondisi Kekritisan DAS-DAS di Provinsi Sulawesi Barat

DAS	Tdk Kritis (ha)	% DAS	Kritis (ha)	% DAS	Total DAS	Persen (%)
DAS Budong-budong	260,823	80	65,756	20	326,579	19.3
DAS Karama	260,240	75	84,659	25	344,899	20.4
DAS Karossa	141,362	93	10,024	7	151,386	8.9
DAS Lariang	155,897	93	11,688	7	167,585	9.9
DAS Malunda	66,218	98	1,549	2	67,767	4.0
DAS Mamasa	75,234	84	13,872	16	89,106	5.3
DAS Mamuju	82,415	55	67,066	45	149,481	8.8
DAS Mandar	56,772	61	36,656	39	93,428	5.5
DAS Mapilli	151,659	66	77,983	34	229,643	13.6
DAS Saddang	52,401	73	19,448	27	71,850	4.2
Grand Total	**1,303,021**	**78**	**388,701**	**22**	**1,691,724**	**100**

Sumber : Draft Rancangan RTRWP Sulawesi Barat Tahun 2010 – 2030

6. Klimatologi

Sifat dan karakter iklim suatu daerah secara umum dicerminkan oleh elemen-elemen iklim seperti curah hujan, suhu udara, kelembaban udara, tekanan udara, penyinaran matahari, kecepatan angin, arah angin dan sebagainya. Iklim sangat berpengaruh terhadap keadaan lingkungan, khususnya terhadap siklus hidrologi, sumberdaya tanah, air dan tanaman.

Umumnya, ketersediaan air bagi kepentingan makhluk hidup di atas permukaan tanah sangat ditentukan oleh keadaan iklim dan ekosistemnya. Berada di bawah pengaruh iklim tropis dengan curah hujan tinggi, seringkali terjadi pencucian hara dan translokasi partikel-partikel tanah, baik secara lateral yang membawanya ke daerah aliran, maupun vertikal pada tubuh tanah dari horison atas ke horison tanah di bawahnya.

Tabel 2.6.
Rata-rata Parameter Cuaca pada Stasiun Meteorologi di Majene Menurut Bulan Tahun 2010

No	Bulan	Suhu Udara (°C)	Tekanan Atmosfer (mb)	Kelembaban Udara (%)
1.	Januari	27,9	1.010,9	78,2
2.	Februari	27,9	1.011,4	80,9
3.	Maret	28,0	1.011,3	80,8
4.	April	28,3	1.010,7	79,6
5.	Mei	28,2	1.009,3	83,3
6.	Juni	27,4	1.010,9	83,8
7.	Juli	27,3	1.010,7	82,8
8.	Agustus	27,1	1.010,9	88,6
9.	September	27,1	1.010,5	83,9
10.	Oktober	27,4	1.009,7	82,4
11.	November	27,5	1.009,7	81,5
12.	Desember	27,1	1.008,1	79,4
Rata-rata 2010		**27,6**	**1.010,3**	**82,10**
2009		27,48	1.010,6	78,4
2008		27,1	-	80,0
2007		27,2	-	79,2
2006		27,2	-	77,4

Sumber: Sulawesi Barat Dalam Angka 2006-2010

Sebagai daerah yang memiliki pinggiran pantai, yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar, maka Sulawesi Barat memiliki pola suhu udara yang bergantung kepada musim angin laut. Pemantauan suhu udara di Sulawesi Barat, terpantau oleh Stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang berada di Kabupaten Majene.

Selama tahun 2006-2010, rata-rata temperatur di Sulawesi Barat terlihat cukup stabil berkisar 27,10 °C hingga 27,56 °C. Kondisi tertinggi terjadi di tahun 2010 (27,56 °C) bahkan rata-rata suhu udara pada awal-awal tahun 2010, mencapai 28,3 °C.

Tabel 2.7.
Keadaan Curah Hujan, Angin dan Penyinaran Matahari pada Stasiun Meteorologi di Majene Menurut Bulan Tahun 2010

No	Bulan	Penyinaran Matahari (%)	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	Kecepatan Angin (Km/jam)
1.	Januari	64,2	218,5	21	4
2.	Februari	83,1	282,3	16	6
3.	Maret	74,4	84,9	16	6
4.	April	75,8	115,1	13	8
5.	Mei	76,9	196,1	24	6
6.	Juni	70,5	260,2	25	4
7.	Juli	72,7	270,4	21	10
8.	Agustus	83,1	208,4	23	8
9.	September	75,9	303,1	25	6
10.	Oktober	80,9	215,9	22	6
11.	November	76,9	224,9	16	6
12.	Desember	53,8	169,7	28	6
Rata-rata 2010		**74,02**	**213,29**	**20,83**	**6,33**
2009		75,7	142,8	14	7,17
2008		-	-	-	9
2007		58,6	-	-	5
2006		62,6	-	-	9

Sumber: Sulawesi Barat Dalam Angka 2006-2010

7. Penggunaan Lahan

Luas kawasan hutan Provinsi Sulawesi Barat sampai saat ini masih berdasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 890/Kpts-II/1999 yang disahkan pada tanggal 14 Agustus 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sulawesi Selatan, seluas 1.185.688 hektar. Dalam perkembangannya, luas kawasan hutan telah mengalami banyak perubahan.

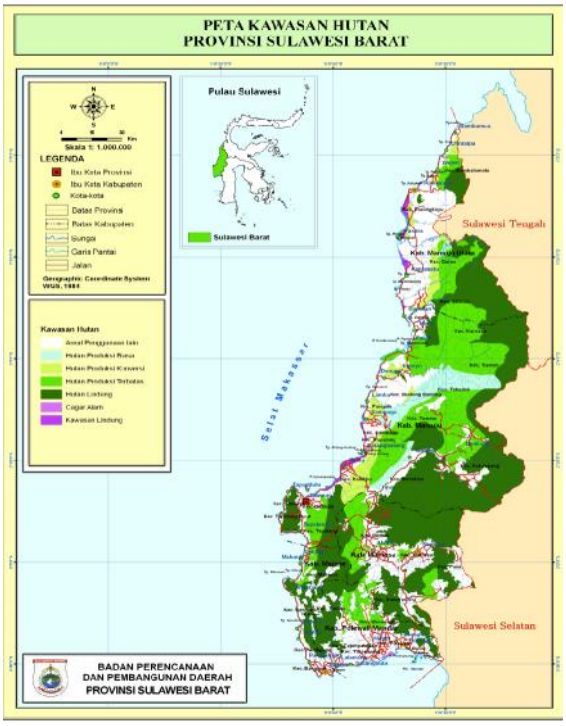

Gambar 7. Peta Kawasan Hutan Prov. Sulbar

Setelah dilakukan pemutakhiran data spasial dengan mengakomodir proses-proses pengukuhan kawasan hutan seperti tata batas, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan secara parsial luas kawasan hutan di provinsi Sulawesi Barat menjadi 1.176.401Ha, dengan perincian sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.8 berikut :

Tabel 2.8.
Luas Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Barat
(SK890/Kpts-II/1999 dan SK890/Kpts-II/1999 Updated)

Fungsi Kawasan Hutan	SK. 890/Kpts-II/1999		SK. 890/Kpts-II/1999 Updated	
	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
KSA/KPA	1.283	0,008	822	0,05
HL	677.894	40,16	673.567	39,86
HPT	361.775	21,43	384.283	22,74
HP	65.001	3,85	68.407	4,05
HPK	79.735	4,72	50.922	3,01
JUMLAH	**1.185.684**	**70,17**	**1.178.001**	**69,71**
APL	493.826	29,26	503.105	29,77
TUBUH AIR	8.461	0,50	8.521	0,50
TOTAL	**1.687.971**	**99,43**	**1.689.627**	**99,98**

Sumber : Rancangan RTRWP Sulawesi Barat Tahun 2010 – 2030 / hasil Musrenbang

Rincian luas kawasan hutan pada masing-masing Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada tabel 2.9 berikut:

Tabel 2.9.
Luas Kawasan Hutan pada Masing-Masing Kabupaten
Di Provinsi Sulawesi Barat

Kabupaten	Fungsi Kawasan Hutan Update					Total Luas (Ha)
	KSA/KPA	HL	HPT	HP	HPK	
Majene	-	45.082	8.006	-	-	53.088
Mamasa	-	163.584	51.780	-	431	215.796
Mamuju	-	302.784	244.905	66.189	24.338	637.275
Mamuju Utara	-	105.890	56.265	2.218	26.093	190.467
Polewali Mandar	822	56.227	23.326	-	-	80.376
Total Luas (Ha)	**822**	**673.146**	**384.282**	**68.407**	**50.862**	**1.177.002**

Sumber : Draft Rancangan RTRWP Sulawesi Barat Tahun 2010 – 2030

Perkembangan jumlah penduduk yang berakibat pada pemekaran wilayah secara administrasi dalam skala kabupaten dan kecamatan serta pertumbuhan investasi memerlukan tambahan ketersediaan lahan yang memberikan tekanan terhadap kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Barat. Kebutuhan lahan tersebut seringkali secara langsung dipenuhi dengan mengambil dan memperluas arealnya dengan mengambil sebagian dari kawasan hutan yang belum atau tidak melalui prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

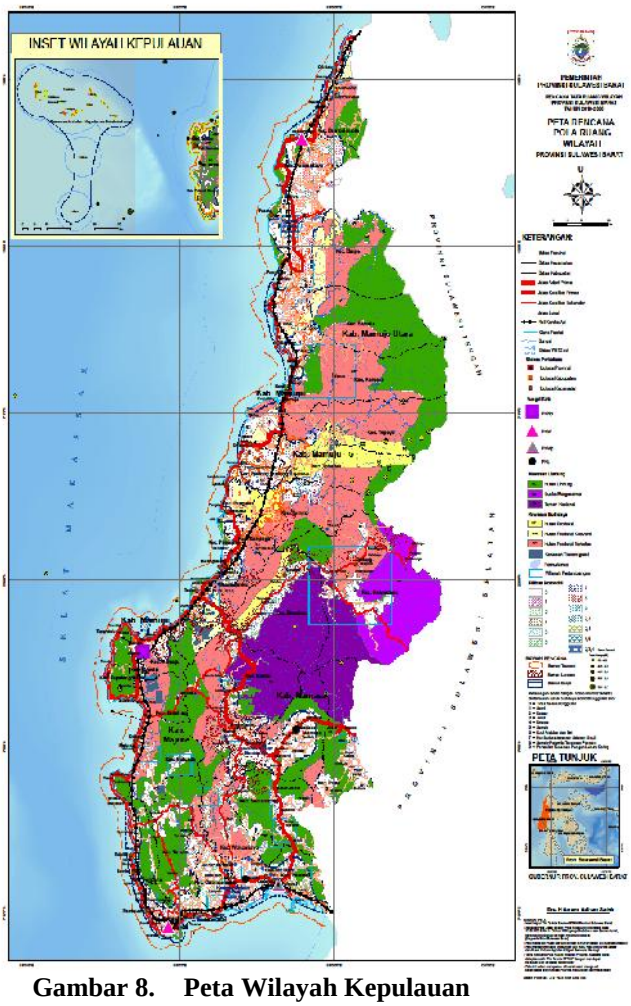

Gambar 8. Peta Wilayah Kepulauan

Kondisi tersebut merupakan penyebab dari terjadinya permasalahan konflik dalam penggunaan atau pemanfaatan kawasan hutan.

Disamping kondisi tersebut, permasalahan konflik kawasan hutan muncul akibat belumterselesaikannya keberadaan pemukiman dan lahan garapan dalam kawasan hutan.Sejalan dengan proses pembahasan RTRW Provinsi Sulawesi Barat yang didalamnya terdapat usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan diharapkan dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan konflik pemanfaatan/penggunaan kawasan hutan tersebut, dengan tetap memperhatikan kepastian hukum dan kepastian usaha serta tetap mengedepankan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Perencanaan Pola ruang wilayah Provinsi Sulawesi Barat menekankan pengembangannya pada penataan ruang baik darat, laut maupun udara dalam kawasan lindung maupun budidaya yang bersifat lintas kabupaten. Secara

umum rencana penataan pola ruang dan arah pemanfaatannya terbagi atas dua aspek penting yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya yang bernilai strategis, detail pentahapan rencana pemanfaatan pola ruang sesuai RTRW dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.10.
Hasil Telaahan Pola Ruang RTRW Provinsi Sulawesi Barat

LANDSCAPE

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

1. Perikanan

Perikanan di Provinsi Sulawesi Barat juga berpotensi besar untuk dikembangkan, mengingat Sulawesi Barat memiliki garis pantai pada sisi barat Pulau Sulawesi yang berhadapan dengan Selat Makassar. Kondisi tersebut sangat menguntungkan bagi perikanan laut (tangkap) dari berbagai jenis ikan pelagis dan ikan demersal serta ikan-ikan karang.

Selain potensi perikanan tangkap, Sulawesi Barat juga memiliki potensi perikanan budidaya seperti udang, bandeng, taripang dan berbagai jenis komoditas ikan karal. Potensi perikanan laut di Provinsi Sulawesi Barat dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menggali potensi yang ada, melalui budidaya laut, industri tepung ikan dan pengalengan ikan.

Berdasarkan jenis tempat pembudidayaan, perikanan di Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari laut, payau dan tawar.Potensi perikanan air payau juga cukup besar, dimana daya ketersediaan lahan seluas 13.584,6 Ha tersebar di Kabupaten Polewali Mandar, Majene dan Mamuju belum sepenuhnya tergarap. Saat ini, luas lahan yang telah berproduksi adalah 10.043,2 Ha dengan produksi terbesar untuk tahun 2009 adalah bandeng dan udang sebanyak 842 ton.

Pada tahun 2010, produksi perikanan darat di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 34.096,22 ton. Jumlah produksi tersebut meningkat tajam dari tahun 2009, yang baru mencapai 15.400,87 ton. Penyumbang produksi perikanan darat paling besar pada tahun 2010 adalah Kabupaten Mamuju sebanyak 17.252,95 ton.

Sementara produksi perikanan laut pada tahun 2010, mencapai 71.177 ton. Produksi ini sebagian besar berasal dari Kabupaten Polewali Mandar dan Mamuju, masing-masing sekitar 46,26 persen dan 27,52 persen.

Tabel 2.11.
Ragam Sebaran Data Perikanan Tangkap di Sulawesi Barat Tahun 2011

KATEGORI		JUMLAH
Perikanan Tangkap		
Produksi :		
Perikanan Laut Volume (Ton) Nilai (Rp. 000)		 72,454 560,124,390
Perairan Umum Volume (Ton) Nilai (Rp. 000)		 - -
Rumah tangga perikanan		

KATEGORI		JUMLAH
Perikanan Laut		14,186
Perairan Umum		
Kapal Unit		
Perikanan Laut		11,248
- Perahu tanpa Motor		2,691
- Perahu Motor tempel		3,376
Kapal Motor		2,636
	<5 GT	1,968
	5-10 GT	5,77
	10-20 GT	83
	20-30 GT	-
	30-50 GT	8
	50-100 GT	-
	100-200 GT	-
	200-300 GT	-
Perairan Umum		
- Perahu tanpa Motor		
- Perahu motor tempel		
- Kapal Motor		
Unit Penangkapan (unit)		20,810
- Perikanan Laut		
- Perairan Umum		

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011

Tabel 2.12.
Realisasi Produksi Perikanan Budidaya Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2006 - 2010

NO	JENIS KOMODITAS	REALISASI PRODUKSI (TON)				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Mujair	13	21	22	23	18.49
2	Bandeng	4,081	2,933	8,639	12,833	14,159
3	Belanak	8	16	9	9	3.5
4	Kakap	89	10	10	10	5
5	Mas	395	323	316	320	328.3
6	Nila	163	42	40	26	163.77
7	Lele	-	12	4	13	79.43
8	Kerapu	65	48	48	7	6.5
9	Udang Windu	9,572	1,473	1,514	1,756	1,543
10	Udang Putih	23	16	80.5	83	14.06
11	Udang Api-Api	4	10	143	269	159
12	Udang Vaname	22	9	62	59	63.48
13	Teripang	51	8	8	-	-
14	Rumput Laut	994	570	1,237.50	9,935	17,552
JUMLAH		**15,480**	**5,491**	**12,133**	**25,343**	**34,095.53**

Sumber: Bidang Ekonomi Bappeda Prov. Sulbar, Tahun 2012

Tabel 2.13.
Realisasi Produksi Perikanan Tangkap
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2006 - 2010

NO	JENIS KOMODITAS	REALISASI PRODUKSI (TON)				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Manyung	-	-	-	-	-
2	Cendro	29.2	29.2	4.9	4.8	7
3	Ikan Sebelah	-	-	-	-	-
4	Ekor kuning/ Pisang-pisang	21.2	21.2	26.5	104.5	112.3

NO	JENIS KOMODITAS	REALISASI PRODUKSI (TON)				
		2006	2007	2008	2009	2010
5	Lolosi Biru	-	-	-	-	-
6	Selar	569.3	569.3	720.6	627.1	664.5
7	Kuwe	130.4	130.4	232.3	177.9	208.2
8	Layang	4271.8	4271.8	3305.1	3082.7	3218.1
9	Sunglir	203.3	203.3	308.9	333	341
10	Tetengkek	276.5	276.5	225.2	220.6	227.8
11	Bawal Hitam	-	-	-	553	552
12	Bawal Putih	146.2	146.2	234.6	158.8	174
13	Daun Bambu/Talang-talang	-	-	1.9	38.9	43.7
14	Bentong	-	-	-	44	41.6
15	Kakap Putih	8.9	8.9	197.9	197.9	154.7
16	Golok-golok	9.8	9.8	2.3	2.5	4.3
17	Selanget	-	-	-	1591	-
18	Siro	-	-	-	-	-
19	Japuh	-	-	-	-	-
20	Tembang	630	630	1768.5	1414.7	1557.2
21	Lemuru	59.8	59.8	69.6	82.6	92.9
22	Terubuk	-	-	-	-	-
23	Lemadang	-	-	-	569	583.6
24	Beloso	-	-	-	439	425.7
25	Buntut Kerbo	-	-	-	-	-
26	Ikan Lidah	-	-	-	-	-
27	Teri	566	566	1263.9	1256.5	1441.6
28	Ikan Terbang	898.2	898.2	864.9	896.5	1035.7
29	Julung-julung	41.4	41.4	41.2	47.2	37.4
30	Gerot-gerot	101.8	101.8	604.8	557.4	542.6
31	Ikan Gaji	-	-	-	-	-
32	Ikan Nomei	-	-	-	-	-
33	Ikan Layaran	12	12	30.1	31.5	41
34	Setuhuk Hitam	-	-	-	-	-
35	Setuhuk Biru	-	-	-	-	-
36	Setuhuk Loreng	-	-	-	-	-
37	Ikan Pedang	2.7	2.7	1.7	1.9	4.6
38	Ikan Napoleon	-	-	-	-	-
39	Kapas-kapas	-	-	-	6375	6383.6
40	Peperek	291.1	291.1	592.8	582.6	567.3
41	Lencam	194	194	560.7	633.5	652.9
42	Kakap Merah	453.3	453.3	1228.7	1182.2	1272.1
43	Pinjalo	-	-	-	-	-
44	Belanak	89.5	89.5	1482.4	1439.6	1479.5
45	Biji Nangka Karang	-	-	-	226.1	323.8
46	Kuniran	-	-	-	-	-
47	Biji Nangka	328.3	328.3	1167	1051.1	1086.7
48	Kurisi	30.3	30.3	28.4	32.2	28.4
49	Kurau	-	-	-	-	-
50	Kuro/Senangin	-	-	-	-	-
51	Sewanggi	-	-	-	-	-
52	Serinding Tembakau	-	-	-	-	-
53	Gulamah	-	-	-	-	-
54	Lisong	-	-	-	-	-
55	Tongkol Kroi	4304.5	4304.5	2439.4	2486.5	2670.9
56	Tongkol Komo	3790.9	3790.9	8294.9	8431.8	8623.1
57	Cakalang	7276.3	7276.3	7287.8	5385.7	6015.4
58	Kembung	488	488	966.1	422.5	536.5
59	Banyar	16.4	16.4	31.5	32.5	40

NO	JENIS KOMODITAS	REALISASI PRODUKSI (TON)				
		2006	2007	2008	2009	2010
60	Kenyar	-	-	-	-	-
61	Slengseng	-	-	-	-	-
62	Tenggiri	256.1	256.1	950.5	565.4	616.9
63	Tenggiri Papan	-	-	5.3	-	-
64	Albakora	-	-	-	-	-
65	Madidihang	6495.2	6495.2	12615.4	11421.5	11351.9
66	Tuna Sirip Biru Selatan	283.5	283.5	11940.4	9171.4	
67	Tuna Mata Besar	11274.6	11274.6	701.7	329.2	9155.6
68	Tongkol Abu-abu	435.4	435.4	328.3	141.5	364.2
69	Kerapu Karang	180.1	180.1	2.1	2.1	129.7
70	Kerapu Bebek	1.3	1.3	-	0.1	1.5
71	Kerapu Balong	-	-	-	-	0.8
72	Kerapu Lumpur	-	-	-	-	-
73	Kerapu Sunu	69.7	69.7	73.3	74.8	87.6
74	Baronang Lingkis	99.8	99.8	109	109.8	114
75	Ikan Baronang	18.9	18.9	22.2	23.3	37.9
76	Baronang Kuning	2.5	2.5	3.8	4.4	4.6
77	Rejung	-	-	-	-	-
78	Alu-alu/Manggilala	-	-	-	-	-
79	Senok	-	-	-	-	-
80	Kerung-kerung	8.2	8.2	98.3	99.2	81.8
81	Layur	153.3	153.3	82.3	83.6	80.3
82	Cucut Tikus	-	-	-	185	193.7
83	Cucut Lanyam	219.8	219.8	224.9	229.7	250.7
84	Mako	-	-	-	-	-
85	Ikan Gergaji	-	-	-	-	-
86	Cucut Martil	-	-	-	1100	1153.7
87	Cucut Botol	-	-	-	-	-
88	Pari Kembang	-	-	-	-	-
89	Pari Kelelawar	-	-	-	-	-
90	Pari Burung	-	-	-	-	-
91	Pari Hidung Sekop	-	-	-	-	-
92	Pari Kekeh	3	3	4.7	4.7	1.4
93	Ikan Lainnya	21254.8	21254.8	6623.4	6027.1	5923.6
94	Udang Dogol	40	40	-	33.3	103.3
95	Udang putih	30.4	30.4	0.5	0.2	4.2
96	Udang Krosok	-	-	-	-	-
97	Udang Ratu	5.3	5.3	-	0.3	0.5
98	Udang Windu	0.8	0.8	-	-	-
99	Udang Barong	17.1	17.1	15.2	17.5	15.4
100	Kepiting	-	-	-	-	-
101	Rajungan	23	23	24.6	24.1	26.5
102	Penyu	-	-	-	-	-
103	Binantang Berkuliat keras lainnya	60.5	60.5	60.9	60.9	56.4
104	Kerang darah	24.1	24.1	24.1	64.6	63.2
105	Kerang Hijau	-	-	-	-	-
106	Cumi-cumi	80	80	179.1	90.3	112.5
107	Gurita	-	-	-	1.6	1.3
108	Tiram	-	-	-	-	-
109	Simping	-	-	-	-	-
110	Kerang Mutiara	25	25	25.8	25	23.5
111	Sotong	-	-	-	25.3	26.7
112	Lola	-	-	-	-	-
113	Remis	-	-	-	-	-

NO	JENIS KOMODITAS	REALISASI PRODUKSI (TON)				
		2006	2007	2008	2009	2010
114	Teripang	116.9	116.9	123.1	98.2	104.9
115	Bunga Karang	-	-	-	-	-
116	Ubur-ubur	-	-	-	-	-
117	Rumput Laut	-	-	-	-	-

Sumber: Bidang Ekonomi Bappeda Prov. Sulbar, Tahun 2012

Tabel 2.14.
Luas Lahan Perikanan Budidaya
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2006 – 2010

No	Kabupaten	Luas Lahan (Ha)				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Mamuju	5.635,03	5.527,03	1.457,00	6.101,00	6.115,00
2	Polman	5.250,00	5.415,00	5.264,42	5.365,00	5.482,00
3	Majene	450,24	450,24	452,91	452,50	485,00
4	Mamasa	1.291,00	1.291,00	3.189,00	3.599,00	3.599,02
5	Mamuju Utara	3.132,00	3.132,00	1.730,00	1.796,00	970,00

Sumber: Bidang Ekonomi Bappeda Prov. Sulbar, Tahun 2012

Tabel 2.15.
Luas Lahan (Existing) & Potensi Luas Lahan Rumput Laut
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2006 – 2010

No	Kabupaten	Luas Existing (Ha)				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Mamuju	500	500	500	500	500
2	Polman	142	142	142	142	142
3	Majene	0.24	0.24	0.4	-	15
4	Mamasa	-	-	-	-	-
5	Mamuju Utara	15	112	112	66	66

Sumber: Bidang Ekonomi Bappeda Prov. Sulbar, Tahun 2012

Tabel 2.16.
Jumlah KK Petani Budidaya
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2006 – 2010

No	Kabupaten	Luas Existing (Ha)				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Mamuju	826	826	913	2670	2570
2	Polman	1903	1903	1903	1912	1912
3	Majene	268	268	246	223	245
4	Mamasa	1703	1703	3297	3297	3304
5	Mamuju Utara	509	509	509	829	829

Sumber: Bidang Ekonomi Bappeda Prov. Sulbar, Tahun 2012

2. Pertanian

Provinsi Sulawesi Barat pada dasarnya merupakan daerah agraris yang sebagian besar kehidupan masyarakat bertumpu pada usaha dibidang pertanian. Potensi pertanian yang besar dan kesesuaian agroklimat yang mendukung serta kultur masyarakatnya yang agraris, merupakan modal dasar untuk mengembangkan

ekonomi kerakyatan yang berbasis pada pembangunan pertanian, melalui program peningkatan ketahanan pangan daerah, peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani.

Potensi pertanian yang telah dikelola sebesar 274.401 Ha yang terdiri dari lahan kering 219.727 Ha, lahan sawah tadah hujan 25.985 Ha, irigasi desa 14.393 Ha, Irigasi ½teknis 3.013 Ha dan irigasi teknis 11.283 Ha serta lahan potensial untuk percetakan sawah baru seluas 20.600 Ha.

Produksi komoditas potensial yang telah dicapai antara lain : padi 348.859 ton GKP, jagung 14.616 ton, ubi jalar 9.216 ton, kacang tanah 896 ton, kedele 970 ton, kacang hijau 1.487 ton, ubi kayu 68.624 ton, sayuran 2.499 ton dan buah-buahan antara lain : jeruk 109.483 ton, rambutan 17.378 ton, manggis 13,8 ton, durian 81.595 ton dan markisa 63,4 ton.

Selama periode 2006-2010, pertumbuhan sub-sektor tanaman bahan makanan (tabama) yang mencakup berbagai komoditas bahan makanan seperti padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, sayur-sayuran, dan buah-buahan serta tanaman bahan makanan lainnya mengalami pertumbuhan yang signifikan jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya.

Produksi padi setiap tahun sejak tahun 2006 sampai dengan 2010 selalu menunjukkan kecenderungan meningkat akan tetapi pada tahun 2009, produksi padi mengalami penurunan sedikit dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2006, produksi padi di Sulawesi Barat adalah sebesar 301.616 ton kemudian meningkat pada tahun 2007 menjadi 312.676 ton. Peningkatan terakhir terjadi pada tahun 2010, yaitu sebesar 362.900 ton. Peningkatan produksi terjadi pada tahun 2010 sebesar 52.194 ton atau meningkat sebesar 16,80 persen. Peningkatan produksi ini terjadi karena peningkatan luas panen. Peningkatan luas panen ini disebabkan oleh faktor iklim yang terjadi pada tahun 2010, banyaknya curah hujan menyebabkan sawah yang tadah hujan dapat ditanami dua kali dalam setahun. Perkembangan produksi padi dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

Grafik 2.1.
Perkembangan Produksi Padi di Provinsi Sulawesi Barat (Ton)

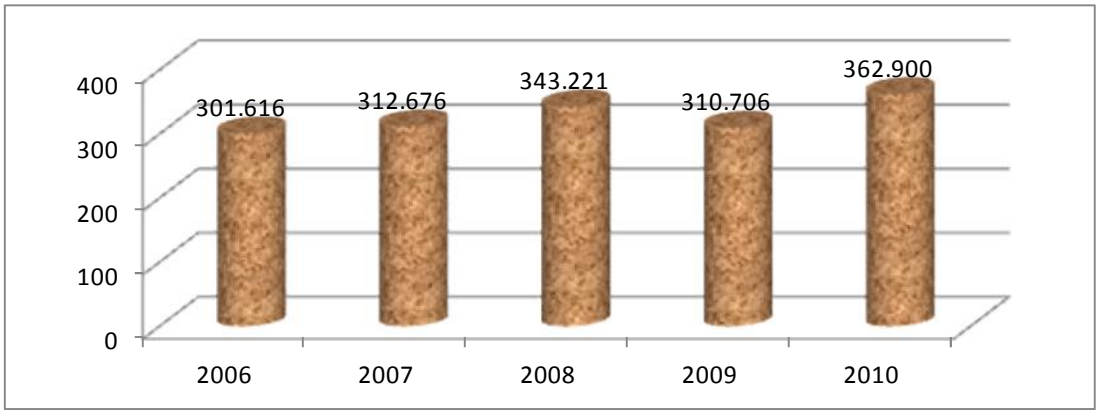

Sumber: Sulawesi Barat Dalam Angka 2006-2010

Selain padi, produksi jagung sejak tahun 2006-2010 mengalami tren yang meningkat. Pada tahun 2006, produksi jagung di Sulawesi Barat hanya mencapai 17.255 ton Pipilan Kering. Angka tersebut mengalami peningkatan dan menjadi 58.020 ton pada tahun 2010. Jika dibandingkan produksi tahun 2010 dengan 2009, maka produksi jagung mengalami penurunan sedikit sebesar 300 ton atau 0,51 persen. Penurunan produksi jagung tersebut disebabkan oleh adanya penurunan produktivitas walaupun luas panen mengalami peningkatan. Luas panen mengalami peningkatan sebesar 13,80 persen sedangkan produktivitas mengalami penurunan sebesar 12,57 persen.

Tabel 2.17.
Produksi dan Pengembangan Subsektor Tanaman Pangan
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2006 – 2010

Komoditas	Tahun (Ha)							
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1. Padi Sawah + Ladang								
Luas Panen (ha)	59,767	64,462	66,630	72,471	64,973	77,522	73,973	102,523
Produksi (ton)	253,886	301,616	312,676	343,221	310,706	362,900	356,040	479,935
Produktivitas (ku/ha)	42.48	46.79	46.93	47.36	47.82	46.81	48,13	61.9
2. Jagung								
Luas Panen (ha)	5,231	5,201	7,359	9,110	11,694	13,308	13,910	17,600
Produksi (ton)	17,343	18,109	26,633	40,252	58,321	58,020	63,846	76,731
Produktivitas (ku/ha)	33.15	34.82	36.19	44.18	49.87	43.6	45,90	57.661
3. Ubi Kayu								
Luas Panen (ha)	3,753	3,073	3,309	3,902	2,852	2,735	2,605	3,617
Produksi (ton)	56,717	40,413	45,921	54,809	47,782	46,368	42,643	61,322
Produktivitas (ku/ha)	151	132	139	140	168	170	164	224.825

Komoditas	Tahun (Ha)							
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
4. Ubi Jalar								
Luas Panen (ha)	849	573	846	1,442	1,430	1,395	1,508	1,845
Produksi (ton)	9,475	6,194	9,304	15,895	15,756	15,666	16,908	20,718
Produktivitas (ku/ha)	111.6	108.1	109.98	110.23	110.18	112.3	112,12	148.51675
5. Kacang Tanah								
Luas Panen (ha)	725	395	552	528	711	1,439	841	1,903
Produksi (ton)	1,035	541	777	774	1,001	2,022	1,185	2,674
Produktivitas (ku/ha)	14.28	13.7	14.08	14.09	14.07	14.05	14,09	18.581125
6. Kacang Hijau								
Luas Panen (ha)	538	705	817	981	803	614	483	812.015
Produksi (ton)	730	907	1,073	1,293	1,093	839	653	1109.5775
Produktivitas (ku/ha)	13.57	12.87	13.13	13.18	13.61	13.66	13.6	18.06535
7. Kedelai								
Luas Panen (ha)	447	783	793	1,498	2,076	2,083	1,761	2,755
Produksi (ton)	641	1,049	1,080	2,054	3,153	3,195	2,612	4,225
Produktivitas (ku/ha)	14.34	13.4	13.62	13.71	15.19	15.34	14.83	20.28715

Sumber: Bidang Ekonomi Bappeda Prov. Sulbar, Tahun 2012

Tabel 2.18.
Luas Lahan Sawah Irigasi dan Non Irigasi Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat (Ha) Tahun 2006 – 2010

Kode Wilayah	Kabupaten	Irigasi	Non Irigasi	Jumlah
01	Majene	295	647	942
02	Polewali Mandar	13.974	2.213	16.187
03	Mamasa	14.387	1.026	15.413
04	Mamuju	5.106	23.793	28.899
05	Mamuju Utara	1.407	2.118	3.525
Sulawesi Barat		**35.169**	**29.797**	**64.966**
2009		34.314	30.061	64.375
2008		31.183	22.037	53.220
2007		29.475	21.325	50.800
2006		31.292	23.031	54.323

Sumber: Bidang Ekonomi Bappeda Prov. Sulbar, Tahun 2012

Tabel 2.19.
Realisasi Cetak Sawah 2006 -2011
Provinsi Sulawesi Barat (Ha) Tahun 2006 – 2011

NO	KABUPATEN	REALISASI CETAK SAWAH (HA)						REALISASI 2006-2011
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
1	Mamuju	-	300.00	1,011.05	500.00	100.00	1,000.00	2,911.05
2	Mamuju Utara	50.00	192.00	500.00	500.00	150.00	693.00	2,085.00
3	Majene	-	-	-	-	-	-	-
4	Polewali Mandar	-	211.00	500.00	-	-	-	711.00
5	Mamasa	-	100.00	500.00	-	-	-	600.00
	SULBAR	**50**	**803**	**2,511.10**	**1,000.00**	**250**	**1,693.00**	**6,307.00**

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2012

2. Peternakan

Pengembangan dan peningkatan usaha peternakan di Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat dari potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan pasar.

Potensi sumber daya alam sangat mendukung kegiatan pengembangan usaha peternakan, misalnya kegiatan budidaya ternak, pengembangan ternak, pengelolaan pasca panen. Tersedianya lahan kering (218.363 Ha), lahan basah (56.038 Ha) dapat dijadikan lahan pengembangan peternakan dan sebagai sumber hijauan makanan ternak.

Prospek peternakan di Provinsi Sulawesi Barat cukup berpotensi. Hal ini didukung oleh masih banyaknya lahan terbuka hijau yang merupakan sumber pakan bagi ternak-ternak yang ada.Jenis ternak yang ada di Sulawesi Barat terdiri dari ternak besar (sapi, kerbau, dan kuda), ternak kecil (kambing, domba, babi) dan unggas (ayam dan itik). Potensi ternak yang mendominasi di Sulawesi Barat adalah sapi yang populasinyasebanyak 138.201 ekor pada tahun 2010. Kondisi ini populasinya meningkat tajam dari 90.773 ekor pada tahun 2006. Selain itu, kerbau juga populasinya cukup besar yaitu 14.393 ekor pada tahun 2006 meningkat menjadi15.615 ekor pada tahun 2010.

Sementara itu, ayam kampung yang banyak dipelihara oleh masyarakat mengalami lonjakan populasi yang cukup signifikan dari 4.609.073 ekor pada tahun 2006 menjadi 8.240.820 ekor pada tahun 2010. Juga terjadi pada itik, populasinya meningkat tajam dari 1.758.508 ekor pada tahun 2006 menjadi2.505.996 ekor pada tahun 2010.

Tabel 2.20.
Populasi dan Produksi Peternakan
Se Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 – 2010

Komoditas	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. Populasi						
Populasi Sapi Potong	82,479	90,409	100,295	109,138	124,632	134,897
Populasi Sapi Perah	-	-	4	5	8	8
Populasi Kerbau	15,603	16,107	14,885	14,920	13,028	15,568
Populasi Kambing	226,048	251,330	270,993	222,308	231,149	224,515
Populasi Kuda	8,645	8,809	8,975	8,666	8,852	7,569
Populasi Babi	101,812	117,983	125,376	152,080	164,106	179,929
Populasi Ayam Petelur	239,052	245,660	26,584	15,090	8,230	49,009
Populasi Ayam Pedaging	161,524	172,028	101,985	67,105	1,258,854	307,948
Populasi Ayam Buras	4,185,126	4,605,650	2,108,411	5,223,449	6,656,377	7,532,818
Populasi Itik	1,671,122	1,755,783	1,810,184	1,871,332	2,127,371	1,488,143
2. Produksi						
Produksi Daging Sapi Potong	849,088	911,720	2,129,172	1,580,689	1,361,421	11,459,740
Produksi Daging Kerbau	174,787	187,789	364,999	120,018	107,126	352,060
Produksi Daging Kambing	272,445	1,218,300	679,751	829,328	499,542	2,235,950
Produksi Daging Kuda	120,320	128,950	18,531	2,425	300	530
Produksi Daging Babi	287,982	608,978	274,618	282,554	643,707	1,269,657
Produksi Daging Ayam Ras Petelur	130,000	131,000	20,337	2,990	5,980	4,371
Produksi Daging Ayam Ras Pedaging	130,121	186,977	60,754	52,650	986,677	2,247,119
Produksi Daging Ayam Buras	1,004,562	563,051	2,813,562	3,659,634	2,238,451	12,989,171
Produksi Daging Itik	700,967	897,259	713,014	759,495	809,357	3,662,633
Produksi Telur Ayam Ras Petelur	239,052	245,660	26,584	15,090	8,230	44,473
Produksi Telur Ayam Buras	4,185,126	4,605,650	2,108,411	5,223,449	6,656,377	3,054,997

Komoditas	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Produksi Telur Itik	1,671,122	1,755,783	1,810,184	1,871,332	2,127,371	8,053,779

Sumber: Bidang Ekonomi Bappeda Prov. Sulbar, Tahun 2012

3. Perkebunan dan Hortikultura

a. Perkebunan

Perkembangan bidang perkebunan mempunyai peranan yang cukup penting dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat, sebagai indikatornya adalah terciptanya lapangan kerja, sumber pendapatan utama bagi petani, terutama kakao, kelapa sawit, cengkeh dan kopi penghasil devisa dan pemasok bahan baku agro industri, baik dalam maupun luar negeri.

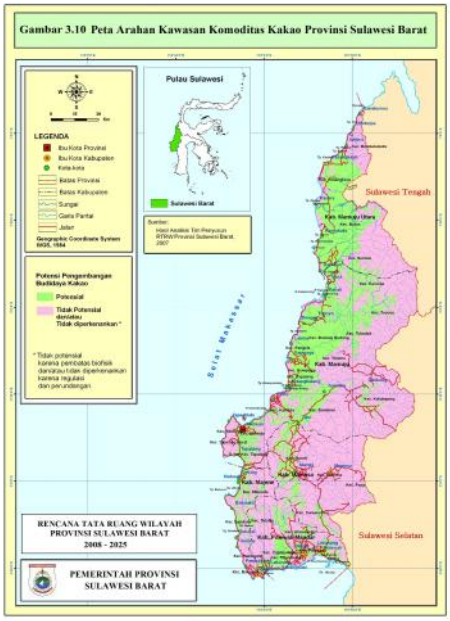

Gambar 9. Peta Komoditas Kakao

Realisasi pembangunan bidang perkebunan telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, keberhasilan yang dicapai tersebut merupakan hasil penerapan/implementasi pola pembangunan yaitu pola UPP dan pola swadaya parsial dengan kegiatan pokok pada intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi.

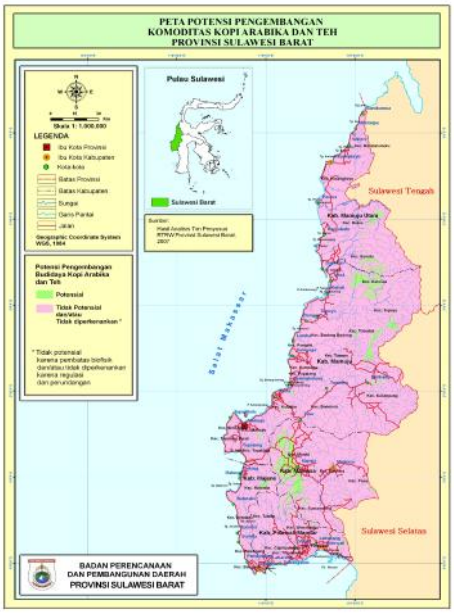

Gambar 10. Peta Potensi Komoditas Kopi dan Teh

Data tahun 2010 menunjukkan bahwa luas areal kakao 132.000 Ha dengan produksi mencapai 96.461 ton. Kelapa sawit dengan luas areal 84.248 Ha dengan produksi 1.182.908 ton TBS, Kelapa dalam dan kelapa hibrida dengan luas areal 68.804 Ha dengan produksi 71.688 ton.

Kopra, Kopi Rebustra dan Kopi Arabika luas areal tahun 2007 31.215 Ha dengan produksi 10.753 ton.

Produksi perkebunan merupakan salah komoditi unggulan yang ada diSulawesi Barat, hal ini terlihat dari besarnya *share*subsektor ini dalam menyumbang pembentukan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Provinsi Sulawesi Barat. Tanaman perkebunan yang banyak dijumpai di Sulawesi Barat adalah kelapa dalam, kelapa hibrida, kakao, kelapa sawit dan beberapa tanaman perkebunan lainnya.

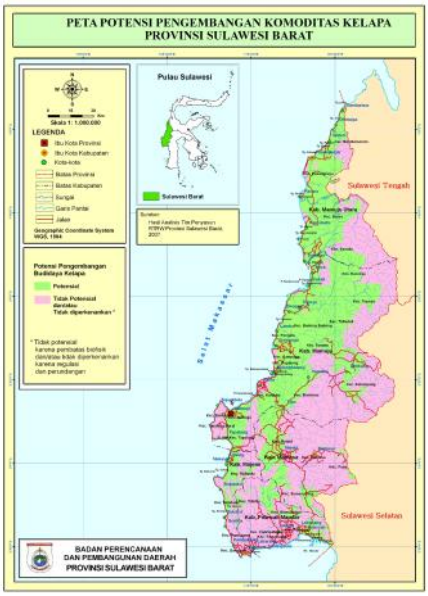

Gambar 11. Peta Potensi Pengembangan Komoditas Kelapa

Grafik 2.2.
Perkembangan Produksi Komoditi Perkebunan Terpilih di Provinsi Sulawesi Barat (Ton) Tahun 2006 dan 2010

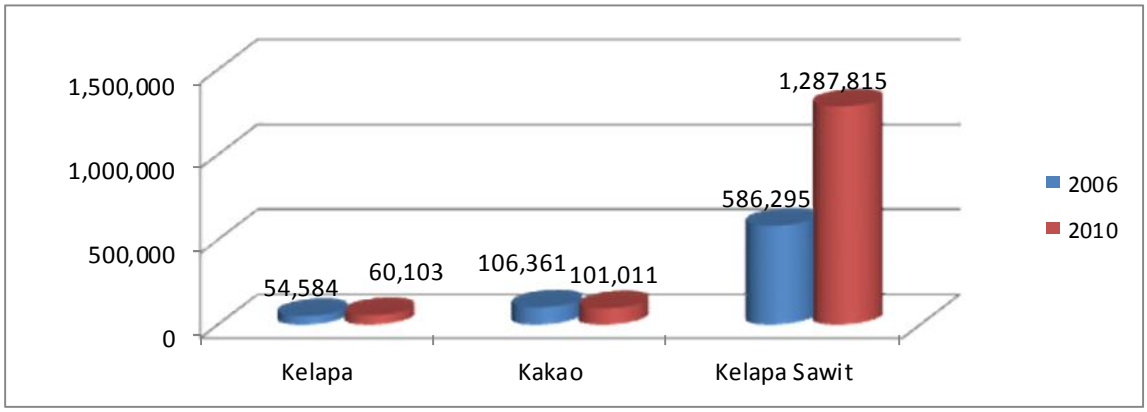

Sumber: Sulawesi Barat Dalam Angka 2006-2010

b. Hortikultura

Tabel 2.21.
Komoditas Hortikultura

Komoditi	2006	2007	2008	2009
Mangga				
Produksi	6,605	9,607	7,227	11,533
Luas Lahan	1,110	1,216	745	1,215
Produktivitas	5.95	7.9	9.7	9.49
Jeruk				
Produksi	150,869	155,758	301,483	157,484
Luas Lahan	2,855	2,455	5,144	3,092
Produktivitas	52.84	63.45	58.61	50.93
Pisang				
Produksi	30,180	13,602	21,364	42,873
Luas Lahan	1,073	840	649	701
Produktivitas	28.13	16.19	32.92	61.16
Durian				
Produksi	4,802	3,013	3,947	9,050
Luas Lahan	371	374	395	650
Produktivitas	12.94	8.06	9.99	13.92
Manggis				
Produksi	95	64	143	1,061
Luas Lahan	30	17	6	44
Produktivitas	3.17	3.76	23.83	24.11
Anggrek				
Produksi	685	4,431	12,114	20,673
Luas Lahan	592	472	1,161	3,465
Produktivitas	1.16	3.09	2.72	5.52
Krisan				
Produksi	431	-	-	80
Luas Lahan	410	-	-	60
Produktivitas	1.05	-	-	1.33
Mawar				
Produksi	1,968	868	2,107	2,156
Luas Lahan	1,968	76	807	422
Produktivitas	1	4.15	2.01	2.53
Sedap Malam				
Produksi	329	428	602	557
Luas Lahan	200	21	497	25
Produktivitas	1.65	11.26	1.21	1.71
Jahe				
Produksi	17,645	213,783	183,567	86,268
Luas Lahan	11.598	46.062	89.909	34.187
Produktivitas	1.51	2.98	1.9	2.3
Kencur				
Produksi	17,047	183,600	164,786	20,525
Luas Lahan	5,891	20,303	74,781	8,321
Produktivitas	2.89	2.57	2.18	2.12
Lengkuas				
Produksi	1,961	272,054	192,65	77,582
Luas Lahan	6,377	35,582	90,171	27,541
Produktivitas	3.13	3.74	1.99	2.37
Kunyit				
Produksi	23,603	409,004	173,366	80,193
Luas Lahan	8,303	77,989	62,207	24,362
Produktivitas	2.84	2.58	2.52	1.16
Lempuyang				
Produksi	4,296	8,207	12,479	2,733
Luas Lahan	1,403	2,655	7,736	995
Produktivitas	3.06	2.82	1.61	1.97

Sumber: Bidang Ekonomi Bappeda Prov. Sulbar, Tahun 2012

4. Kehutanan

Wilayah Sulawesi Barat sebagian besar masih berupa kawasan hutan. Kondisi ini memberi gambaran bahwa, Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi hutan yang cukup melimpah. Pada tahun 2006, luas kawasan hutan di Sulawesi Barat sekitar13.195,45 hektar atau menutupi 77,91 persen permukaan daratan Sulawesi Barat.

Potensi hutan di Sulawesi Barat seluas kurang lebih 1.131.908 Ha yang terdiri atas kawasan hutan lindung seluas 669.358 Ha, hutan produksi terbatas (HPT) 321.607 Ha, hutan produksi 61.600 Ha, hutan suaka marga satwa (HSAW) 900 Ha dan hutan produksi yang dapat dikonversi 78.443 Ha dengan potensi hasil hutan umumnya meliputi :

Kayu Eboni, Meranti, Getah Pinus, Jati, Palapi, Durian, Damar, Rotan, Kemiri, dan Kayu Campuran lainnya. Hasil produksi dari sektor kehutanan selama ini telah memberikan kontribusi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya.

Seiring meningkatnya kebutuhan lahan, diantaranya untuk keperluan pemukiman, industri, lahan pertanian dan lain sebagainya mengakibatkan adanya pergeseran alih fungsi hutan tersebut. Pada tahun 2010, luas hutan di Sulawesi Barat mengalami pengurangan menjadi 11.197,96 hektar atau berkurang sekitar 15,14 persen.

5. Pariwisata

Di bidang pariwisata, Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi pariwisata yang relatif lengkap, mulai dari wisata bahari dengan keunikan kehidupan Suku Mandar sebagai pelaut ulung dengan perahu Sandeq (baca: sande') yang sudah dikenal tidak hanya skala nasional akan tetapi perahu Sandeq juga telah beberapa kali dipamerkan di mancanegara bahkan sampai ke negara-negara Eropa.

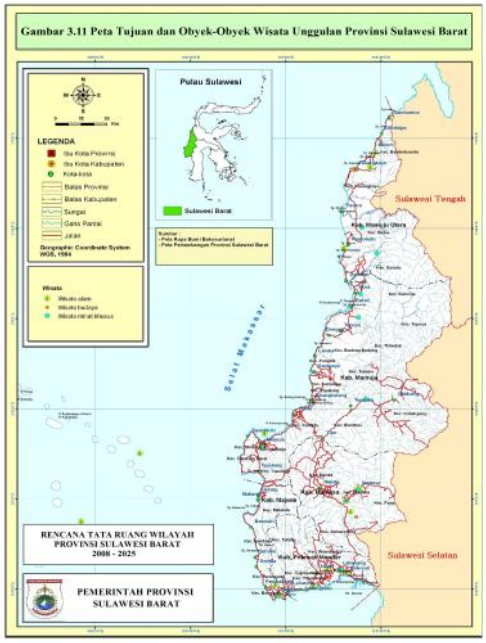

Gambar 12. Peta Tujuan Obyek-obyek Wisata

Potensi wisata di Provinsi Sulawesi Barat dapat dibagi ke dalam beberapa kategori antara lain; Wisata Alam, Wisata Arkeologi, Wisata Kebudayaan, Wisata Kesenian, dan beberapa wisata yang lain. Lokasi wisata tersebut tersebar ke semua kabupaten di Sulawesi Barat.

Di wilayah pegunungan tak kalah menariknya, seperti adat dan budaya suku pribumi Kabupaten Mamasa, telah menjadikan wilayah pegunungan ini sebagai daerah tujuan wisata bagi wisatawan domestik dan mancanegara.

Potensi budaya Provinsi Sulawesi Barat ini disemurnakan dengan panorama yang sangat mempesona mulai dari pesisir pantai Polewali Mandar hingga Mamuju Utara, sampai pemandangan alam persawahan dan hutan primer di pegunungan, dan kehadiran ratusan air terjun yang melengkapi keindahan *landscape* alam pegunungan.

Keberadaan objek-objek wisata di Provinsi Sulawesi Barat didukung oleh ketersediaan hotel atau penginapan dan rumah makan untuk menarik perhatian para wisatawan yang berkunjung ke Sulawesi Barat. Sementara sarana pendukung pariwisata adalah ketersediaan hotel atau penginapan yang cukup menggeliat di Sulawesi Barat. Pada tahun 2007, jumlah hotel/penginapan di Sulawesi Barat sekitar 64 unit, naik menjadi 95 unit pada tahun 2010.

Selain meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana pendukung pariwisata, pemerintah daerah juga gencar melakukan promosi pariwisata melalui kegiatan-kegiatan pertunjukan. Salah satu kegiatan rutin Pemerintah Provinsi Sulawesi Baratyang diharapkan dapat menarik wisatawan adalah diselenggarakannya *event Sandeq Race* dari Mamuju ke Makassar, ibukota Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 2.22.
Indikator Perhotelan Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2007 – 2011

Tahun	Jumlah Hotel	Jumlah Tamu	TPKH Bintang + Akomodasi	Rata-rata Lama Menginap Bintang + Akomodasi Lain	GPR Bintang + Akomodasi Lain
2011	103	68.057	24,97	1,05	1,77
2010	95	53.073	22,04	1,56	1,90
2009	86	53.337	33,66	2,01	1,78
2008	77	45.311	32,12	1,55	1,71
2007	64	42.988	42,72	1,90	1,65

Sumber : BPS Prov. Sulbar September 2012

6. Industri

Perusahaan/usaha industri pengolahan yang digolongkan sebagai Industri Besar dan Sedang (IBS), jumlahnya masih sangat terbatas di Sulawesi Barat. Secara konseptual, yang tergolong dalam Industri Besar Sedang (IBS) adalah seluruh perusahaan/usaha industri pengolahan yang mempekerjakan tenaga kerja 20 orang atau lebih.

Berdasarkan konsep tersebut, pada tahun 2009 jumlah IBS di Sulawesi Barat ada sebanyak 15perusahaan dan pada tahun2010, jumlahnya berkurang menjadi hanya 14 Perusahaan. Hal ini disebabkan karena adanya perusahaan yang berpindah kategori menjadi Industri Kecil.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja pada tahun 2009, perusahaan Industri Besar Sedang di Provinsi Sulawesi Barat, mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 3.796 orang, sedangkan pada tahun 2010 tingkat penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan menjadi sebanyak 1.814 orang.

Tenaga kerja yang terserap pada perusahaan IBS sebagian besar merupakan tenaga kerja produksi. Pada tahun 2009 tenaga kerja produksi yang dipekerjakan ada sebanyak 3.573 orang atau 94,12 persen dari total tenaga kerja keseluruhan. Sedangkan pada tahun 2010 tenaga kerja produksi yang dipekerjakan ada sebanyak 1.598 orang atau 88,09 persen dari total tenaga kerja yang ada. Disamping itu terdapat tenaga kerja lainnya yang bekerja sebagai tenaga kerja non-produksi yaitu sebanyak 223 orang pada tahun 2009, dan sebanyak 216 orang pada tahun 2010.

Grafik 2.3.
Perkembangan Industri Pengolahan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009–2010

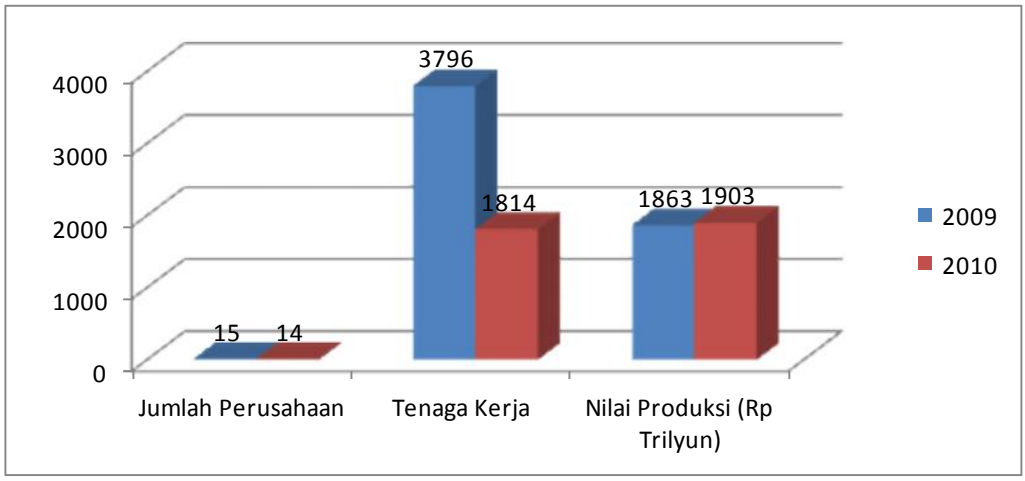

Sumber: Sulawesi Barat Dalam Angka 2006-2010

Dari sisi nilai produksi atau nilai yang dihasilkan oleh Perusahaan Industri Besar Sedang, pada tahun 2010 mengalami kenaikan bila dibandingkantahun2009. Pada tahun 2010, nilai produksi IBS sebesar Rp.1.903,4 milyard sementara pada tahun 2009 nilai produksi IBS sebesar Rp.1.863,3 milyard atau naik sebesar2,13 persen. Hal ini disebabkan oleh peningkatan yang signifikan pada kelompok industri pengolahan produk pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar45,7 milyar. Kenaikan ini didominasi oleh industri pengolahan dengan komoditi kelapa sawit dengan kontribusi sebesar 2,48 persen.

4. Pertambangan

Potensi sumberdaya alam dari pertambangan di wilayah Provinsi Sulawesi Baratcukup banyak. Dilepas pantai terdapat 8 (delapan) blok Minyak dan Gas Bumi, yang kesemuanya dalam tahap eksplorasi, dan 1 (satu) blok di daratan (*offshore*). Untuk jenis bahan galian logam terdapat emas, biji besi, mangan, nikel dan beberapa bahan galian logam lainnya. Bahan galian non logam akan dapat ditemukan granit, batu gamping, kaolin, dan pasir kuarsa.

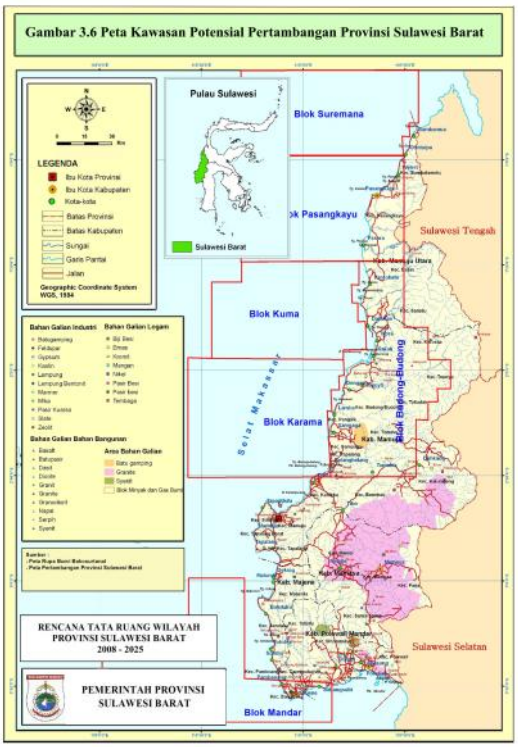

Gambar 13. Peta Kawasan Potensial Pertambangan

Di Kabupaten Polewali Mandar terdapat beberapa titik eksplorasi dan eksploitasi pertambangan antara lain di daerah Kecamatan Anreapi terdapat Galene dan Bijih Besi dengan jumlah potensi kandungan 20.756.000 metrik ton. Kemudian di daerah Tapango terdapat Galene dan Bijih Besi dengan jumlah potensi kandungan 25.465.000 metrik ton, di daerah Campalagian terdapat kandungan Emas, Tembaga dan Perak dengan jumlah potensi kandungan 20.563.000 metrik ton, dimana ketiga jenis pertambangan ini telah memasuki tahap eksplorasi dan sebagian kecil telah akan dieksploitasi.

Untuk daerah kabupaten Mamasa, di daerah kecamatan Tabulahan terdapat kandungan mineral berupa Emas, Tembaga, Perak, Galena dengan potensi kandungan 30.756.000 metrik ton.Selanjutnya, di kecamatan Messawa terdapat kandungan mineral Tembaga, perak, Galena dengan potensi kandungan 35.583.000 metrik ton, dan di kecamatan Sumarorong terdapat Bijih Basi dan Mangan dengan potensi kandungan 25.825.000 metrik ton. Seluruh potensi kandungan ini telah di eksplorasi.

Jika dilihat dari jumlah sebaran titik daerah yang memiliki kandungan mineral maka wilayah kabupaten Mamuju juga memiliki potensi kandungan meneral yang besar. Di Kecamatan Karossa terdapat kandungan mineral berupa Emas, Tembaga, Perak, Galena, Bijih Besi, dan Mangan dengan potensi kandungan 35.678.000 metrik ton, didaerah kecamatan Tobadak terdapat kandungan Tembaga, Perak, Bijih Besi, dan Mangan dengan potensi kandungan mineral 30.567.000 metrik ton.

Wilayah Kecamatan Bonehau juga memiliki kandungan mineral berupa Perak, Bijih Besi dan Mangan dengan potensi kandungan 50.523.000 metrik ton. Kemudian di kecamatan Kalumpang terdapat potensi kandungan mineral berupa Emas, Tembaga, Perak dan Seng dengan potensi kandungan mineral 54.764.000 metrik ton. Potensi kandungan mineral berupa Batu Bara juga terdapat di wilayah kecamatan Kalumpang dan Bonehau dengan potensi kandungan masing-masing sebanyak 20.733.366 dan 5.593.642 metrik ton, dimana seluruh titik-titik tersebut tengah dalam proses eksploitasi dan sebagian masih diekplorasi.

Tabel 2.23.
Sebaran Lokasi Pertambangan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat

Sebaran Lokasi di Kabupaten	Kandungan Mineral	Potensi Kandungan (Metrik Ton)	Tahap Kegiatan
Polewali Mandar			
1. Anreapi	Galene, Bijih Besi	20.756.000	Eksploitasi/Eksplorasi
2. Tapango	Galene, Bijih Besi	25.465.000	Eksploitasi/Eksplorasi
3. Anreapi	Bijih Besi	20.756.000	Eksplorasi
4. Campalagian	Emas, Tembaga, Perak	20.563.000	Eksplorasi
Mamasa			
1. Tabulahan	Emas, Tembaga, Perak, Galene Tembaga, Perak, Galene	30.676.000	Eksplorasi
2. Messawa	Bijih Besi, Mangan	35.583.000	Eksplorasi
3. Sumarorong		25.825.000	Eksplorasi
Mamuju			
1. Tabulahan	Emas, Tembaga, Perak Galene, Bijih Besi, Mangan	35.678.000	Eksploitasi/Eksplorasi
2. Tobadak	Tembaga, Perak, Seng,	30.567.230	Eksplorasi
3. Bonehau	Emas, Tembaga, Perak, Bijih Besi, Mangan	50.523.000	Eksploitasi/Eksplorasi
4. Kalumpang	Perak, Seng	54.764.000	Eksplorasi

Sebaran Lokasi di Kabupaten	Kandungan Mineral	Potensi Kandungan (Metrik Ton)	Tahap Kegiatan
5. Kalumpang	Batubara	20.733.366	Eksplorasi
6. Bonehau	Batubara	5.593.642	Eksploitasi/Eksplorasi
Mamuju Utara			
1. Dapurang	Emas, Tembaga, Galene	35.876.476	Eksplorasi
2. Doripoku	Bijih Besi, Galene, Mangan,	30.948.543	Eksplorasi
3. Tikke	Emas Letakan	25.837.546	Eksplorasi

Sumber: Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat

Untuk wilayahKabupaten Mamuju Utara, terdapat 3 (tiga) titik daerah yang memiliki potensi kandungan mineral, antara lain Kecamatan Dapurang memiliki kandungan mineral berupa Emas, Tembaga dan Galene dengan potensi kandungan 35.876.476 metrik ton, di kecamatan Duripoku terdapat kandungan mineral berupa Bijih Besi, Galene dan Mangan dengan potensi kandungan 30.948.543 metrik ton dan di daerah Tikke terdapat kandungan mineral berupa Emas Letakan dengan potensi kandungan 25.837.546 metrik ton. Untuk semua titik potensi pertambangan di wilayah Kabupaten Mamuju Utara ini masih dalam tahap eksplorasi.

Tabel 2.24.
Blok Minyak dan Gas Bumi di Provinsi Sulawesi Barat

No	Nama Blok	Investor	Luas (Km^2)	Lokasi	Tahap Kegiatan
1.	Suremana	Exxon Mobile	5.339,63	Mamuju Utara	Eksplorasi
2.	Mandar	Exxon Mobile	4.196,25	Majene, Polman	Eksplorasi
3.	Pasangkayu	Marathon	4.707,63	Mamuju Utara	Eksplorasi
4.	Kuma	Conoco Philips	5.086,10	Mamuju Utara, Mamuju	Eksplorasi
5.	Budong-Budong	Tately N.V.	5.494,51	Mamuju Utara, Mamuju	Eksplorasi
6.	Karama	Statoil Pertamina	4.287,37	Mamuju Utara	Eksplorasi
7.	Karana	Pearl Oil	5.389,68	Majene	Eksplorasi
8.	Malunda	PTT E & P	5.000,00	Majene	Eksplorasi
9.	Mandar Selatan	PTT E & P	3.800,00	Polman	Eksplorasi

Sumber: Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat, 2012

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Indonesia merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana, baik bencana alam, maupun karena ulah manusia. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya bencana ini baik kondisi geografis, iklim, geologis, maupun faktor-faktor lain seperti keragaman sosial, budaya dan politik.

Tabel 2.25.
Wilayah Rawan Bencana

Kejadian	Jumlah Kejadian	Meninggal	Luka-luka	Hilang	Menderita	Mengungsi	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Sedang	Rumah Rusak Ringan	Lokasi Potensi Bencana
Banjir	30	21	134	7	1,67	6,95	90	23	168	Polman, Majene, Mamuju
Gelombang Ekstrim dan Abrasi	3	0	6	0	0	447	60	5	37	Polman, Majene, Mamuju dan Mamuju Utara
Gempa Bumi	4	67	327	0	0	0	1,451	63	128	Mamuju, Mamuju Utara, Majene, Mamasa dan Polman
Kebakaran hutan dan lahan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Mamuju, Mamuju Utara, Polman dan Mamasa
Kekeringan	11	0	0	0	0	0	0	0	0	Majene dan Polman
Epidemi dan wabah penyakit	1	1	580	0	0	0	0	0	0	Mamuju, Polman, Mamasa dan Mamuju Utara
Cuaca Ekstrim	12	0	0	0	0	0	156	0	664	Mamuju, Mamuju Utara, Majene
Tanah Longsor	7	14	22	2	0	0	19	0	176	Mamuju, Mamasa

Provinsi Sulawesi Barat merupakan wilayah dengan kondisi alam yang kompleks sehingga menjadikan Sulawesi Barat sebagai salah satu daerah yang berpotensi tinggi terhadap ancaman bencana, khususnya bencana alam. Bencana yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat dalam kurun tahun 2006-2010 relatif sedikit dan bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia.

Berdasarkan catatan Kejadian Bencana Alam danPotensi Bencana Alam Provinsi Sulawesi Barat, antara lain sebagai berikut:

❖ Banjir

Dari tabel diatas dapat dilihat total kejadian banjir di Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 30 kali, mengakibat-kan 21 orang meninggal dunia dan mengungsi sebanyak 6950 orang. Tercatat juga selama kejadian bencana mengakibat-kan 90 Rumah rusak berat, 23 rumah rusak sedang dan 168 rumah rusak ringan.

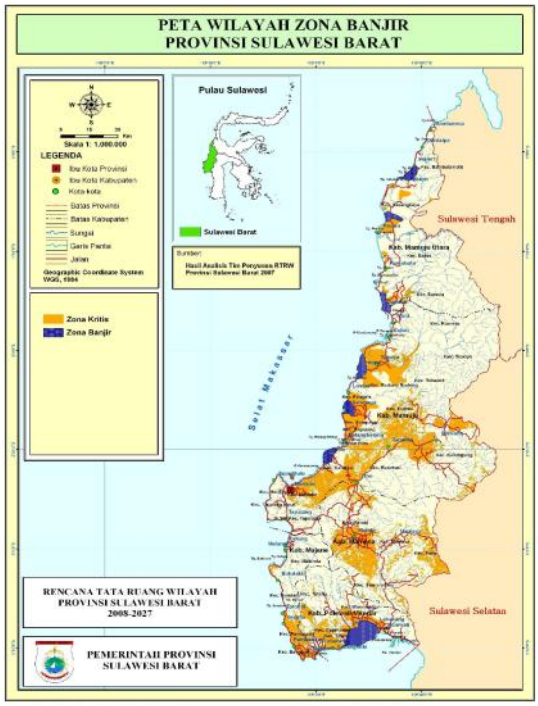

Gambar 14. Peta Wilayah Zona Banjir

Rawan banjir di kabupaten Mamuju Utara (Sarjo, Bambalamotu, Pasangkayu, Lariang, Tikke dan sarudu), Mamuju (Kaluku, sampaga, Papalang, Topoyo, Budong-budong, Mamuju dan Karossa), Majene (Banggae, Banggae Timur, Pamboang, Sendana dan Malunda), dan Polewali Mandar (Allu, Limboro, Tinambung, Balanipa, Campalagiang, Mapilli, Wonomulyo, Matakali, Binuang dan Polewali).

❖ Longsor

Tanah longsor di Sulawesi Barata pernah terjadi di Majene, Mamuju,dan Mamasa. Di Sulawesi Barat, 7 kali kejadian longsor yang terdata masing-masing satu kali terjadi di Kabupaten Majene pada tanggal 14 Desember 2003, menelan korban jiwa empat orang, luka-luka satu orang, hilang dua orang, kerusakan jalan 20 orang. Di kabupaten Mamuju sebanyak 5 kali kejadian pada tanggal 22 Mei 2010 dengan jumlah korban jiwa sembilan orang meninggal dunia, empat orang luka-luka dan lima unit rumah hancur. Kemudian di kabupaten Mamasa terjadi bencana pada tahun 2010 dengan korban jiwa satu orang meninggal dunia dan luka-luka 17 orang.

Rawan Longsor di kabupaten Mamuju (Kalumpang, Bonehau, Kalukku, Simkep, Tapalang Barat), Majene (Ulumanda, Tubo, Tammerodo, Pamboang, Banggae), Mamasa (seluruh Kecamatan) dan Polewali Mandar (Tutar, Matangnga, Limboro, Allu, Luyo, Anreapi dan Bulo)

- Abrasi, erosi dan sedimentasi

  Abrasi di Sulawesi Barat terjadi pada tahun 2008 tepat Kabupaten Majene. Data terakhir, di tahun 2011 abrasi terjadi kembali di Kabupaten mamuju tepatnya di Kecamatan Tappalang. Bibir pantai yang terancam abrasi kurang lebih 280 kilometer dari sekitar 677 panjang pantai diwilayah Sulawesi Barat. Empat kabupaten di Sulawesi Barat terancam abrasi yakni Majene-Mamuju, Mamuju Utara dan Polewali Mandar. Keempat daerah itu mengalami abrasi sama seperti yang terjadi di pesisir pantai di Desa Tapalang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju yang sebelumnya mengalami bencana abrasi pantai yang cukup parah.

  Rawan Abrasi di Kab. Mamuju Utara (Bambaira, Bambaloka, Pasangkayu, Saruddu, Lariang, Tikke), Mamuju (Karossa, Topoyo, simkep, Budong-budong, Sampaga, Papalang, Papalang, Kalukku, Mamuju, Balabalakang, Tapalang, Tapalang Barat)

- Kebakaran

  Pada tahun 2005 terjadi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Polewali Mandar dari informasi yang tercatat tidak ada korban akibat kejadian tersebut.

- Angin Puting Beliung

  Wilayah Provinsi Sulawesi Barat memiliki kawasan ancaman cuaca ekstrim berdasarkan Pedoman Nasional Pengkajian Risiko Bencana, ancaman bencana cuaca ekstrim dapat dibagi menjadi tiga kelas Indeks Ancaman. Komponen yang dilihat adalah lahan terbuka, kemiringan lereng dan curah hujan tahunan sehingga menghasilkan skor bahaya. Kelas Indeks Rendah Ancaman Bencana Cuaca ekstrim dihitung dari skor bahaya kurang dari 0,34.

- Paceklik (Kemarau Panjang)

  Berdasarkan Pengkajian Kerentanan, bencana kekeringan di Provinsi Sulawesi Barat akan berdampak pada 883.281 jiwa yang tertinggal dan beraktivitas di kawasan terancam. Untuk Indeks Kerugian dari ancaman bencana kekeringan di Provinsi Sulawesi Barat dari hasil pengkajian risiko bencana terlihat bahwa kerugian fisik dan ekonomi akibat bencana kekeringan adalah 11,626 triliun rupiah. Luas ancaman kerusakan lingkungan akibat bencana kekeringan dari pengkajian risiko bencana terhitung sebesar 1.626.103 Ha.

❖ Tsunami

Wilayah Provinsi Sulawesi Barat dengan tinggi genangan kurang dari 1 meter. Kelas Indeks Ancaman Sedang Bencana Tsunami dengan tinggi genangan antara 1-3 meter. Sedangkan kelas Indeks Tinggi Ancaman Bencana Tsunami dengan ketinggian genangan lebih dari 3 meter. Perhitungan untuk mendapatkan kelas Indeks Ancaman dari luas kawasan terpapar dilaksanakan dalam pengkajian risiko bencana dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana Daerah.

Berdasarkan analisi kajian risiko bencana, Provinsi Sulawesi Barat memiliki indeks ancaman bencana tsunami Tinggi dan memiliki indeks penduduk terpapar Rendah. Dengan demikian Sulawesi Barat memiliki tingkat ancaman tsunami Sedang.

Tsunami di kabupaten Mamuju Utara (Bambaira, Bambaloka, Pasangkayu, Sarudu, Lariang, Tikke), Mamuju (Karossa, Topoyo, Budong-budong, Samapaga, Papalang, Kalukku, Mamuju, Balabalakang, Simkep, Tapalang Barat, Tapalang), Majene (Malunda, Sendana, Banggae, Pamboang), dan Polewali Mandar (Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapilli, Wonomulyo, Matakali, Polewali, Binuang).

❖ Gempa

Gempa bumi terjadi di Sulawesi Barat sebanyak 4 (empat) kali kejadian gempa besar, tercatat pernah terjadi gempa bumi yang menimbulkan kerugian korban jiwa atau kerusakan terjadi pada tahun 1967 di Polewali Mandar. Pada tanggal 23 Februari 1969 terjadi gemapa bumi di Majene tercatat korban meninggal dunia 64 orang, luka-luka 97 orang, rumah hancur 1287 unit dan juga menyebabkan kerusakan jalan sepanjang 50m. Di mamuju tercatat dua kali terjadi gempa bumi yaitu pada tanggal 9 Juli 1984 dan tanggal 5 Februari 2008 mengakibatkan korban meninggal dunia dua orang, luka-luka 91 orang, rumah rusak 38 unit, pusat pendidikan 31 unit dan rumah sakit 1 unit. Gempa bumi yang tercatat paling akhir terjadi pada tanggal 16 Juni 2010 di Mamuju Utara juga mengakibatkan korban meninggal dunia satu orang, 139 orang luka-luka, 3 unit pusat pendidikan, 1 unit rumah sakit/puskesmas.

Rawan Gempa di Kab. Mamuju (Kec. Tapalang, Kec. Mamuju, Kec. Kalukku, Kec. Singkep, Kec. Bonehau, Kec. Belang-belang, Kec. Sampaga, Kec. Pangale, dan Budong-budong), Polewali Madar (Kec. Tutallu, Wonomulyo),

Mamuju Utara (Bambalamotu, Bambaira, Pasangkayu, Baras, sarudu), Mamuju (Mamuju, Simboro Kepulauan, Tapalang Barat, Budong-budong, Topoyo, Sampaga, Papalang, Karossa), Majene (Malunda, Sendana, Pamboang, Banggae), Polewali Mandar (Tinambung, Campalagiang, Limboro, Balanipa, Luyo, Mapili, Wonomulyo, Anreapi,Polewali).

Beberapa kejadian gempa besar tercatat pernah terjadi di Sulawesi Barat dan menimbulkan kerugian korban jiwa atau kerusakan parah, terjadi pada tahun 1967 di Kabupaten Polewali Mandar (dulu bernama Polmas), tahun 1969 di Kabupaten Majene, di Kabupaten Mamuju tahun 1972 dan 1984, serta yang terakhir tahun 2010 di Kabupaten Majene dan Mamuju Utara.

Aktivitas kegempaan di Provinsi Sulawesi Barat merupakan hal yang luar biasa, karena frekuensinya termasuk rendah, sehingga ketika terjadi gempa akan langsung membuat kepanikan yang luar biasa. Gempa terbesar untuk wilayah Sulawesi Barat adalah pada tanggal 23 Februari 1969 di Majene dengan magnitude mencapai 6,9 SR yang menyebabkan tsunami di bagian utara Kabupaten Majene, tinggi gelombang mencapai 1,5 – 4 meter. Gempa ini menyebabkan sekitar 64 orang meninggal dunia, 97 orang luka-luka, dan kisaran 1.287 rumah mengalami kerusakan yang cukup parah.

2.1.4 Demografi

Provinsi Sulawesi Barat dengan luas wilayah 16.787,17 Km^2 memiliki jumlah penduduk sekitar 1.189.203 jiwa (tahun 2011). Komposisi penduduk tersebut yakni 80 persen petani dan 7,5 persen nelayan. Secara keseluruhan, jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari penduduk berjenis kelamin perempuan. Hal ini tercermin dari rasio angka jenis kelamin yang lebih besar dari jumlah penduduk perempuan.

Jumlah penduduk Sulawesi Barat pada tahun 2007 adalah 1.016.663 jiwa, laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Barat pada tahun 2011 adalah 1.189.203 Suku yang ada di Provinsi Sulawesi Barat meliputi beberapa suku antara lain; Mandar (49,15%), Toraja (13,95%), Bugis (10,79%), Jawa (5,38%), Makassar (1,59%), dan suku lainnya (19,15%). Proporsi penduduk yang memeluk agama berdasar data dari Badan Pusat Statistik tahun 2008 adalah Islam (83,1%), Kristen (14,36%), Hindu (1,88%), Budha (0,04%), dan yang lainnya (0,62%). Sedangkan bahasa yang digunakan dalam

masyarakat antara lain bahasa Indonesia, bahasa Mandar, bahasa Bugis, bahasa Toraja, dan bahasa Makassar.

Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agama merupakan faktor paling penting demi terwujudnya cita-cita pembangunan nasional, yaitu terciptanya kehidupan yang sejahtera, adil dan makmur, serta stabilitas yang baik disegala bidang kehidupan baik secara lahiriah maupun batiniah. Untuk mewujudkannya, tidak hanya SDM (sumber daya manusia) yang berkualitas di bidangnya yang dibutuhkan namun juga diperlukan SDM yang memiliki moral dan akhlak yang baik. Hal ini dapat terwujud apabila umat beragama diberikan perlindungan untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan sesuai agama masing-masing dengan aman dan tentram dengan diikuti sikap saling toleransi yang tinggi sehingga terwujud kerukunan hidup umat beragama yang saling menghargai dan menghormati satu dengan lainnya.

Grafik 2.4.
Jumlah Penduduk Menurut Agama di Sulawesi Barat, 2006 - 2010

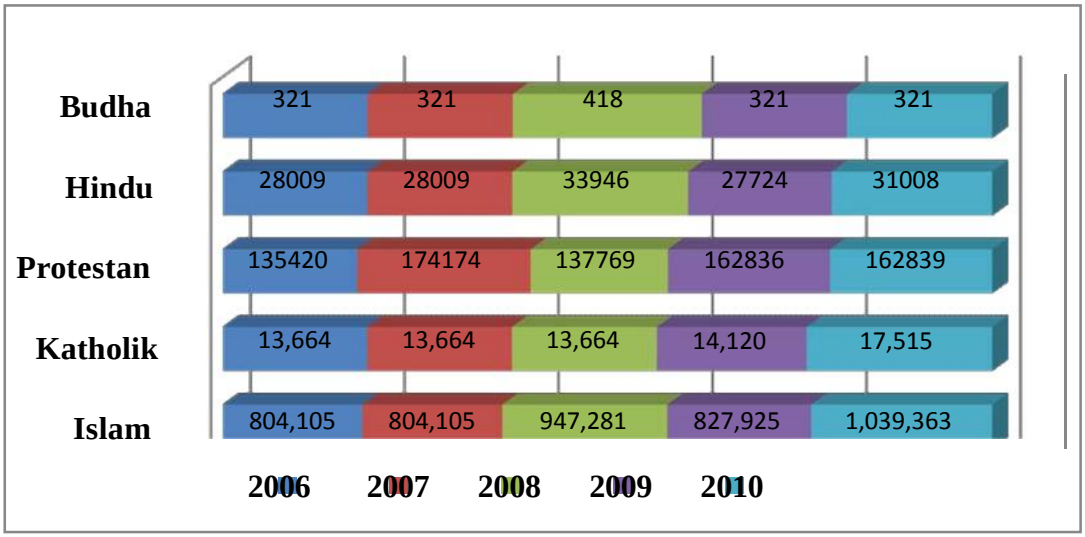

Sumber : Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Sulawesi Barat

Tidak dapat dipungkiri bahwa ketersediaan fasilitas tempat ibadah mutlak diperlukan, untuk itu pemerintah terus berupaya meningkatkan ketersediaan fasilitas tersebut, baik dari segi peningkatan kualitasnya maupun kuantitasnya. Keseriusan pemerintah dalam peningkatan sarana ibadah ini dapat terlihat dari keselarasan antara peningkatan jumlah pemeluk agama yang diikuti oleh peningkatan sarana tempat ibadah masing-masing agama.

Grafik 2.5.
Perkembangan Jumlah Tempat Ibadah Menurut Agama
Di Sulawesi Barat tahun 2006-2010

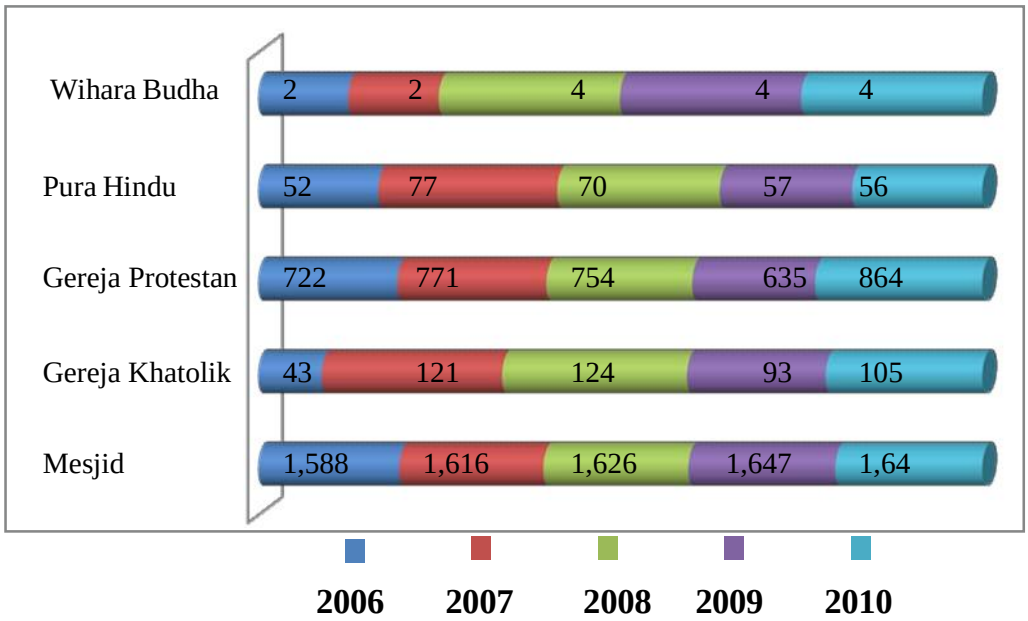

Sumber : Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Sulawesi Barat

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir peningkatan jumlah pemeluk agama islam sebanyak 235.258 orang atau sekitar 22,63 persen yang diikuti dengan peningkatan jumlah masjid sebanyak 59 masjid. Hal yang serupa juga terjadi untuk pemeluk dan tempat ibadah agama lainnya.

Tabel 2.26.
Jumlah PendudukMenurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2007 – 2010

No	Kabupaten	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Majene	73.673	77.434	151.107
2	Polewali Mandar	193.108	203.012	396.120
3	Mamasa	71.088	68.994	140.082
4	Mamuju	173.413	163.560	336.973
5	Mamuju Utara	70.244	64.125	134.369
Sulawesi Barat 2010		**581.526**	**577.125**	**1.158.651**
2009		530.020	517.719	1.047.739
2008		522.228	510.028	1.032.256
2007		514.481	502.182	1.016.663

Sumber: Sulawesi Barat Dalam Angka 2006-2010

Dari aspek Pertumbuhan Penduduk yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk alami (faktor kelahiran) dan angka migrasi penduduk masuk, maka laju

pertumbuhan penduduk Sulawesi Barat tiap Kabupaten dapat diketahui, seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.27.
Laju Pertumbuhan Penduduk Sulawesi Barat Tiap Kabupaten

Kabupaten	Jumlah Penduduk Tahun 2000	Jumlah Penduduk Tahun 2010	Laju Pertumbuhan Penduduk
1	*2*	*3*	*4*
Majene	124.475	151.107	1,97%
Polewali Mandar	343.792	396.12	1,4%
Mamasa	117.248	140.082	1,81%
Mamuju	230.27	336.973	3,91%
Mamuju Utara	75.833	134.369	5,94%
Sulawesi Barat	**891.618**	**1.047.739**	**2,68%**

Sumber: BPS Sulbar dalam Angka 2011

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari dua fokus yakni fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta fokus kesejahteraan sosial. Masing-masing fokus tersebut dibahas pada bagian di bawah ini:

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan Provinsi Sulawesi Barat, ditinjau dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Pada bagian ini akan dipaparkan lebih mendalam aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang mencakup: masalah pertumbuhan ekonomi, perkembangan PDRB sektoral, struktur perekonomian, inflasi, perkembangan PDRB per kelompok sektor,pendapatan per kapita; produktifitas tenaga kerja, PDRB menurut penggunaan, dan gambaran singkat sektor.

a. Pertumbuhan PDRB

Kinerja perekonomian Provinsi Sulawesi Barat selama periode 2006-2010 cukup fluktuatif, khususnya terjadi dalam kurun waktu tahun 2008-2010. Jika dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 yang bertumbuh pada laju rata-rata 8,16 persen per tahun, Sulawesi Barat memiliki laju pertumbuhan yang jauh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional (PDB) yang berada pada angka 6.21 persen per tahun pada periode yang sama. Di tingkat wilayah, Provinsi Sulawesi Barat merupakan provinsi dengan output (PDRB) kedua terkecil setelah Gorontalo dengan

sumbangan sebesar 4,44 persen terhadap pembentukan PDRB Wilayah Sulawesi dan sebesar 0,21 persen terhadap pembentukan PDB nasional (2010).

Grafik 2.6.
Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Barat dengan Nasional Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2006-2010

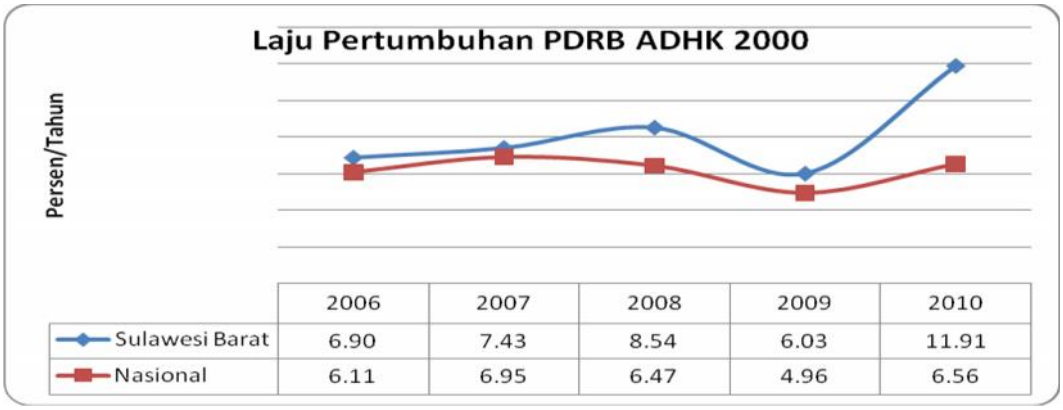

Sumber : Badan Pusat Statistik (Sulbar Dalam Angka 2006-2010) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Perkembangan Kinerja Provinsi Sulawesi Barat 2012)

Pada kurun waktu 2009-2010, kondisi perekonomian Pulau Sulawesi sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan perekonomian nasional. Pada tahun 2009, pertumbuhan ekonomi provinsi se-Sulawesi berkisar 6,03 persen hingga 7,83 persen. Sementara pada tahun yang sama, ekonomi nasional hanya tergenjot pada kisaran 4,96 persen.

Tabel 2.28.
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Secara Regional di Sulawesi Pada Tahun 2006-2010

Provinsi	2006	2007	2008	2009	2010
Sulawesi Utara	5.69	6.47	10.86	7.83	7.13
Sulawesi Tengah	7.22	7.25	7.44	7.80	7.76
Sulawesi Selatan	6.73	6.35	7.79	6.23	8.18
Sulawesi Tenggara	7.68	7.98	7.27	7.57	8.19
Gorontalo	7.30	7.51	7.76	7.54	7.63
Sulawesi Barat	6.90	7.43	8.54	6.03	11.91
Nasional	6.11	6.95	6.47	4.96	6.56

Sumber: Sulawesi Barat Dalam Angka 2006-2010

Grafik 2.7.
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi
Tahun 2006-2010

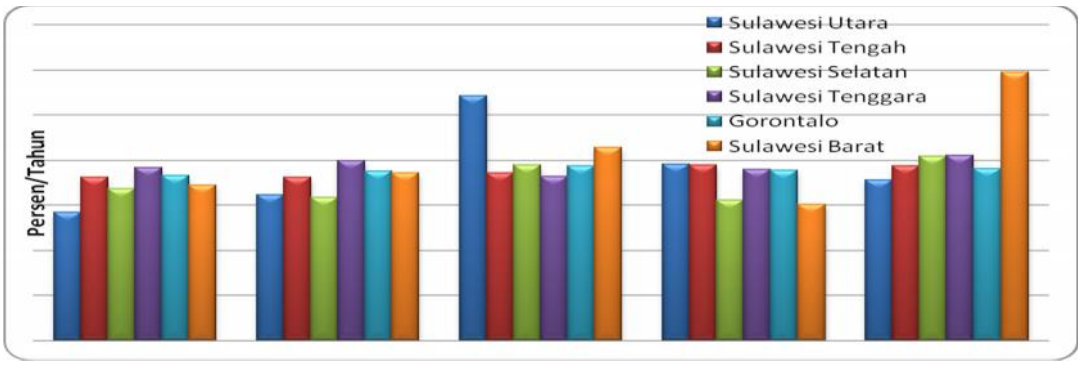

Sumber: Sulawesi Barat Dalam Angka 2006-2010

Hal serupa terjadi pada tahun 2010, dimana pertumbuhan nasional jauh di bawah kinerja perekonomian provinsi se-Sulawesi. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2010 berada di Provinsi Sulawesi Barat yang mencapai 11,91 persen. Sementara provinsi lainnya, seperti Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara melaju pada kecepatan 8,18 persen dan 8,19 persen. Capaian kinerja perekonomian ini merupakan buah hasil kerja keras Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam membangun Sulawesi Barat agar senantiasa dapat sejajar dengan daerah lainnya.

Di wilayah Provinsi Sulawesi Barat sendiri dengan lima kabupaten otonom, masing-masing memiliki nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang cukup variatif. Di tahun 2010, Kabupaten Mamuju sebagai ibukota provinsi menyumbang sebesar 30,54 persen terhadap pembentukan PDRB provinsi, sementara Kabupaten Mamasa hanya berkontribusi sebesar 11,00 persen. Pada tahun yang sama, pertumbuhan ekonomi tertinggi berada di Kabupaten Mamuju Utara sebesar 13,56 persen dan terendah di Kabupaten Mamasa sebesar 8,54 persen.

Grafik 2.8.
Pertumbuhan PDRB Menurut Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun 2010

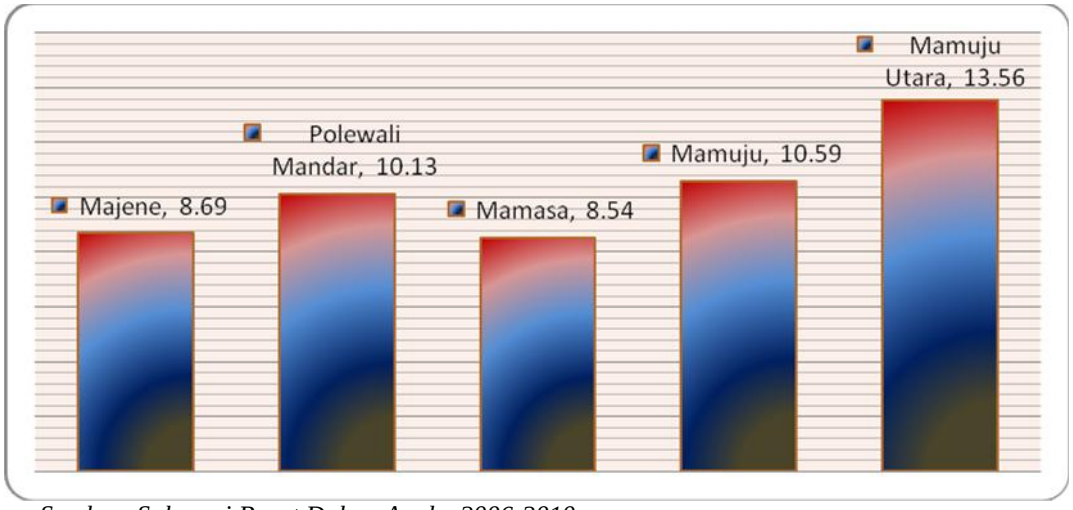

Sumber: Sulawesi Barat Dalam Angka 2006-2010

Tabel 2.29.
Nilai PDRB Kabupaten (Persen) ADHB dan ADHK 2000
Provinsi Sulawesi BaratTahun 2010

Kode Wilayah	Sektor	PDRB Harga Berlaku	PDRB Harga Konstan	Pertumbuhan (%)
01	Majene	1,356,275.61	611,588.41	8.69
02	Polewali Mandar	3,354,057.75	1,428,767.95	10.13
03	Mamasa	1,199,632.57	612,181.69	8.54
04	Mamuju	3,327,886.64	1,375,662.80	10.59
05	Mamuju Utara	1,659,560.29	711,237.26	13.56
Total PDRB Kabupaten		**10,897,412.86**	**4,739,438.11**	

Sumber: Sulawesi Barat Dalam Angka 2006-2010

Namun demikian, laju pertumbuhan tersebut belum cukup untuk mengurangi kesenjangan pendapatan per kapita Sulawesi Barat dari angka rata-rata nasional. PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku di Sulawesi Barat selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006, angka PDRB per kapita Sulawesi Barat sebesar 5,1 juta rupiah, kemudian meningkat pesat hingga mencapai 10,9 juta rupiah pada tahun 2010. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam rentang waktu lima tahun, rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di Provinsi Sulawesi Barat meningkat hampir dua kali lipat.

Grafik 2.9.
Perbandingan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Sulawesi Barat dengan Nasional Tahun 2006-2010 (Ribu Rupiah)

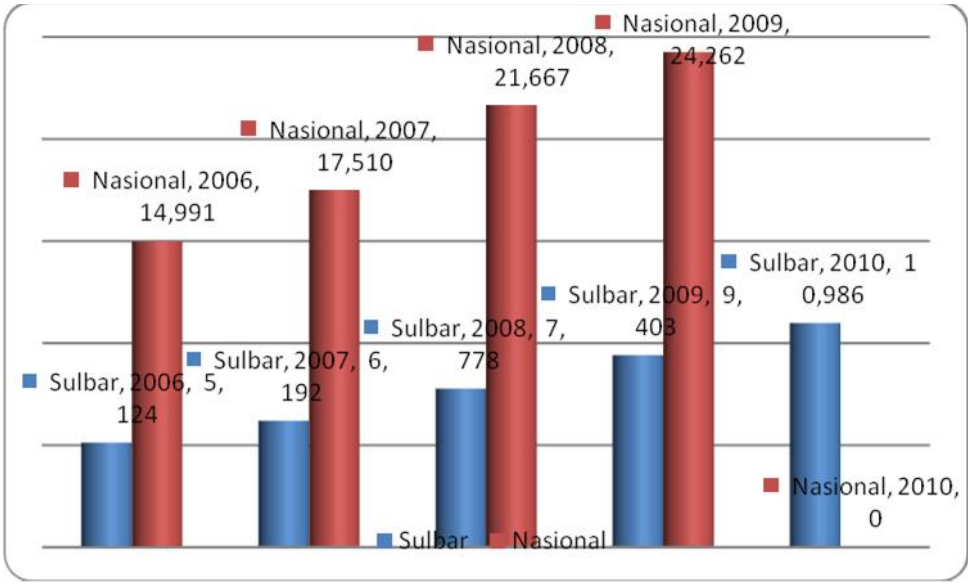

Sumber : Sulawesi Barat Dalam Angka 2006-2010

Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor

Provinsi Sulawesi Barat dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami kemajuan dalam bidang ekonomi yang cukup pesat. Hal tersebut digambarkan oleh pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat yang berada di atas 6 Persen per tahun selama periode 2006-2010. Pada tahun 2006, ekonomi Sulawesi Barat tumbuh 6,90 persen dan terus meningkat hingga mencapai 11,91 persen pada tahun 2010. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor di Sulawesi Barat dapat disajikan pada tabel 2.18 berikut :

Tabel 2.30.
Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2006-2010 Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000 di Provinsi Sulawesi Barat (Persen)

No	Sektor	2006		2007		2008		2009		2010	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
1	Pertanian	11.06	4.40	17.46	3.58	21.54	4.04	10.82	3.11	18.59	14.55
2	Pertambangan & penggalian	14.57	7.56	37.27	25.20	31.98	24.18	21.88	19.49	15.25	1.56
3	Industri pengolahan	19.42	7.05	23.51	7.29	22.19	5.02	5.81	8.62	12.30	15.47
4	Listrik, gas & air bersih	13.96	10.84	33.92	14.24	37.60	26.81	11.87	10.91	29.35	26.96
5	Konstruksi	21.32	12.63	38.96	17.68	57.89	45.28	14.91	10.14	-5.44	-2.85
6	Perdagangan, hotel, & restoran	18.15	6.80	15.66	9.04	27.27	6.93	14.90	5.46	26.97	13.87
7	Pengangkutan & komunikasi	14.46	12.01	16.11	14.95	34.23	10.89	14.54	10.07	29.44	21.29
8	Keuangan, sewa,	11.72	6.52	29.48	24.47	31.55	22.20	23.26	13.82	19.26	5.04

No	Sektor	2006		2007		2008		2009		2010	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
	& jasa perusahaan										
9	Jasa-jasa	33.14	14.99	25.65	10.45	32.22	12.58	19.42	7.50	10.91	7.22
	PDRB	**15.87**	**6.90**	**20.84**	**7.43**	**25.60**	**8.54**	**13.35**	**6.03**	**16.84**	**11.91**

Sumber: Sulawesi Barat Dalam Angka 2006-2010

Pertumbuhan fantastis pada tahun 2010 sebesar 11,91 persen tersebut dapat dicapai tentunya tidak terlepas dari hasil kerja keras masyarakat di bawah kebijakan pemerintah yang terus berjuang membangun daerah Sulawesi Barat. Pertumbuhan tersebut bahkan akan terus mengalami peningkatan apabila investor lebih banyak yang berminat menanamkan modalnya di daerah ini.

Grafik 2.10.
Pertumbuhan Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000
di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010

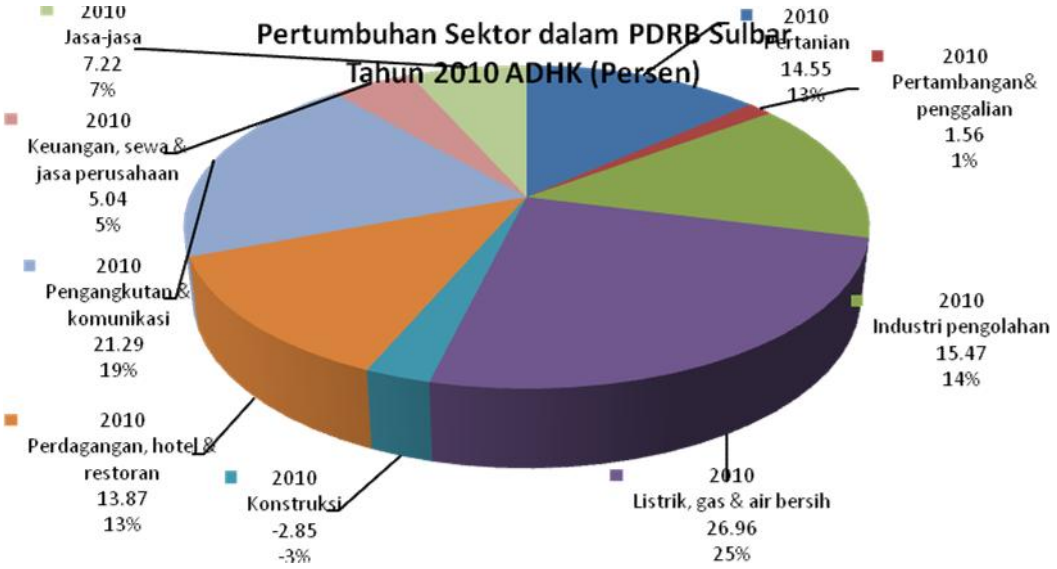

Sumber: Sulawesi Barat Dalam Angka 2006-2010

Tabel 2.31.
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2006-2010
Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000
di Provinsi Sulawesi Barat (Persen)

No	Sektor	2006		2007		2008		2009		2010	
		Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb
1	Pertanian	53.55	53.59	51.63	52.57	49.49	50.4	46.20	49.05	47.29	49.79
2	Pertambangan & penggalian	0.54	0.61	0.63	0.69	0.72	0.73	1.02	0.88	0.93	0.87
3	Industri pengolahan	7.83	7.57	7.82	7.74	7.57	7.53	8.52	7.54	8.79	7.25
4	Listrik, gas & air bersih	0.34	0.35	0.36	0.39	0.42	0.43	0.43	0.40	0.49	0.44

No	Sektor	2006		2007		2008		2009		2010	
		Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb
5	Konstruksi	3.11	3.18	3.41	3.65	4.56	4.59	5.36	5.09	4.66	4.12
6	Perdagangan, hotel & restoran	12.95	12.99	13.14	12.43	12.95	12.60	12.47	11.97	12.69	13.01
7	Pengangkutan & komunikasi	2.79	2.51	2.98	2.42	3.05	2.58	3.16	1.97	3.43	2.13
8	Keuangan, sewa, & jasa Perusahaan	4.63	4.46	5.37	4.78	6.04	5.01	7.39	5.96	6.94	6.09
9	Jasa-jasa	14.26	14.74	14.65	15.33	15.20	16.14	15.43	17.18	14.79	16.31
	PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Sulawesi Barat Dalam Angka 2006-2010

Grafik 2.11.
Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010

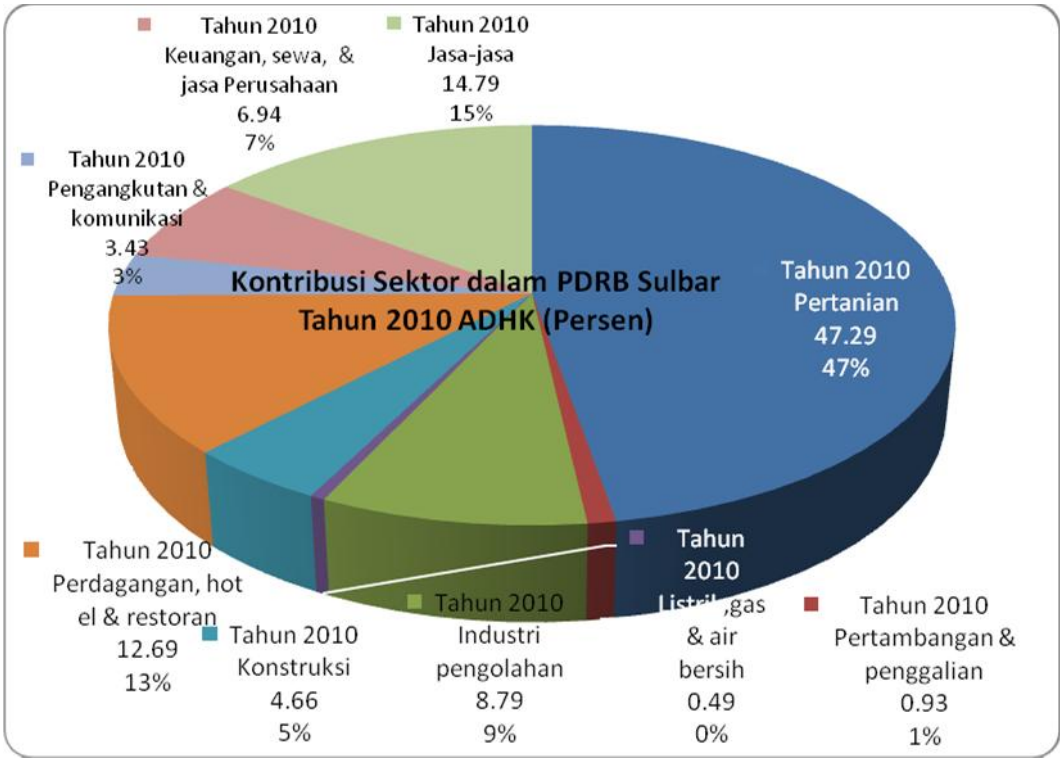

Sumber: Sulawesi Barat Dalam Angka 2006-2010

Pendapatan Perkapita

Perkembangan perekonomian Provinsi Sulawesi Barat yang diikuti dengan pertambahan jumlah penduduk akan berdampak pada PDRB perkapita. Tingkat kesejahteraan suatu daerah salah satunya dapat tercermin dari besarnya PDRB perkapita, meskipun angka tersebut tidak menggambarkan pendapatan

penduduk secara nyata, karena angka ini hanya merupakan rata-rata.

PDRB perkapita penduduk Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan harga konstan tahun 2000 mengalami peningkatan terus menerus sejak tahun 2004 hingga tahun 2009. Pada tahun 2004 PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Barat hanya sebesar Rp 2,95 Juta rupiah meningkat menjadi Rp 4,24 Juta Rupiah pada tahun 2009. Rata-rata kenaikan pendapatan per kapita sejak tahun 2004 sampai 2009 adalah sebesar 7.29 persen.

Tabel 2.32.
PDRB dan Pendapatan Regional Perkapita Sulawesi Barat
Tahun 2004-2009

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku	Persentase Kenaikan	Atas Dasar Harga Konstan 2000	Persentase Kenaikan
2004	3.869.646,00		2.946.313,00	5.86 %
2005	4.422.946,00	14.30 %	3.120.765,00	5.92 %
2006	5.124.812,00	15.87 %	3.338.754,00	6.99 %
2007	6.192.786,00	20.84 %	3.567.816.00	6.86 %
2008	8.295.605,60	33.96 %	3.998.502.00	12.07 %
2009	9.403.378,61	13.35 %	4.239.460.87	6.03 %

Sumber: Sulawesi Barat Dalam Angka ProvinsiSulawesi Barat, 2011

Pada tahun 2004-2009, pertumbuhan PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Barat berfluktuasi. Pertumbuhan PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Barat mencapai titik terendah pada tahun 2004 yakni sebesar 5,86 persen, sedangkan titik tertinggi pada tahun 2008 yaitu sebesar 12,07 persen.

b. Laju Inflasi

Pada tahun 2008, Provinsi Sulawesi Barat mengalami inflasi yang cukup tinggi sebesar 11,66 persen. Namun pada tahun 2009, angka inflasi tersebut mengalami penurunan yang signifikan sebesar 9,87 poin menjadi 1,78 persen, kemudian naik kembali menjadi 5,12 persen pada tahun 2010. Secara rata-rata, dalam setahun Provinsi Sulawesi Barat mengalami inflasi sebesar 6,19 persen, lebih rendah 0,74 poin dari angka inflasi nasional yang mencapai 6,93 persen. Inflasi sebesar 6,19 persen tersebut masih cukup wajar, dimana Provinsi Sulawesi Barat merupakan provinsi termuda dari 33 provinsi di Indonesia yang masih memiliki keterbatasan terhadap distribusi yang sebagian besar masih ditempuh melalui jalur darat.

Grafik 2.12.
Laju Inflasi di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008-2010

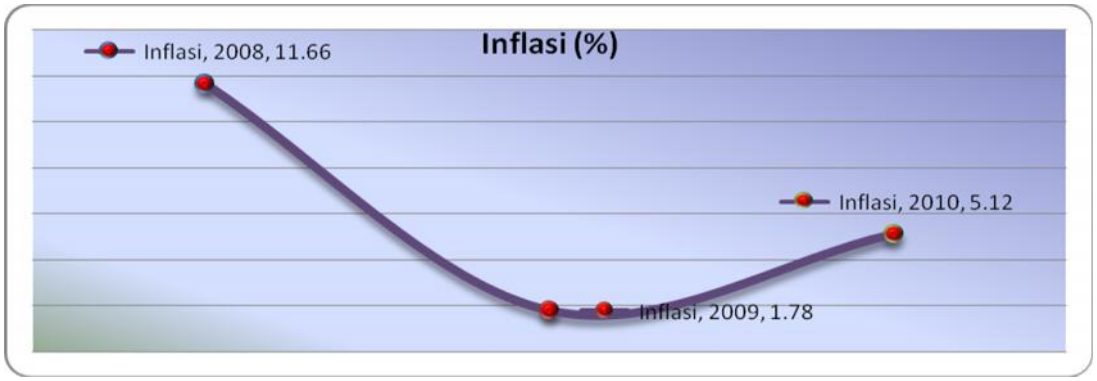

Sumber: Sulawesi Barat Dalam Angka 2006-2010

Inflasi tertinggi pada tahun 2008 terjadi pada kelompok bahan makanan sebesar 20,37 persen dan terendah pada kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 1,21 persen. Pada tahun 2009, terjadi perubahan yang cukup drastis dimana kelompok bahan makanan menjadi yang terendah bahkan mengalami deflasi sebesar 2,02 persen dan tertinggi oleh kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 9, 31 persen. Kemudian pada tahun 2010, kelompok bahan makanan kembali menjadi yang tertinggi, yaitu 12,55 persen dan terendah oleh kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,21 persen.

Rata-rata dalam setahun, kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi terjadi pada kelompok bahan makanan sebesar 10,30 persen. Hal ini dipandang wajar karena kebutuhan dasa manusia, khususnya masyarakat Sulawesi Barat, sangat bergantung pada bahan makanan dan hampir seluruh komoditi bahan makanan di Sulawesi Barat sangat fluktuatif, terutama komoditi ikan segar.

c. Kondisi Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Pendekatan yang digunakandalam menentukan garis kemiskinan adalah berdasarkan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basicneeds approach), yang dalam hal ini adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan yang setara dengan 2100 kilokalori serta kebutuhan bukan makanan, yakni kebutuhan minimum perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Tabel 2.33.
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Periode Juli Tahun 2006-2010

No	Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Majene	30,9	30,8	24,4	23,86	27,8
2	Polewali Mandar	98,1	88,5	78,3	76,58	84,3
3	Mamasa	31,4	31,0	22,5	22,32	22,8
4	Mamuju	33,9	30,4	24,7	25,41	27,7
5	Mamuju Utara	10,9	9,2	6,9	7,14	8,4
Sulawesi Barat		**205,2**	**189,9**	**156,8**	**155,31**	**171,0**

Sumber: Sulawesi Barat Dalam Angka 2006-2010

Tampak penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2006 sampai 2010 penduduk miskin berkurang sebesar 7,16 persen. Hal ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Daerah Sulbar dalam menanggulangi masalah kemiskinan di Sulawesi Barat.

Indeks Kedalaman KemiskinanProvinsi Sulawesi Barat selama empat tahun terakhir fluktuatif, pada tahun 2007 nilai IKK (P1) untuk total desa dan kota 2,59, pada tahun 2008 mengalami kenaikan 2,63, pada tahun 2009 nilai IKK turun menjadi 2,47 dan pada tahun 2010 menurun sangat drastis menjadi 1,55. Pengukuran nilai IKK di bagi menurut daerah, yaitu daerah kota dan desa. Indeks Kedalaman Kemiskinan kota sejak tahun 2007 mengalami kenaikan sedangkan di wilayah desa Indeks Kedalaman Kemiskinan mengalami penurunan. Hal ini menandakan bahwa penduduk miskin di kota menjadi lebih banyak dibandingkan dengan penduduk miskin di Desa. Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota pada tahun 2007 sebesar 1,73, tahun 2008 sebesar 2,38 sedangkan pada tahun 2009 sebesar 2,91. Sementara di desa Indeks Kedalaman Kemiskinan pada tahun 2007 sebesar 3,02, tahun 2008 sebesar 2,75 dan tahun 2009 sebesar 2,25.

Tabel 2.34.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Sulawesi Barat Tahun 2007-2009

Tahun	Kota	Desa	Kota+Desa
2007	1,73	3,02	2,59
2008	2,38	2,75	2,63
2009	2,91	2,25	2,47
2010	0,84	1,90	1,55

Sumber : BPS, Sulbar Dalam Angka 2006-2010

Bila dilihat penurunan jumlah penduduk miskin menurut daerah, selama tahun 2006 sampai 2010 daerah perkotaan di Sulawesi Barat lebih sedikit dari daerah perdesaan. Meskipun demikian perbedaan tersebut tidak begitu signifikan. Dengan demikian, besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Perubahan harga yang terjadi pada kelompok makanan tentunya akan sangat berpengaruh pada garis kemiskinan, dan yang paling terkena imbasnya adalah masyarakat perkotaan yang notabene kebutuhan makanannya diperoleh dengan cara membeli. Jika pendapatan mereka konstan atau peningkatannya tidak dapat mengikuti naiknya harga barang (inflasi), maka besar kemungkinan akan menambah jumlah penduduk miskin.

Grafik 2.13.
Perkembangan Persentase Kemiskinan di Sulawesi Barat Tahun 2006-2010

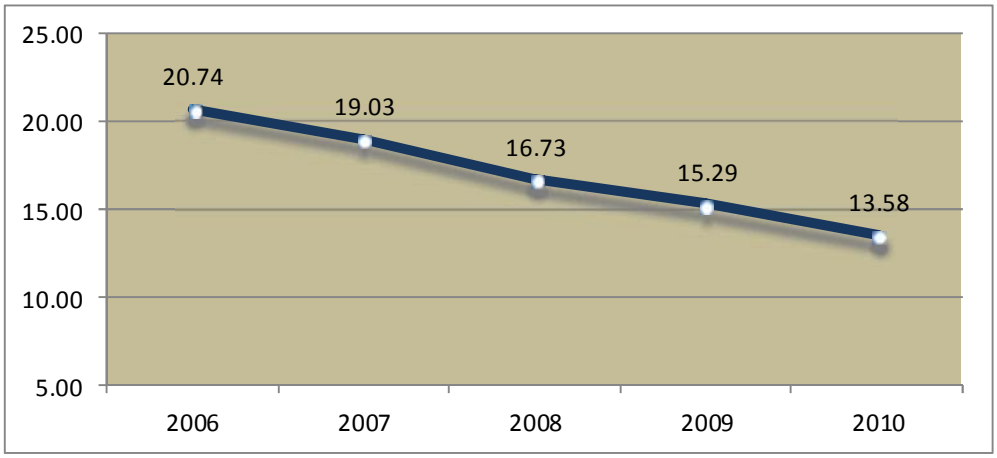

Sumber: Sulawesi Barat Dalam Angka 2006-2010

Berbeda dengan masyarakat di perdesaan, perubahan harga barang makanan tidak begitu berpengaruh pada mereka, karena bahan makanannya kebanyakan diproduksi sendiri. Sehingga jika harga bahan makanan naik, mereka tidak serta merta menjadi miskin. Hal ini menjadi penyebab persentase maupunjumlah penduduk miskin perkotaan Sulawesi Barat cenderung turun lebih lambat jika dibanding persentase penduduk di wilayah perdesaan.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Kondisi kesejahteraan sosial dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek kependudukan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kondisi pengangguran, kondisi kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta seni budaya dan olah raga.

a. Angka Melek Huruf

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah tingkat melek huruf yang mengindikasikan kemampuan penduduk untuk dapat membaca dan menulis. Dalam hal ini, angka melek huruf merupakan prosentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis latin dan atau huruf lainnya.

Angka melek huruf di Sulawesi Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2006 hingga tahun 2010. Dari grafik dapat dilihat bahwa Angka Melek Huruf pada tahun 2006 sebesar 83,40 persen, terus mengalami tren peningkatan hingga tahun 2011 menjadi 88,54 persen.

Grafik 2.14.
Angka Melek Huruf di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006-2011

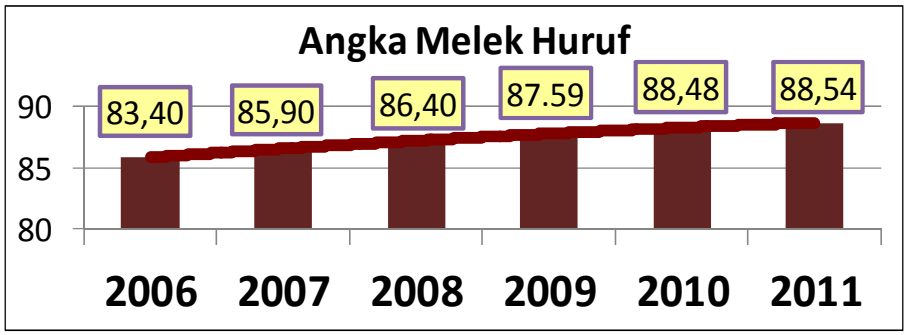

Sumber: Sulawesi Barat Dalam Angka 2006-2010

b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat tingkat pendidikan adalah rata-rata lama sekolah yang secara umum menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk usia 15 tahun ke atas. Lamanya sekolah adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT).

Pada tahun 2006 rata-rata lama bersekolah Provinsi Sulawesi Barat sebesar 6,3 tahun dan tahun 2010 sebesar 7,11 tahun. Hal ini menujukkan bahwa terjadi

peningkatan rata-rata lama bersekolah masyarakat sampai Tujuh tahun Satu bulan yang memberikan pengertian bahwa masyarakat Provinsi Sulawesi Barat rata-rata mampu bersekolah sampai pada tingkat SMP Kelas Satu.

Grafik 2.15.
Rata-rata Lama
di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006-2011

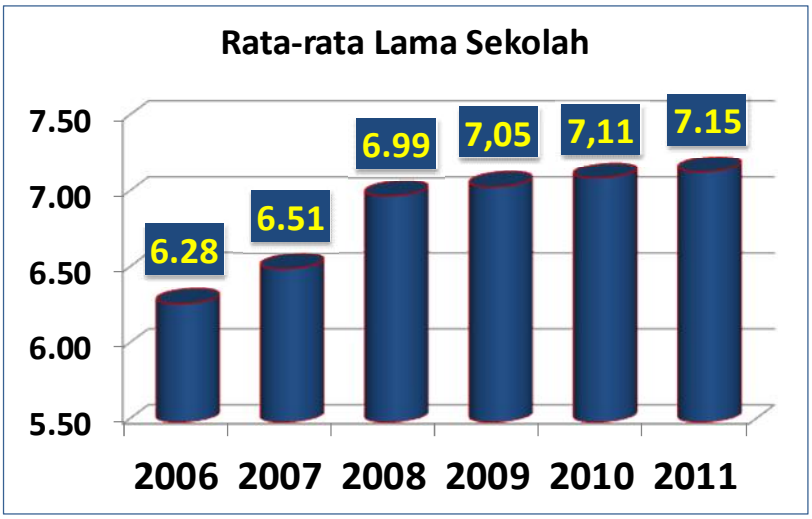

Sumber: Sulawesi Barat Dalam Angka 2006-2010

c. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar adalah besaran yang menyatakan perbandingan jumlah penduduk untuk semua jenjang usia yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SMU dibagi dengan jumlah penduduk usia sekolah.

Tabel 2.35.
Angka Partisipasi Kasar Menurut Kabupaten
di Sulawesi Barat Tahun 2010

No	Kabupaten	SD	SLTP	SMU
1.	Majene	112,37	69,76	65,97
2.	Polewali Mandar	106,60	67,08	44,36
3.	Mamasa	109,85	75,85	61,30
No	**Kabupaten**	**SD**	**SLTP**	**SMU**
4.	Mamuju	112,04	55,67	54,71
5.	Mamuju Utara	119,97	64,93	49,24
Sulawesi Barat		**110,88**	**65,09**	**52,17**
2009		107,09	85,56	57,67
2008		110,11	60,27	38,64

Sumber: Sulawesi Barat Dalam Angka 2006-2010

Tabel di atas memperlihatkan Angka Partisipasi Kasar pada setiap kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat untuk tahun 2010. Dari tabel tersebut, nampak bahwa pada tahun 2010, Kabupaten Mamuju Utara memiliki tingkat APK yang lebih tinggi pada jenjang Sekolah Dasar sedangkan Kabupaten Polewali

Mandar yang terendah. Akan tetapi, padan jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Kabupaten Mamuju memiliki tingkat partisipasi yang paling rendah dan Kabupaten Majene yang paling tinggi. Demikian pula pada jenjang Sekolah Menengah Umum, Kabupaten Majene masih konsisten pada tingkat tertinggi dan Kabupaten Polewali Mandar memiliki tingkat APK yang terendah di Provinsi Sulawesi Barat.

Grafik 2.16.
Angka Partisipasi Kasar di Sulawesi Barat Tahun 2008-2010

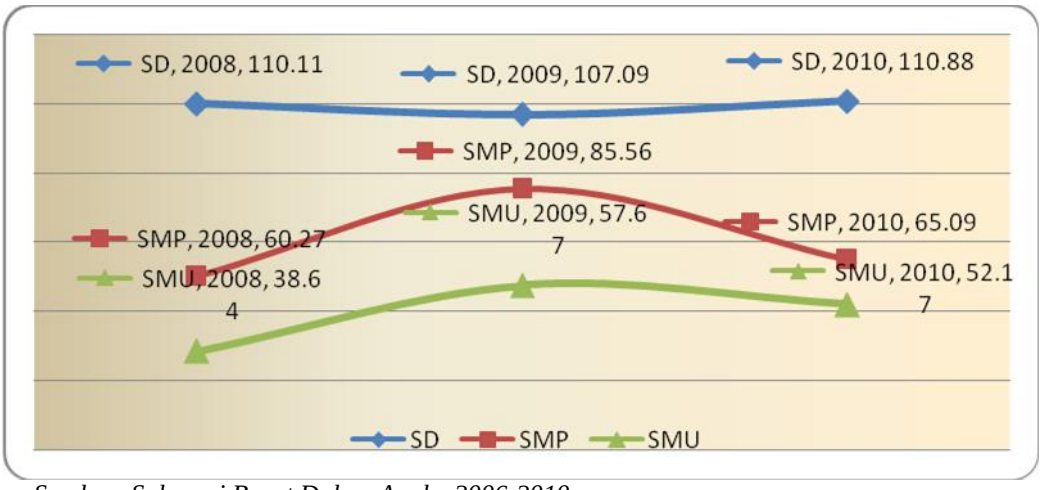

Sumber: Sulawesi Barat Dalam Angka 2006-2010

Selama kurun waktu tahun 2008 hingga tahun 2010, perkembangan Angka Partisipasi Kasar memang relatif berfluktuasi. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa trennya mengalami peningkatan. Untuk APK pada jenjang SD, tahun 2008 berada pada 110,11 dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 110,88. Begitu pula pada jenjang SLTP dan SMU, pada tahun 2008, SLTP memiliki APK sebesar 60,27 dan pada jenjang SMU sebesar 38,64. Kemudian pada tahun 2010, tingkat APK pada jenjang SLTP dan SMU mengalami peningkatan masing-masing menjadi 65,09 dan 52,17.

d. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni adalah perbandingan jumlah penduduk usia sekolah (7-18 tahun) yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SMU dibagi dengan jumlah penduduk usia sekolah.

Tabel 2.36.
Angka Partisipasi Murni Menurut Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun 2010

No	Kabupaten	SD	SLTP	SMU
1.	Majene	94,21	54,35	47,32
2.	Polewali Mandar	94,30	59,19	27,59
3.	Mamasa	92,24	57,37	41,20
No	**Kabupaten**	**SD**	**SLTP**	**SMU**
4.	Mamuju	93,83	47,07	35,03
5.	Mamuju Utara	95,06	52,04	30,42
Sulawesi Barat		**93,94**	**54,24**	**34,03**
2009		90,02	53,62	33,38
2008		93,25	52,40	32,64

Sumber: Sulawesi Barat Dalam Angka 2006-2010

Tabel di atas memperlihatkan Angka Partisipasi Kasar pada setiap kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat untuk tahun 2010. Dari tabel tersebut, nampak bahwa pada tahun 2010, Kabupaten Mamuju Utara memiliki tingkat APK yang lebih tinggi pada jenjang Sekolah Dasar sedangkan Kabupaten Mamasa yang terendah. Akan tetapi, padan jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Kabupaten Mamuju Utara memiliki tingkat partisipasi yang paling rendah dan Kabupaten Polewali Mandar yang paling tinggi. Demikian pula pada jenjang Sekolah Menengah Umum, Kabupaten Majene masih konsisten pada tingkat tertinggi dan Kabupaten Polewali Mandar memiliki tingkat APK yang terendah di Provinsi Sulawesi Barat.

Grafik 2.17.
Angka Partisipasi Kasar di Sulawesi Barat Tahun 2008-2010

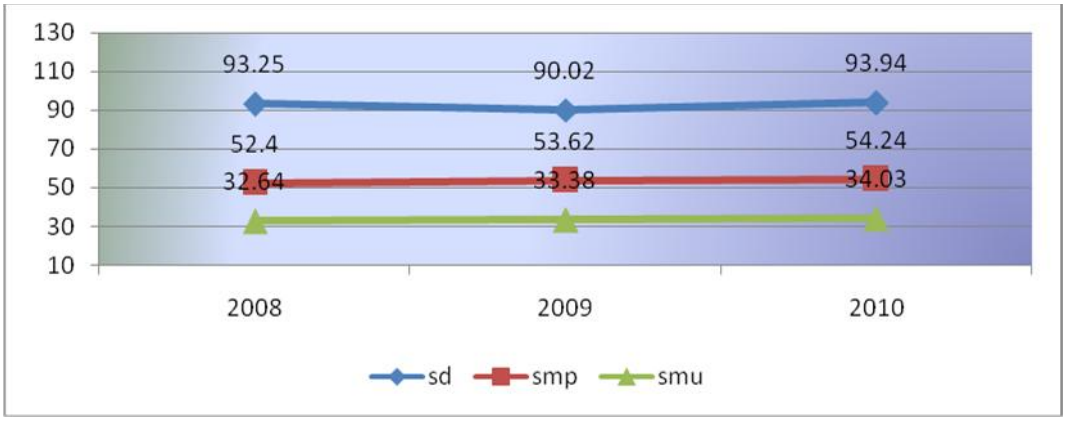

Sumber: Sulawesi Barat Dalam Angka 2006-2010

Selama kurun waktu tahun 2008 hingga tahun 2010, secara umum perkembangan Angka Partisipasi Kasar memperlihatkan peningkatan meskipun tidak signifikan. APM pada jenjang SD, tahun 2008 berada pada 93,25 dan pada

tahun 2010 meningkat menjadi 93,94. Begitu pula pada jenjang SLTP dan SMU, pada tahun 2008, SLTP memiliki APK sebesar 52,40 dan pada jenjang SMU sebesar 32,64. Kemudian pada tahun 2010, tingkat APK pada jenjang SLTP dan SMU mengalami peningkatan masing-masing menjadi 54,24 dan 34,03.

e. Angka Usia Harapan Hidup

Pemerintah telah berupaya secara optimal dalam membangun derajat kesehatan masyarakat melalui kebijakan pembangunan kesehatan yang di ejawantahkan ke dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk dalam upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat terutama di bidang kesehatan dan pendidikan.

Grafik berikut menunjukkan bahwa Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup (UHH) di Sulawesi Barat cenderung mengalami peningkatan, dimana tahun 2006 angka UHH mencapai 67,0 tahun dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 67,80 tahun.

f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia secara khusus mengukur capaian pembangunan manusia yang disusun dari beberapa komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan empat komponen utama yaitu Umur Panjang dan Sehat (bidang kesehatan), Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (bidang pendidikan), serta kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok (kemampuan ekonomi).

Dengan menggunakan IPM, UNDP(*United Nations Development Programme*) membagi tingkat pencapaian pembangunan manusia suatu wilayah pada kurun waktu tertentu ke dalam tiga golongan yaitu; rendah (kurang dari 50), sedang/menengah (antara 50-80), dan tinggi (80 ke atas). Untuk keperluan perbandingan tingkatan, status sedang dipecah menjadi dua yaitu, sedang bawah dan sedang atas.

Grafik 2.18.
Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006-2010

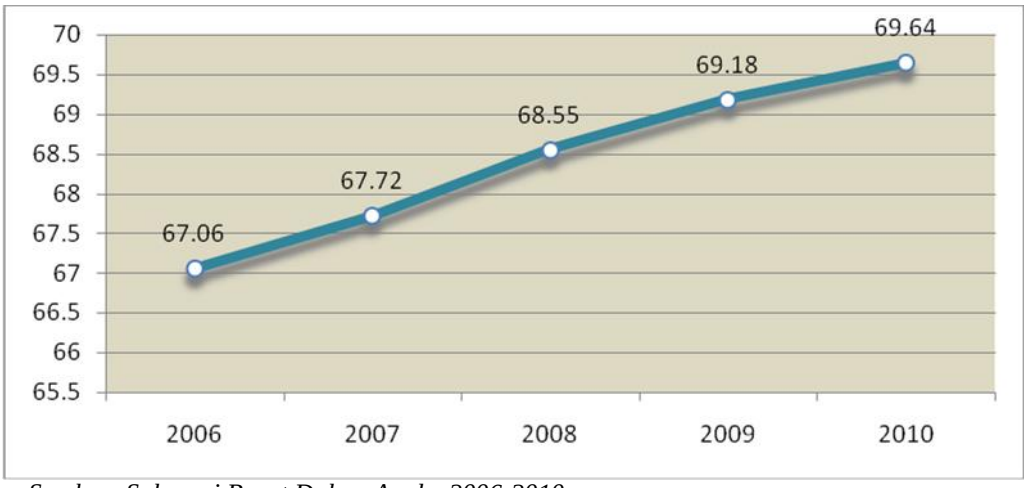

Sumber: Sulawesi Barat Dalam Angka 2006-2010

IPM Sulawesi Barat dalam kurun waktu 2006-2010, masih tergolong menengah. Akan tetapi capaian ini terus menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun. Walaupun Angka IPM-nya masih di bawah angka nasional, capaian Provinsi Sulawesi Barat pada dimensi pembangunan manusia terbilang cukup baik. Dari 33 provinsi yang ada, Sulawesi Barat berada pada peringkat ke-27.

Tabel 2.37.
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten
di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006-2010

Kabupaten	Indeks Pembangunan Manusia				
	2006	2007	2008	2009	2010
Majene	68,6	69,12	70,28	70,83	71,34
Polewali Mandar	63,9	64,77	65,91	66,61	67,38
Mamasa	68,7	69,16	69,79	70,18	70,82
Mamuju	67,3	67,60	68,50	68,89	69,32
Mamuju Utara	67,9	68,84	69,27	69,55	69,99
Sulawesi Barat	**67,06**	**67,72**	**68,55**	**69,18**	**69,64**

Sumber: Sulawesi Barat Dalam Angka 2006-2010

Grafik 2.19.
Perbandingan IPM Provinsi se-Sulawesi Tahun 2010

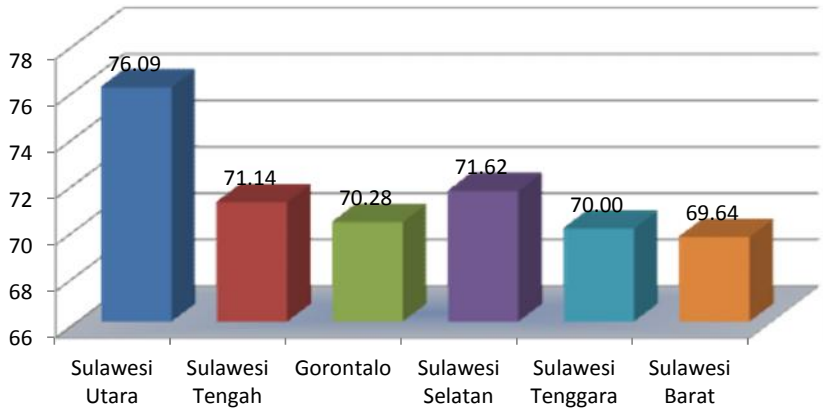

Sumber: Sulawesi Barat Dalam Angka 2006-2010

Pada tahun 2006, capaian IPM Sulawesi Barat sebesar 67,06. Kondisi ini meningkat menjadi 67,72 dan 68,55 pada tahun 2007 dan 2008. Hingga pada tahun 2010, capaian IPM Sulawesi Barat menembus posisi 69,64.

Keberhasilan peningkatan nilai IPM ini menghantarkan Sulawesi Barat mengalami pergeseran dari tahun ke tahun menjadi lebih baik. Pada tahun 2006, posisi IPM Sulawesi Barat secara nasional berada pada peringkat ke-29, kemudian naik menempati urutan ke-27 pada tahun 2010. Meningkatnya peringkat IPM Sulawesi Barat tersebut tak lepas dari kerja keras Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten, untuk menjadikan Sulawesi Barat dapat sejajar dengan daerah lain yang sudah lebih dulu maju dan berkembang.

Grafik 2.20.
Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup
Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006-2010

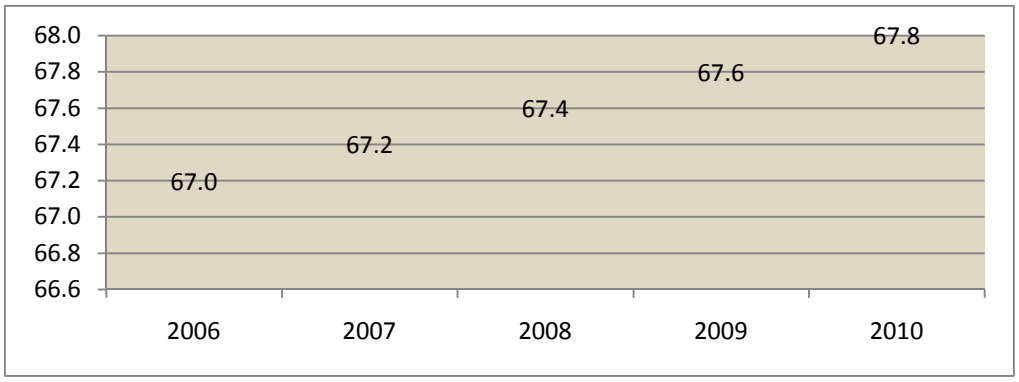

Sumber: Sulawesi Barat Dalam Angka 2006-2010

Tabel 2.38.
Angka Usia Harapan Hidup Menurut Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun 2006-2010

No	Kabupaten	Usia Harapan Hidup (Tahun)				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	Majene	64,10	64,30	64,74	65,06	65,38
2.	Polewali Mandar	63,90	64,18	64,44	64,71	64,99
3.	Mamasa	70,70	70,78	70,94	71,07	71,19
4.	Mamuju	67,50	67,76	68,00	68,26	68,51
5.	Mamuju Utara	67,40	67,44	67,47	67,51	67,55
Sulawesi Barat		**67,00**	**67,20**	**67,40**	**67,60**	**67,80**

Sumber: Sulawesi Barat Dalam Angka 2006-2010

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Organisasi pemuda di suatu wilayah menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberdayakan pemuda dalam pembangunan daerah.

Perkembangan jumlah klub olah raga di Provinsi Sulawesi Barat, dalam lima tahun terakhir mengalami penambahan. Tahun 2009 berjumlah 190 klub. Terdapat 8 buah gedung olahraga yang merupakan gedung olahraga serba guna atau multi fungsi.

Organisasi pemuda yang ada merupakan organisasi pemuda yang ada di masyarakat, seperti Pramuka, Karang Taruna, dan Kelompok Pemuda Produktif yang telah terdaftar dan dibina oleh pemerintah, baik provinsi maupun di kabupaten.Pada tahun 2009, organisasi pemuda yang terbanyak jumlahnya berada di Kabupaten Mamuju berjumlah 15 organisasi, dan Kabupaten Polewali Mandar berjumlah 13 organisasi.

Organisasi olah raga Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2009 berjumlah 70, untuk Kabupaten jumlah organisasi terbesar adalah Kabupaten Majene berjumlah50. Banyaknya jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga.

Penyelenggaraan kegiatan olah raga, yang dilaksanakan/diprogramkan oleh Pemerintah Daerah meliputi: 40 Kompetisi, Festival, Kejurda, Kejurnas dan Turnamen-

turnamen lainnya dan kegiatan-kegiatan olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat, swasta, sponsor dan pihak ketiga. Jumlah kegiatan olah raga tingkat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2009 sebanyak 7 kali. Tingkat kabupaten jumlah kegiatan olah raga diselenggarakan oleh Kabupaten Majene sebanyak 8 kali, selanjutnya Kabupaten Mamuju sebanyak 10 kali. Jumlah kegiatan olah raga yang tinggi merupakan indikator efektifitas keberadaan organisasi olahraga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tabel 2.39.
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006-2010

No.	Capaian Pembangunan	2006	2007	2008	2009	2010
1	Jumlah Group kesenian	25	37	39	45	93
2	Jumlah Gedung Kesenian	-	-	-	-	-
3	Jumlah Klub Olahraga	42	44	50	55	60
4	Jumlah Gedung Olahraga	18	18	18	20	20

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan sumber daya manusia suatu negara akan menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial, karena manusia merupakan pelaku aktif dari seluruh kegiatan tersebut.

Dari tahun ke tahun partisipasi seluruh masyarakat dalam dunia pendidikan semakin meningkat, hal berkaitan dengan berbagai program pendidikan yang dicanangkan pemerintah untuk lebih meningkatkan kesempatan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan.

a. Angka Partisipasi Sekolah

Selama kurun waktu sekitar empat tahun terlihat bahwa tingkat partisipasi sekolah di Provinsi Sulawesi Barat yang digambarkan dengan Angka Partisipasi Sekolah, relatif meningkat meskipun dalam perjalanannya selama empat tahun sedikit mengalami fluktuasi.

Grafik 2.21.
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur
di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2007-2010

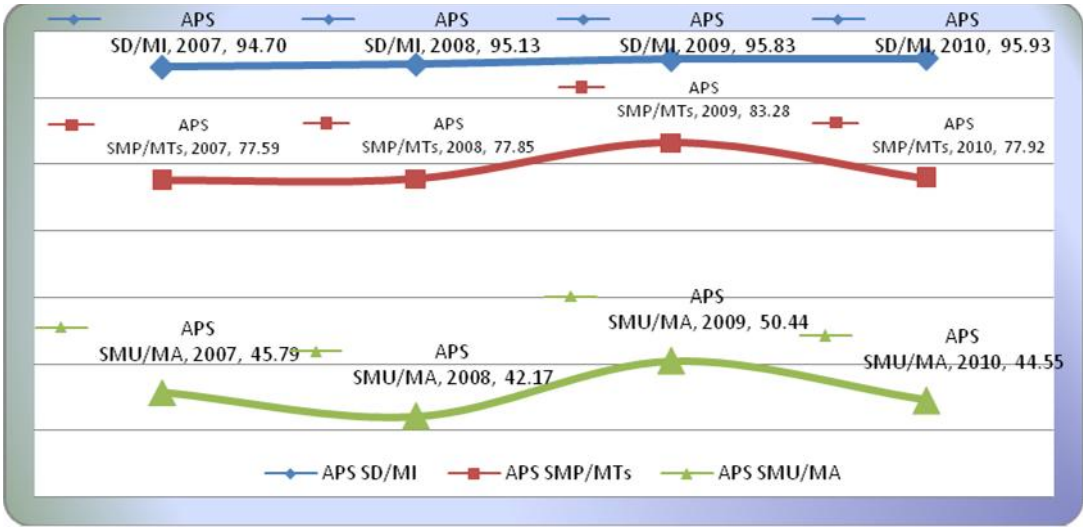

Sumber: Sulawesi Barat Dalam Angka 2006-2010

Pada tahun 2007, angka partisipasi sekolah untuk kelompok usia 7-12 tahun mencapai 94,70 persen, hingga akhirnya pada tahun 2010 mencapai 95,93 persen. Bila Angka Partisipasi Sekolah untuk kelompok umur 7-12 tahun terus mengalami peningkatan selama kurun waktu empat tahun, tidak demikian halnya untuk Angka Partisipasi Sekolah kelompok usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Pada kelompok umur ini, dalam perjalanannya selama empat tahun sedikit mengalami fluktuasi.

Angka Partisipasi Sekolah untuk kelompok umur 13-15 tahun pada tahun2007 mencapai angka 77,59 persen dan pada tahun 2010 mencapai 77,92 persen atau naik sekitar 0,33 persen namun dalam perjalanannya selama empat tahun angka tertinggi dicapai pada tahun 2009 yakni sebesar 83,28 persen. Sedangkan untuk angka partisipasi sekolah kelompok umur 16-18 tahun pada tahun 2007 mencapai angka 45,79 persen dan pada tahun 2010 sedikit mengalami penurunan yakni sebesar 44,55 persen atau turun sebesar 1,24 persen namun selama kurun waktu empat tahun angka partisipasi sekolah untuk kelompok umur ini mencapai angka tertinggi pada tahun 2009 yakni sebesar 50,44 persen.

b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Peningkatan partisipasi pendidikan tentunya harus diikuti dengan berbagai peningkatan penyediaan sarana fisik pendidikan dan tenaga pendidik

yang memadai. Salah satu bentuk fisik yang dapat kita lihat adalah semakin bertambahnya jumlah sekolah pada pendidikan dasar yakni pada tahun 2005 jumlah Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah sebanyak 1089 sekolah dan pada tahun 2010 telah mancapai 1392 sekolah atau mengalami peningkatan sebanyak 27,82 persen.

Demikian halnya dengan jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Madrasah Tsanawiyah yang meningkat sekitar 126,31 persen yakni sebanyak 152 sekolah pada tahun2005 dan telah mencapai 344 sekolah pada tahun 2010. Sementara untuk Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Madrasah Aliyah, pada tahun 2005 jumlah adalah 60 sekolah kemudian meningkat sebesar 83,33 persen pada tahun 2010 menjadi 110 sekolah.

Grafik 2.22.
Jumlah Sekolah SD, SLTP, dan SMU di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 dan 2010

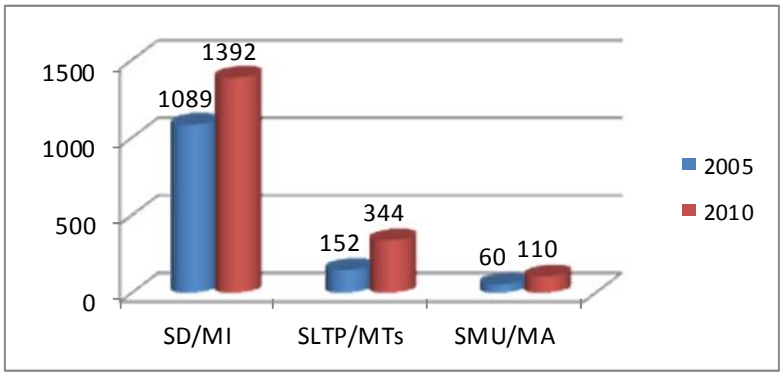

Sumber: Profil Pendidikan Sulawesi Barat 2011, Sulawesi Barat Dalam Angka 2006-2010

Grafik 2.23.
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010

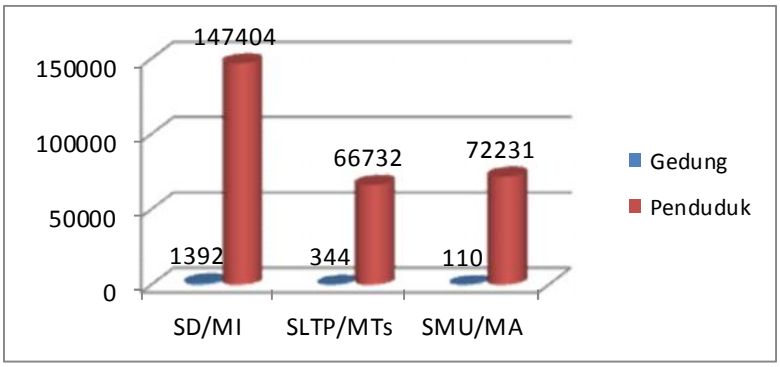

Sumber: Sulawesi Barat Dalam Angka 2006-2010

c. Rasio Murid Per Guru

Rasio murid terhadap guru adalah jumlah guru tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah murid pada jenjang pendidikan tersebut. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar pada tingkat pendidikan tertentu. Di samping itu, rasio ini juga digunakan untuk mengukur jumlah ideal murid bagi satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Rasio murid terhadap guru di Provinsi Sulawesi Barat jenjang pendidikan dasar sebesar 13,13, jenjang SMP/MTs sebesar 11,54, jenjang SMU/MA adalah 12 sedangkan untuk SMK rasio murid terhadap guru sebesar 11. Rasio tertinggi pada jenjang pendidikan dasar berdasarkan adalah Kabupaten Mamuju Utara, untuk jenjang SMP/MTs rasio tertinggi berada di Kabupaten Mamuju, sementara pada jenjang SMU/MA Rasio tertinggi yaitu Kabupaten Polewali Mandar dan Mamasa sebesar 15, sedangkan untuk jenjang SMK rasio tertinggi jumlah murid per guru berada di Kabupaten Polewali Mandar.

Tabel 2.40.
Rasio Murid/Guru SD/MI, SMP/MTs, SMU/MA dan SMK Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009/2010

No	Kabupaten	Rasio Murid / Guru			
		SD/MI	SMP/MTs	SMU/MA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Majene	9.86	10.37	9	10
2	Polewali Mandar	14.29	12.96	15	14
3	Mamasa	9.61	10.31	15	11
4	Mamuju	15.21	12.15	12	9
5	Mamuju Utara	16.02	9.89	6	2
Sulawesi Barat		**13.13**	**11.54**	**12**	**11**

Sumber: Bidang Sosbud Bappeda Prov. Sulbar, Tahun 2010 (Profil Pendidikan Sulawesi Barat Tahun 2010

2. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu tolok ukur suksesnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang madani. Hal ini dapat terwujud dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan yang juga harus diimbangi dengan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan.

Grafik 2.24.
Perkembangan Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas danPuskesmas Pembantu Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun2006-2010

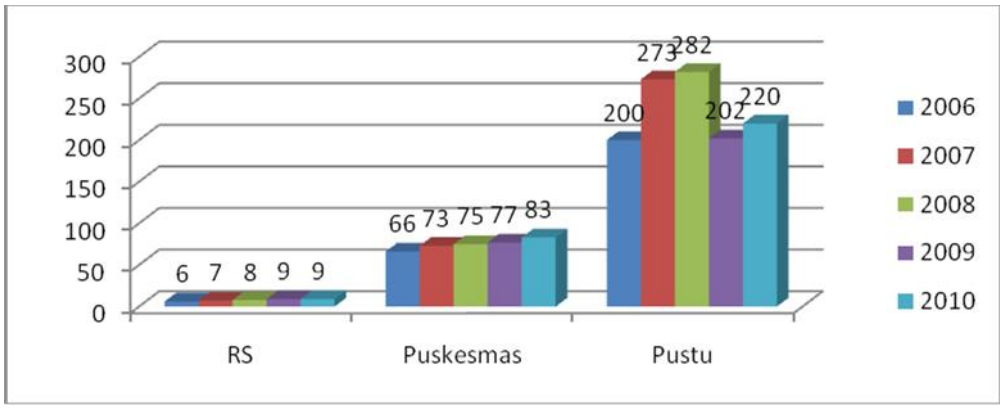

Sumber: Sulawesi Barat Dalam Angka 2006-2010

Peningkatan ketersediaan sarana kesehatan masyarakat dapat dilihat dari bertambahnya jumlah fasilitas kesehatan diantaranya peningkatan jumlah rumah sakit dari tahun 2006-2010 dengan persentase sebesar 50%. Jumlah puskesmas juga meningkat dari 66 menjadi 83 di tahun 2010 yang tersebar di seluruh kecamatan. Sedangkan puskesmas pembantu mengalami perubahan yang fluktuatif selama empat tahun terakhir, hal ini dikarenakan tidak seluruh Pustu aktif melakukan kegiatan secara kontinyu setiap tahunnya.

Grafik 2.25.
Perkembangan Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Jenisnya di Provinsi Sulawesi Barat Tahun2007-2010

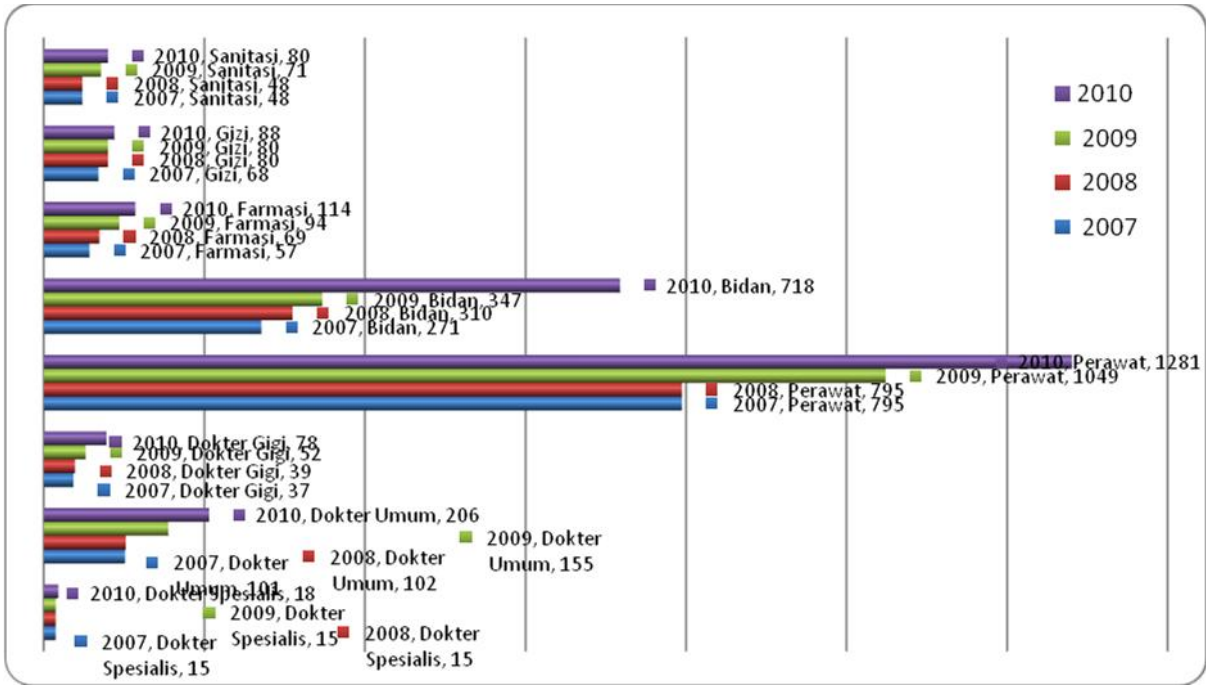

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2007-2010

Selain ketersediaan fasilitas kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat juga harus ditunjang dengan tersedianya sumber daya manusia di bidang kesehatan yakni tenaga kesehatan yang memadai dan berkualitas. Dalam kurun waktu 4 tahun ini, jumlah dokter umum meningkat sebesar 104% dari 101 menjadi 206, dokter Spesialis meningkat sebesar 20 persen dari 15 menjadi 18, dokter gigi mengalami peningkatan sebesar 111 persen dari 37 menjadi 78. Jumlah perawat meningkat sebesar 61 persen, adapun bidan mengalami peningkatan yang sangat signifikan yakni sebesar 165 persen sedangkan untuk tenaga Farmasi, Gizi dan Sanitasi Masing-masing mengalami peningkatan sebesar 100 persen, 29 persen dan 67 persen.

a. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian Ibu merupakan salah satu indikator penting yang merefleksikan derajat kesehatan di suatu daerah, yang mencakup tingkat kesadaran prilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan Ibu, kondisi kesehatan lingkungan serta tingkat pelayanan kesehatan terutama bagi ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu pada masa nifas.

Kesehatan Ibu hamil/bersalin dan Angka Kematian Ibu (AKI) memiliki korelasi erat dengan kesehatan bayi dan Angka Kematian Bayi. Faktor kesehatan ibu saat hamil dan bersalin berpengaruh terhadap kondisi kesehatan bayi yang dikandung serta resiko bayi yang dilahirkan dengan lahir mati (*still birth)* atau yang mengalami kematian neonatal dini (umur 0-6 hari).

Kematian ibu telah menunjukkan penurunan signifikan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, meskipun demikian angkanya masih cukup tinggi. Data kematian ibu dalam 4 tahun terakhir menunjukkan penurunan yang cukup baik. Tahun 2006 angka kematian ibu di Sulawesi Barat berada pada angka 394/100.000 kelahiran hidup dan mengalami penurunan menjadi 185/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2011.

Grafik 2.26.
Angka Kematian Ibu Sulawesi Barat tahun 2006 – 2011

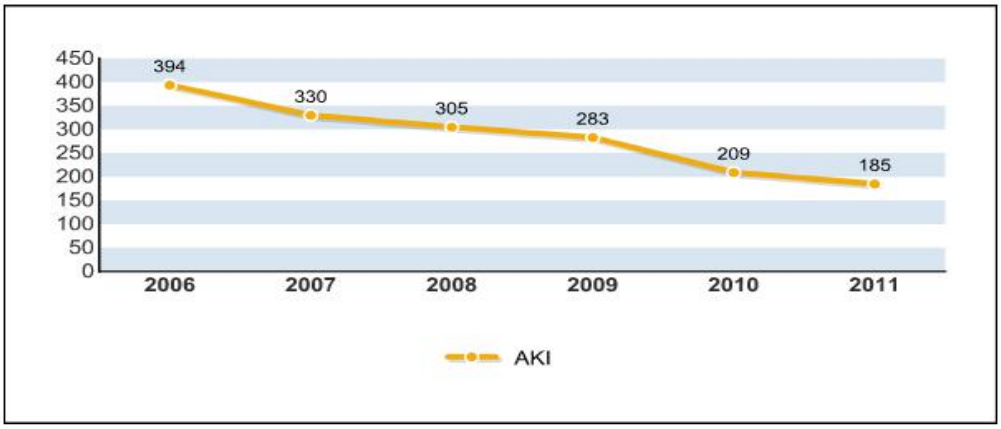

(sumber : Profil Dinkes Sulawesi Barat 2011)

Periode tahun 2006 – 2011terjadi penurunan Angka Kematian Ibu. Angka Kematian Ibu tahun 2010 masih berada pada angka 209 / 100.000 ribu kelahiran hidup. AKI tahun 2009-2010 tersebut telah lebih baik jika dibandingkan AKI nasional 228/100.000 Kelahiran hidup. Meskipun Angka Kematian Ibu di Sulawesi Barat lebih baik dibanding capaian Nasional namun angka ini adalah angka Kematian Ibu hamil yang hanya tercatat di sarana kesehatan. Angka Kematian Ibu Sulawesi Barat masih jauh dari Target MDG's secara nasional di tahun 2015 untuk angka kematian Ibu adalah tiga perempat dari kondisi tahun 2015 yaitu 102/100.000 kelahiran hidup.

b. Angka Kematian Bayi (AKB)

Sebagaimana gambaran perkembangan angka kematian ibu, angka kematian bayi juga mengalami fluktuasi selama kurun 5 tahun terakhir. Namun demikian pola naik turun yang terjadi tersebut seringkali dipengaruhi oleh multi faktor seperti yang terlihat pada periode 2006 sampai dengan 2010 yang merupakan masa dimana Sulawesi Barat merupakan Provinsi yang masih baru. Hal ini mengindikasikan bahwa kemungkinan angka kematian bayi masih dimungkinkan terjadi kenaikan jika tidak menjadi perhatian yang utama dari para pelaku kebijakan di bidang kesehatan.

Grafik 2.27.
Angka Kematian Bayi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2007 - 2011

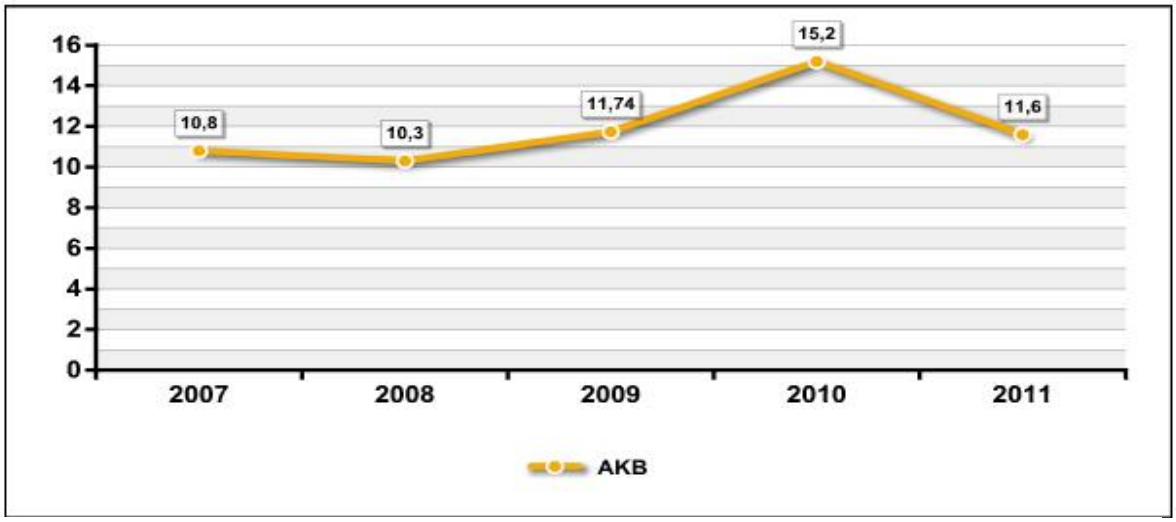

(sumber : Profil Dinkes Sulawesi Barat 2011)

Angka kematian bayi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010 sebesar 15.2/1000 kelahiran hidup menjadi 11,6 / 1000 kelahiran hidup pada tahun 2011. Angka kematian Bayi yang sangat fluktuatif selama kurun waktu 5 tahun terakhir tentunya menjadi sebuah masalah tersendiri dalam penanganan masalah kesehatan di Sulawesi Barat. Dengan pola yang ada tersebut maka diprediksikan pada tahun 2016 angka kematian bayi di Sulawesi Barat dipredeksi akan mencapai 9,93 / 1000 kelahiran hidup. Secara Nasional, target MDG's untuk angka kematian bayi pada tahun 2015 ditargetkan akan menurun menjadi 23/1000 kelahiran hidup. Angka Kematian Sulawesi Barat telah mencapai target dalam MDGs, namun Angka Kematian Bayi disini adalah yang hanya tercatat di sarana kesehatan.

c. Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka kematian balita memiliki kecenderungan penurunan yang cukup baik. Tahun 1971 tercatat tingkat kematian balita yang sangat tinggi yaitu mencapai 148 / 1000 balita yang ada, angka tersebut secara berangsur turun dan 20 tahun kemudian menjadi 53/1000 balita, tahun 2002 sudah mencapai 28 / 1000 dan data tahun 2007 telah mencapai angka 19/1000 dan tetap bertahan.

Grafik 2.28.
Angka Kematian Balita Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2007 - 2011

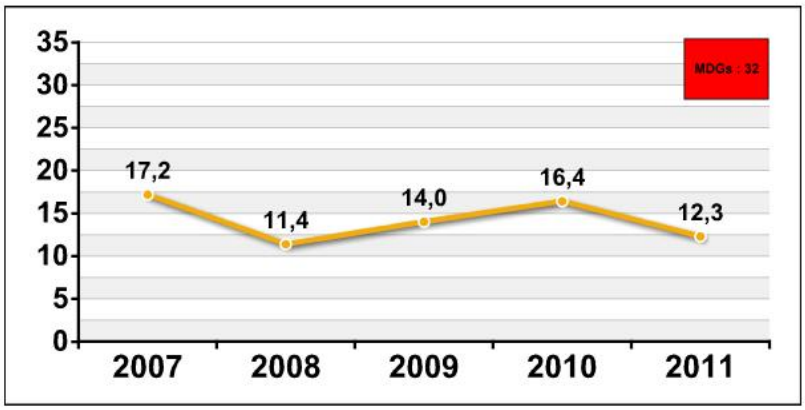

sumber : Profil Dinkes Sulawesi Barat 2011

Pola penurunan terjadi dari tahun 2010 – 2011 dan sedikit berbeda pada kisaran tahun 2008 sampai dengan 2010 yang kemungkinan disebabkan oleh adanya pelaksanaan program Kesehatan Ibu dan Anak yang semakin baik dilapangan. Dengan pola AKABA yang fluktuatif selama kurun waktu 5 tahun terakhir maka diprediksikan di tahun 2016 angka kematian balita akan mencapai 10,3/1000. Secara Nasional target MDG's untuk angka kematian balita pada tahun 2015 ditargetkan akan menurun menjadi 32/1000 kelahiran hidup.

3. Kependudukan

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai sasaran pembangunan. Dengan kata lain bahwa sumberdaya manusia yang berkualitas tinggi sangat dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu pembangunan sumberdaya manusia menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan di Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai input dalam setiap penyusunan rencana pembangunan, maka pengetahuan tentang data kondisi kependudukan eksisting di wilayah rencana sangat dibutuhkan.

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sulawesi Barat per tahun selama lima tahun terakhir yakni dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 sebesar **2,68 persen**.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Mamuju Utara adalah yang tertinggi

dibandingkan kabupaten-kabupaten lain di Sulawesi Barat yakni sebesar **5,94 persen**, sedangkan yang terendah di Kabupaten Polewali Mandar yakni **1,44 persen** walaupun dari sisi jumlah penduduknya Kabupaten Mamuju Utara memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.21 berikut:

Tabel 2.41.
Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Tahun 2005	Jumlah Penduduk Tahun 2010	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun
Mamuju	269.876	336.973	3,91 %
Polewali Mandar	352.407	396.120	1,44 %
Majene	131.413	151.107	1,97 %
Mamasa	120.496	140.082	1,81 %
Mamuju Utara	95.237	134.369	5,94 %
Sulawesi Barat	**969.429**	**1.158.651**	**2,68 %**

Sumber: Sulbar Dalam Angka, 2011

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

a. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Potensi sumber daya alam yang berada di Sulawesi Barat menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor untuk melakukan investasi di Sulawesi Barat. Peluang ini harus ditangkap oleh pemerintah daerah dengan membuka regulasi yang mudah dalam proses pengurusan investasi.

Investor yang berminat terhadap pengembangan perekonomian Sulawesi Barat, tidak hanya berasal dari dalam negeri akan tetapi diminati juga oleh investor asing.

Pada kurun waktu 2009-2011, jumlah investor yang menanamkan modalnya di Sulawesi Barat mengalami perkembangan yang berfluktuasi. Pada tahun 2009, jumlah perusahaan yang terdaftar sebanyak 66 perusahaan, turun menjadi 48 perusahaan pada tahun 2010. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa perusahaan yang tidak aktif pada tahun 2010. Pada tahun 2011, jumlah perusahaan kembali mengalami peningkatan menjadi 95 perusahaan atau meningkat 29 perusahaan dari tahun 2009.

Tabel 2.42.
Jumlah Investor PMDN/PMA
di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006-2011

Tahun	PMDN	PMA	Total
2006	6	0	6
2007	10	0	10
2008	6	0	6
2009	58	8	66
2010	27	18	45
2011	82	12	94

Sumber : Badan Promosi dan Penanaman Modal DaerahProv. Sulawesi Barat

b. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Tabel 2.43.
Jumlah Investasi PMDN/PMA
di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006-2011

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2006	6	1,624,254,350,579	6	1,874,619,675,356
2007	10	2,018,944,350,597	6	1,874,619,675,356
2008	6	3,643,198,701,176	6	3,749,239,350,712
2009	66	50,667,925,000	66	2,824,488,307,858
2010	45	5,614,739,236,083	45	2,288,693,990,322
2011	94	5,935,761,694,463	94	10,998,075,033,334

Sumber : Badan Promosi dan Penanaman Modal DaerahProv. Sulawesi Barat

Sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang paling banyak diminati oleh investor. Hal ini terlihat dari jumlah investor yang mencapai 40 perusahaan.Jumlahini meningkat dibanding tahun 2010 yang berjumlah 14 perusahaan.Sementara sektor pertanian yang berbasis pada sub sektor perkebunan memiliki jumlah investor sebanyak 21 perusahaan,jumlah ini juga meningkat 6 perusahaan dari tahun 2009.

Keberadaan investor di Sulawesi Barat, turut memberi andil dalam perekonomian. Hal ini nampak dari adanya penyerapan tenaga kerja yang cukup besar. Pada tahun 2011 tenaga kerja yang terserap mencapai 5.561orang meningkat dari tahun 2010 yang berjumlah 4.277 orang.

Selain itu, investasi dari perusahan-perusahan ini jugamengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009, investasi di Sulawesi

Baratmencapai 1.927,88 milyar rupiah. Sedangkan pada tahun 2010 mencapai 2.282,01 milyar rupiah dan meningkat lagi sebesar 185 persen pada tahun 2011.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapaitingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Aspek daya saing daerah merupakan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan baik dengan provinsi atau daerah lainnya yang berdekatan, maupun nasional atau internasional.

a. Pengeluaran Konsumsi rumah tangga perkapita (angka konsumsi RT perkapita)

Pengeluaran rata-rata konsumsi Rumah Tangga perkapita perbulan di Provinsi Sulawesi Barat selama tahun 2009-2010 mengalamipeningkatan,dimana pada tahun 2009 nilai pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga perkapita di Perkotaan sebesar Rp. 352.621,- dan Perdesaan Rp. 291.201,- sehingga total konsumsi rumah tangga perkapita Rp. 643.822,- dan pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp. 864.564,. Untuk besaran investasi urutan tertinggi berada pada jenis pengeluaran padi-padian,kemudianmenyusul ikan serta makanan dan minuman jadi.

Tabel 2.44.
Jumlah Investasi PMDN/PMA
di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006-2011

Jenis Pengeluaran	Perkotaan		Perdesaan	
	2009	2010	2009	2010
Padi-padian	40.547	59.764	48.041	58.470
Umbi-umbian	1.202	1.109	3.495	2.865
Ikan	40.148	45.502	29.213	29.239
Daging	320	3.489	1.726	4.784
Telur dan Susu	7.886	9.370	4.900	7.091
Sayur-sayuran	11.454	13.588	14.625	13.249
Kacang-kacangan	1.487	3.624	1.970	2.531
Buah-buahan	9.275	15.598	8.139	11.353
Minyak dan Lemak	6.012	8.546	6.367	7.101
Bahan Minuman	9.242	13.039	9.530	11.879
Konsumsi Lainnya	3.867	6.081	4.108	4.332
Bumbu-bumbuan	4.323	5.607	4.192	4.468

Jenis Pengeluaran	Perkotaan		Perdesaan	
	2009	2010	2009	2010
Makanan dan Minuman	26.262	45.978	22.123	30.108
Tembakau dan Sirih	18.694	22.876	16.912	23.013
Total Makanan	**180.629**	**254.171**	**175.342**	**210.483**
Perumahan	76.526	95.392	44.546	59.734
Aneka Barang dan Jasa	49.880	71.089	38.273	44.000
Pakaian dan Alas Kaki	12.271	16.267	8.932	11.115
Barang Tahan Lama	25.981	62.737	17.562	16.518
Pajak dan Asuransi	5.747	8.012	2.123	2.492
Keperluan Pesta	1.587	7.687	4.422	3.876
Total Bukan Makanan	**171.992**	**262.174**	**115.859**	**137.736**

Sumber: Sulawesi Barat Dalam Angka 2006-2010

b. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan petani. Yang dimaksud dengan Nilai Tukar Petani adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) dalam persentase. It merupakan suatu indikator tingkat kesejahteraan petani produsen dari sisi pendapatan, sedangkan Ib dari sisi kebutuhan petani baik untuk konsumsi maupun produksi. Bila It atau Ib lebih besar dari 100, berarti It atau Ib lebih tinggi dibandingkan It atau Ib pada tahun dasar (2007=100).

Jika dibandingkan dari tahun ke tahun, NTP tahunan Sulawesi Barat fluktuatif. NTP tahun 2008 sebesar 102,17 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 3,28 persen menjadi 105,52 pada tahun 2009. Sedangkan, pada tahun 2010 NTP Sulawesi Barat mengalami penurunan sebesar 0,04 persen menjadi 105,48. Hal ini menggambarkan bahwa dalam tiga tahun terakhir kesejahtaraan petani di Sulawesi Barat mengalami puncaknya pada tahun 2009.

Berbeda dengan NTP Sulawesi Barat, NTP Indonesia mengalami penurunan dari 100,15 pada tahun 2008 menjadi 99,86 pada tahun 2009 atau turun sebesar0,29 persen. Akan tetapi, pada tahun 2010 NTP Indonesia kembali meningkatsebesar 1,92 persen menjadi 101,78. Selama tahun 2008 sampai dengan tahun2010, NTP Indonesia tercatat masih lebih rendah jika dibandingkan dengan NTP Sulawesi Barat.

Grafik 2.29.
Perbandingan NTP Sulawesi Barat dan NTP Indonesia
Tahun 2008–2010

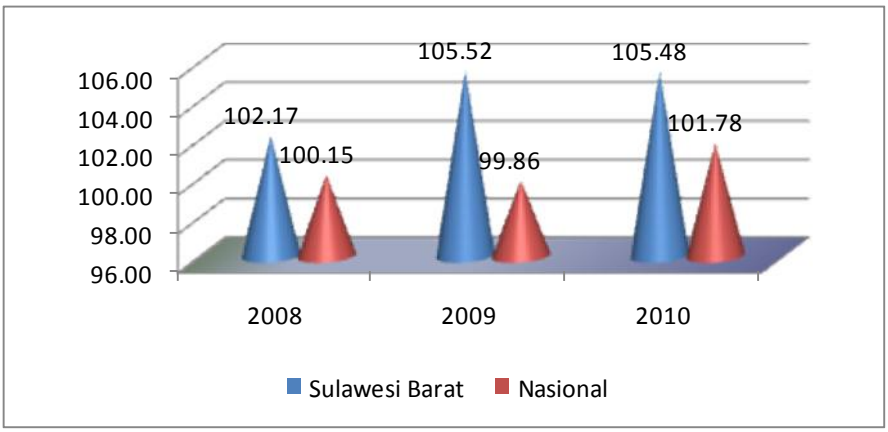

Sumber: Sulawesi Barat Dalam Angka 2006-2010

Berbeda dengan NTP Sulawesi Barat, NTP Indonesia mengalami penurunan dari 100,15 pada tahun 2008 menjadi 99,86 pada tahun 2009 atau turun sebesar0,29 persen. Akan tetapi, pada tahun 2010 NTP Indonesia kembali meningkat sebesar 1,92 persen menjadi 101,78. Selama tahun 2008 sampai dengan tahun2010, NTP Indonesia tercatat masih lebih rendah jika dibandingkan dengan NTP Sulawesi Barat.

NTP menurut subsektor terdiri atas lima yakni; subsektor tanamanpangan, subsektorhortikultura, subsektortanaman perkebunan rakyat, subsektorpeternakan, dan subsektor perikanan.

Grafik 2.30.
Perkembangan Rata-rata Nilai Tukar Petani MenurutSub Sektor
di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008-2010

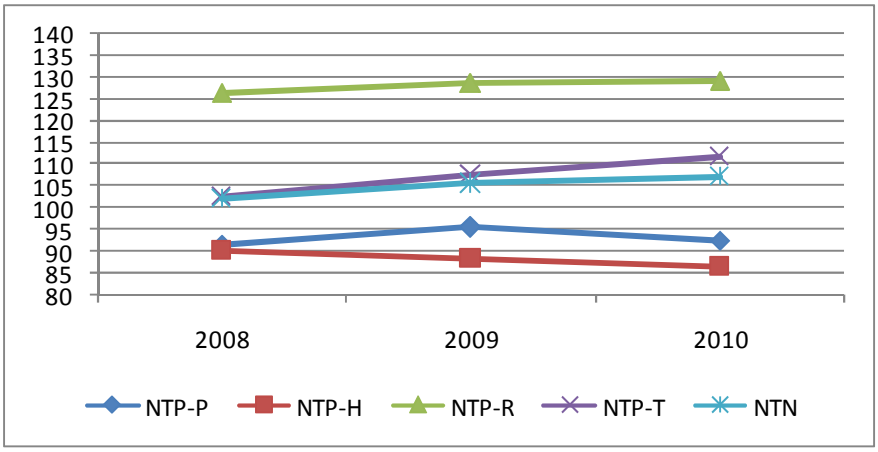

Sumber: Sulawesi Barat Dalam Angka 2006-2010

c. Pengeluran Konsumsi Non Pangan Perkapita

1. Subsektor Tanaman Pangan (NTP-P)

Subsektor tanaman pangan adalah salah satu subsektor yang perlumendapat perhatian dari pemerintah daerah karena selama periode tahun 2008-2010, NTP subsektor ini mengalami penurunan dan masih dibawah 100. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan petani tanaman pangan masih kurang. Oleh karenanya, diharapkan kepada semua pihak yang terkait agar merumuskan kebijakan yang tepat untuk dapat lebih meningkatkan kehidupan petani pada subsektor ini. NTP-P pada tahun 2008 sebesar 91,44, mengalami peningkatan pada tahun 2009 menjadi sebesar 95,54 dan turun kembali pada tahun 2010 menjadi sebesar 92,60.

2. Subsektor Hortikultura (NTP-H)

NTP subsektor hortikultura memperlihatkan tren yang sama dengan subsektor tanaman pangan. Hal ini perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah agar dapat meningkatkan subsektor ini. NTP-H selama periode2008-2010 terlihat belum ada yang mencapai nilai di atas 100, ini menunjukkanbahwa kenaikan harga komoditi hasil pertanian hortikultura secara umum lebih lambat dibandingkan kenaikan harga komoditi untuk keperluan konsumsi dan produksi pertanian. Berarti daya tukar produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi pertanian subsektor hortikultura secara umum lebih rendah. NTP-H pada tahun 2008 sebesar 90,20, turun pada tahun 2009 menjadi sebesar 88,38 dan berada pada titik terendah pada tahun2010 menjadi 85,41

3. Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTP-R)

Secara umum NTP subsektor tanaman perkebunan rakyat sudah di atas100 dan merupakan subsektor dengan nilai tukar petani yang tertinggi dibanding dengan NTP subsektor lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa petani subsektor tanaman perkebunan rakyat mendapatkan tingkat kesejahteraan yang paling besar dibandingkan dengan petani pada subsektor lainnya. Nilai NTP subsektor ini selalu berada diatas level Sulawesi Barat. NTP-R pada tahun 2008 sebesar 126,52,meningkat pada tahun 2009 menjadi sebesar 128,77 dan pada tahun 2010 menjadi 129,33.

4. Subsektor Peternakan (NTP-T)

NTP-T selama periode tahun 2008-2010 menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Ini terlihat dari nilainya yang selalu di atas 100 dan meningkat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Hal ini berarti bahwa pendapatan peternak naik lebih besar dari pengeluarannya. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan peternak lebih baik dibandingkan waktu sebelumnya. Pada tahun 2008 NTP-T sebesar 102,53, meningkat pada tahun 2009 menjadi 107,70 dan pada tahun 2010 sebesar 111,80.

5. Subsektor Perikanan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan selama periode tahun 2008-2010 stabil dan menunjukkan peningkatan. Ini berarti bahwa secara umum tingkat kesejahteraan nelayan semakin membaik. NTN pada tahun 2008 sebesar 102,11 kemudian meningkat pada tahun 2009 menjadi sebesar105,57 dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 107,13.

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah Infrastruktur

a. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Tabel 2.45.
Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2010-2014
Provinsi sulawesi Barat

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1	Realisasi RTRW	√	√	√	√	√
2	Rencana Peruntuka RTRW	√	√	√	√	√

Sumber : Bidang Fispra Bappeda Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012

b. Luas Wilayah Produktif

Tabel 2.46.
Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2010-2014

Komoditas	Luas (ha) di Kabupaten					Total Sulbar
	Mamuju	Matra	Polman	Majene	Mamasa	
Kakao	100.515	29.471	44.318	6.239	17.461	198.003
Sawit	60.231	51.736	-	-	-	111.967
Kelapa	13.540	9.399	799	3.144	-	26.881
Jeruk dan / atau Kakao	57.749	39.813	-	-	-	97.562
Kelapa Dan / Atau Kakao	14.785	1.456	4.566	12.924	-	33.731
Kopi Arabika, Teh, Hortikultura Dataran Tinggi	17.003	4.720	1.032	1.318	20.833	44.906

Komoditas	Luas (ha) di Kabupaten					Total Sulbar
	Mamuju	Matra	Polman	Majene	Mamasa	
Hortikultura / Sayuran Dataran Tunggi	-	-	-	-	5.684	5.684
Sawah (padi Sawah)	4.228	11.182	18.818	-	-	34.228
Sawah (Padi-Palawija/Tanaman Pangan	31.157	17.350	3.716	2.462	-	54.685
Pertanian Tanaman Pangan Lahan Kering dan Peternakan	7.647	839	21.117	4.047	294	33.944
Tambak (Ikan dan Udang)	3.342	4.347	3.970	310	-	11.969
Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya non Komoditas	476.245	119.245	86.598	61.229	273.010	1.016.327

Sumber : Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012

c. Infrastruktur Jalan

Jalan merupakan prasarana angkutan darat yang penting untuk memperlancar arus transportasi darat dan kegiatan perekonomian. Kegiatan pembangunan tidak bisa terlepas dari peningkatan prasarana transportasi untuk menunjang mobilitas penduduk dan kelancaran distribusi barang dari dan ke daerah lain.

Grafik 2.31.
Persentase Jalan di Sulawesi Barat Menurut Status (persen)
Tahun 2006 dan 2010

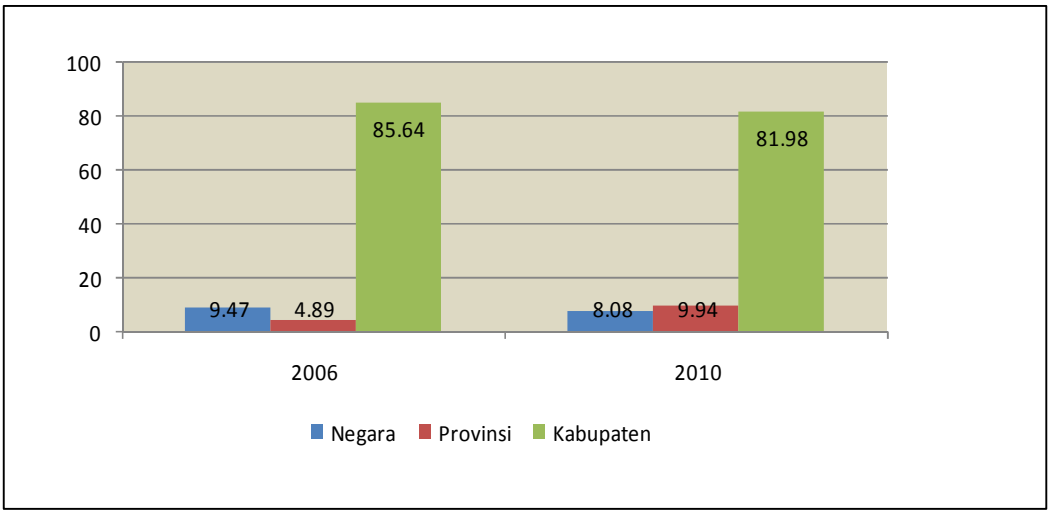

Sumber: Sulawesi Barat Dalam Angka 2006 - 2010

Menurut status permukaan jalan, mayoritas jalan di Sulawesi Barat berstatus sebagai jalan kabupaten. Pada tahun 2006, status jalan kabupaten di Sulawesi Barat sekitar 85,64 persen. Sementara jalan provinsi dan nasional masing-masing sebanyak 4,89 persen dan 9,47 persen. Kondisi ini mengalami pergeseran dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, jalan kabupaten masih mendominasi jalan di Sulawesi Barat hingga 81,98 persen, sedangkan persentase jalan provinsi dan negara masing-masing 9,94 persen dan 8,08 persen. Adanya peningkatan pada jalan negara disebabkan oleh adanya peningkatan status pada jalan provinsi di beberapa ruas di Sulawesi Barat.

Tabel 2.47.
Panjang Jalan Menurut Status Jalan di Sulawesi Barat (Km)
Tahun 2006-2010

Status Jalan	Panjang Jalan				
	2006	2007	2008	2009	2010
Jalan Nasional	541,06	544,55	544,74	544,74	571,98
Jalan Provinsi	279,07	417,64	417,64	488,16	704,28
Jalan Kabupaten	4.891,90	6.136,38	6.409,90	5.813,19	5.805,65
Sulawesi Barat	**5.712,03**	**7.098,57**	**7.372,28**	**6.846,09**	**7.081,91**

Sumber: Sulawesi Barat Dalam Angka 2006-2010

Grafik 2.32.
Perkembangan Panjang Jalan yang Berkualitas Baik dan Sedang (Km)
di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006-2010

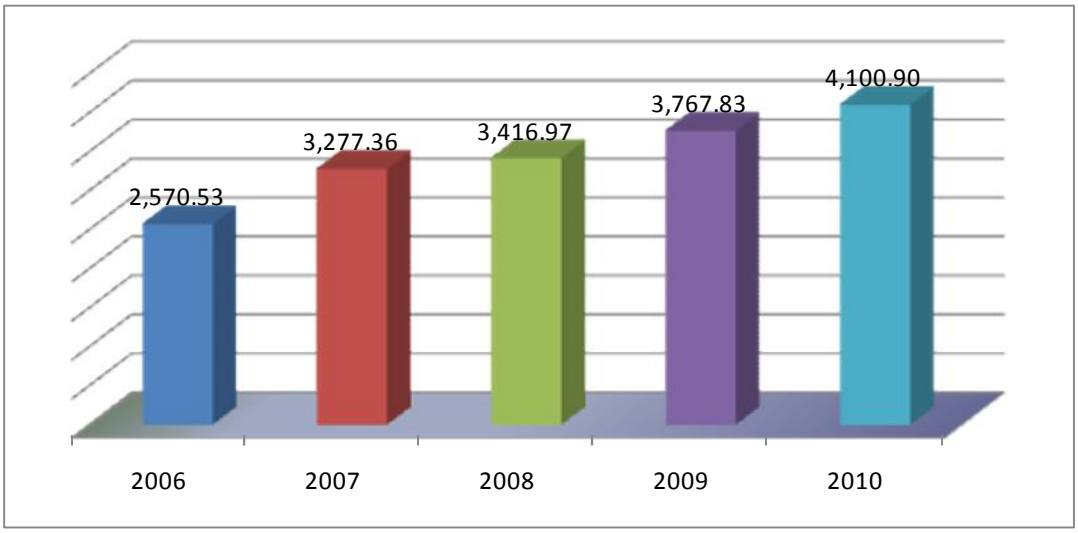

Sumber: Sulawesi Barat Dalam Angka 2006-2010

Selain itu, sarana panjang jalan ini mengalami peningkatan dari segi kualitasnya. Pada tahun 2006, panjang jalan dengan kualitas baik dan sedang berkisar 45,00 persen (sekitar 2.570,53 Km). Kemudian meningkat menjadi 57,91 persen pada tahun 2010 (4.100,90 Km) setelah mencapai 55,03 persen pada tahun 2009. Peningkatan ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelancaran arus transportasi.

d. Perkembangan Perhubungan Laut

Sulawesi Barat yang wilayahnya membujur ke arah utara mempunyai wilayah perairan umum sepanjang garis pantai barat antara perbatasan wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Sehingga Sulawesi Barat memiliki potensi lautyangstratigis dalam pengembangan moda angkutan lautuntuk memperlancar hubungan antar pulau di nusantara maupun luar negeri. Di Provinsi Sulawesi Barat sendiri terdapat 4 (empat) instansi vertikal unit penyelenggara pelabuhan yang mengoperasikan 15 (lima) belas lokasi pelabuhan laut.

Grafik 2.33.
Perkembangan Lalu Lintas Pelayaran Laut
di Sulawesi Barat Tahun 2006-2010

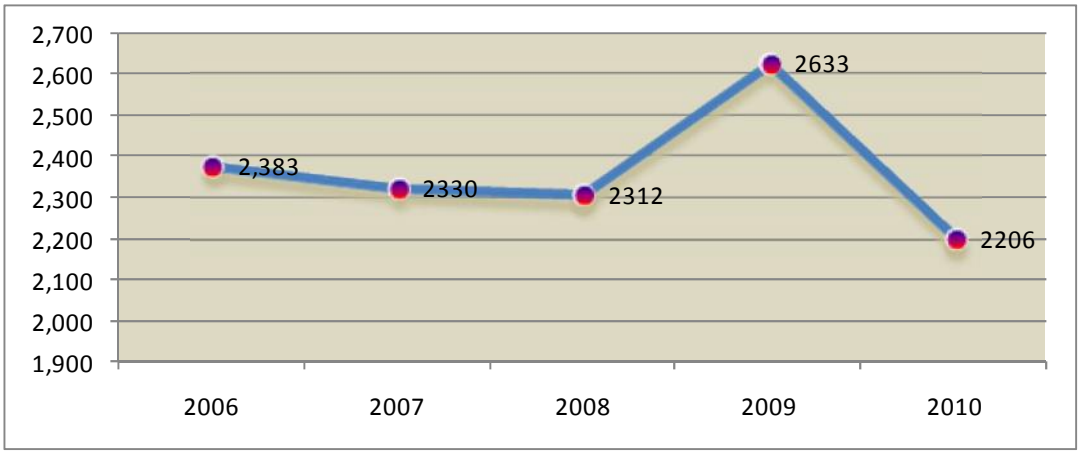

Sumber: Sulawesi Barat Dalam Angka 2006-2010

Kunjungan kapal di berbagai pelabuhan di Sulawesi Barat dalam periode tahun 2006-2010, mengalami perkembangan yang fluktuatif. Lalu lintas kunjungan kapal pada tahun 2006 sebanyak 2.383 kali pelayaran, turun menjadi 2.206 kali pada tahun 2010. Akan tetapi jumlah pelayaran tertinggi pada tahun 2009 sebanyak2.633 kali kunjungan. Pelayaran di Sulawesi Barat akan terus berkembang seiringdengan pembangunan fasilitas pelabuhan yang lebih memadai seiring dengan terbukanya jalur pelabuhan laut yang semakin maju.

e. Perkembangan Perhubungan Udara

Salah satu moda angkutan yang relatif baru mulai berkembang di Sulawesi Barat adalah moda udara di Bandar Udara Tampa Padang, Kabupaten Mamuju. Keadaan fasilitas Bandar Udara Tampa Padang sampai saat ini masih dalam tahap pengembangan agar bisa didarati pesawat berbadan lebar. Dalam kondisi saat ini, Bandar Udara Tampa Padang sudah bisa didarati pesawat jenis boeing 737-400. Dan sekarang ini secara rutin telah ada penerbangan pesawat Makassar – Mamuju jenis ATR72-500 yang berkapasitas 72 tempat duduk. Aktivitas penerbangan di Bandara Tampa Padang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun baik dari sisi frekuensi penerbangan maupun jumlah penumpang.

Grafik 2.34.
Perkembangan Jumlah Penumpang di Bandara Tampa Padang
Tahun 2006-2010

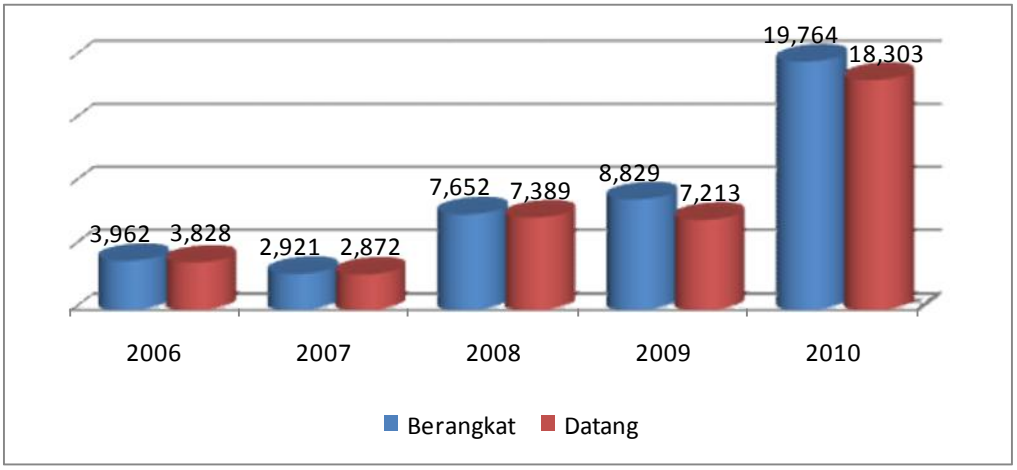

Sumber: Sulawesi Barat Dalam Angka 2006-2010

Peningkatan aktivitas penerbangan di Sulawesi Barat berdampak terhadap peningkatan animo masyarakat dalam memanfaatkan jasa penerbangan udara. Jumlah penumpang yang berangkat dan tiba di Sulawesi Barat dengan moda angkutan pesawat mengalamipeningkatanyang signifikan dalam periode 2006-2010. Pada tahun 2006 jumlah penumpang yang berangkat dan tiba di Bandara Tampa Padang masing-masing sebanyak 3.962 orang dan 3.828 orang. Aktivitas penerbangan pada periode ini masih dilayani oleh pesawat jenis CASA-212 dengan maskapai SMAC (*Sabang Merauke Air Charter*). Jumlah penerbangan di tahun 2007, sedikit mengalami penurunan, karena adanya peringatan/himbauan dari Komisi Nasional Kacelakaan Transportasi (KNKT) kepada maskapai SMAC untuk menghentikan aktivitas penerbangan, termasuk rute Mamuju-Makassar. Larangan

ini, berdampak terhadap turunnya aktivitas penerbangan. Kondisi ini otomatis menurunkan jumlah penumpang yang berangkat dan datang hingga 26,27 persen dan 24,97 persen.

Kondisi itu dapat diatasi dengan suatu terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat,dengan segera menambah panjang dan lebar landasan pacu agar dapat didarati oleh pesawat yang lebih besar sehingga aktivitas penerbangan mengalami lonjakan yang cukup tajam hingga tahun 2010. Jumlah penumpang yang berangkat dari bandara ini sudah mencapai 19.764 orang sementara penumpang yang tiba sebanyak 18.303 orang.

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

a. Angka Kriminalitas

Angka Kriminalitas adalah rata-rata kriminalitas yang terjadi dalam satu bulan pada tahun tertentu. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat. Semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Grafik 2.35.
Angka Kriminalitas di Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2009-2011

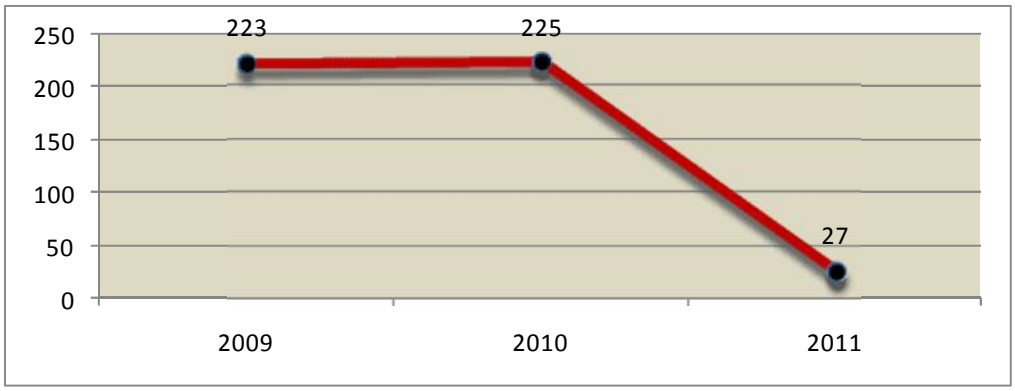

Sumber:Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Prov. Sulawesi Barat

Selama tahun 2009-2011, Angka Kriminalitas memiliki tren menurun meskipun pada tahun 2010 relatif meningkat, akan tetapi peningkatannya tidak signifikan. Pada tahun 2009 terdapat 223 jumlah kejadian kriminalitas, kemudian meningkat menjadi 225 pada tahun 2010. Namun pada tahun 2011, terjadi penurunan yang sangat drastis menjadi hanya tinggal 27.

b. Jumlah Demonstrasi

Jumlah demonstrasi merupakan jumlah demonstrasi yang terjadi dalam periode 1 (satu) tahun. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum.

Di Provinsi Sulawesi Barat, demonstrasi yang terjadi terbilang masih rendah dibandingkan dengan kota atau provinsi lain. Pada tahun 2009 dan 2010, demonstrasi yang terjadi tercatat sekitar 40 kali, relatif stagnan. Akan tetapi pada tahun 2011, demonstrasi hanya terjadi 21 kali.

Grafik 2.36.
Jumlah Demonstrasi di Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2009-2011

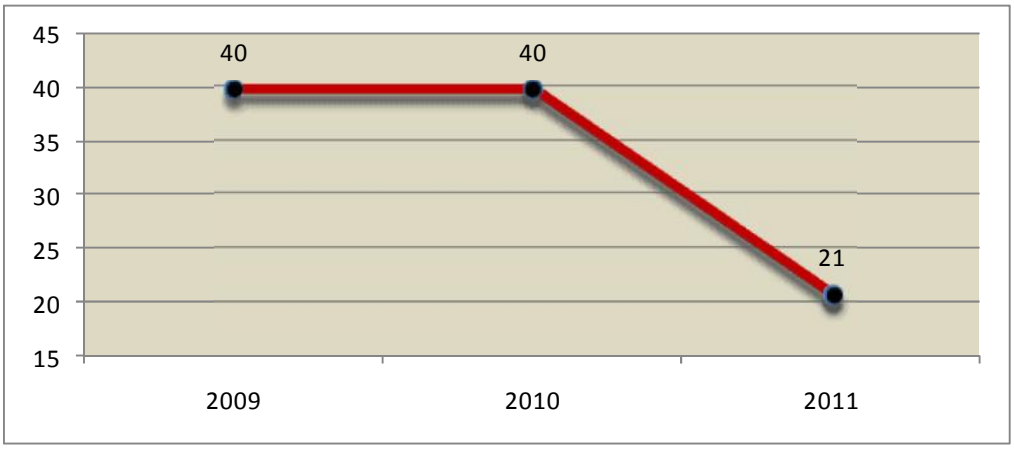

Sumber:Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Prov. Sulawesi Barat

Dari sekian banyak unjuk rasa tersebut, tercatat ada tiga aspek yang menjadi issu demonstrasi dilakukan yakni; bidang politik, ekonomi, dan kasus pemogokan kerja. Dan faktor yang mendominasi unjuk rasa terjadi adalah faktor politik. Hal ini dianggap lumrah, terlebih pada saat diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah.

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

a. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik

kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaiakan S1, S2 dan S3.

Tabel 2.48.
Perkembangan Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi Per Jenjang Pendidikan Tahun 2008-2010

Tahun	Perkembangan Jumlah Lulusan S1, S2 dan S3	Jumlah Penduduk	Rasio lulusan
2008	14.202	1.032.256	137.58
2009	18.429	1.047.739	175.89
2010	21.084	1.158.651	181.97
2011	32.429	1.189.203	272.70

Sumber : data diolah dari http://www.psp.kemdiknas.go.id dan Sulbar Dalam Angka tahun 2006-2010

Hasil analisis tsb supaya disajikan ke dalam Tabel-tabel yang tercantum dalam Lampiran III Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tabel T-III.C.34

Tren pertumbuhan Rasio Lulusan Sarjana S1, S2 dan S3 Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2008 hingga tahun 2011 sebesar 27,05. Angka pertumbuhan tertinggi pada tahun 2011 mencapai 49,85. Sementara angka pertumbuhan terendah dari rasio lulusan sarjana terhadap jumlah total populasi penduduk Provinsi Sulawesi Barat berada pada tahun 2010 yaitu sebesar 3,45.

b. Tingkat Ketergantungan (rasio ketergantungan)

Rasio Ketergantungan *(Dependency Ratio)*adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun.Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah sudah maju ataupun sebaliknya. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2.49.
Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur tahun 2010

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk
<15	417.802
15-64	693.801
>64	47.048

Data olahan dari Sulawesi Barat Dalam Angka 2011

Berdasarkan Kelompok Umur maka dapat diketahui jumlah rasio ketergantungan di Provinsi Sulawesi Barat yaitu sebesar 67.00 persen, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 67 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun 2010 penduduk usia kerja di Provinsi Sulawesi Barat masih dibebani tanggung jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua.